

**DINAMIKA KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN COVID-19
DI KOTA PEKANBARU**

Oleh :

DECKIE ASWANDI

197322039

TESIS

Untuk memenuhi salah satu syarat

Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

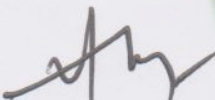
Nama : DECKIE ASWANDI
NPM : 197322039
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Kekhususan : Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : **DINAMIKA KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN
COVID-19 DI KOTA PEKANBARU**

Telah dipertahankan di Hadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana,
Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau

Hari : Jum'at
Tanggal : 09 Juli 2021
Pukul : 08.30 – 09.30 WIB

**Dan dinyatakan LULUS
PANITIA PENGUJI TESIS**

Ketua


Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Sekretaris


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Anggota I

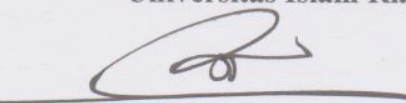

Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A

Anggota II


Dr. Zainal, S.Sos., M.Si

Mengetahui ;

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul :

**DINAMIKA KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN COVID-19
DI KOTA PEKANBARU**

Oleh :

Nama : Deckie aswandi
NPM : 197322039
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing.

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan.

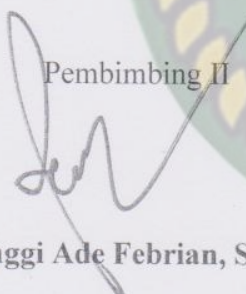
Pembimbing I

Tanggal 7 JUNI 2021

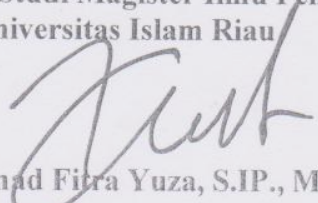

(Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si)

Pembimbing II

Tanggal 7/6/2021


(Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si)

Mengetahui ;
Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau


(Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A)



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DECKIE ASWANDI
NPM : 197322039
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : DINAMIKA KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN
COVID-19 DI KOTA PEKANBARU

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. ----- Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Riau maupun di Perguruan tinggi lainnya.
2. ----- Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. ----- Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan di cantumkan di dalam daftar Pustaka.
4. ----- Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dari apa yang saya nyatakan di atas (poin 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian tesis dan/atau pencabutan gelar akademik magister dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, ...5 MARET...2021



Yang menyatakan

(DECKIE ASWANDI)

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR : 499/KPTS/PPS-UIR/2021

TENTANG

PERUBAHAN JUDUL PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS – UIR, maka perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
2. Bahwa berdasarkan dari hasil ujian seminar proposal yang telah dilaksanakan, Tim Penguji ujian seminar Proposal menyarankan perlu adanya perubahan dari judul tesis.
3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.
9. Surat Permohonan perubahan judul tesis dari saudara Deckie Aswandi tanggal 15 Juli 2021 yang berdasarkan dari usulan tim penguji seminar proposal tanggal 12 Maret 2021.
10. Mencabut SK Direktur NOMOR : 026/KPTS/PPS-UIR/2021 tertanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Dosen Pembimbing Penulisan Tesis Mahasiswa Magiater Ilmu Pemerintahan dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menunjuk :

No	Nama Dosen Pembimbing	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.	Lektor Kepala	Pembimbing I
2	Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Si.	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : DECKIE ASWANDI

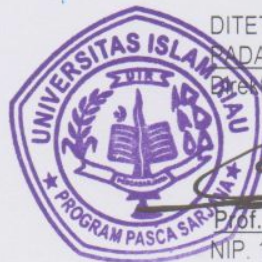
N P M : 197322039

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Judul Tesis : "DINAMIKA KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PEKANBARU"

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.



DITETAPKAN DI : PEKANBARU

PADA TANGGAL : 17 JULI 2021

Direktur,

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

NIP. 1954080819870110029

Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Yth. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru

2. Yth. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS UIR di Pekanbaru



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 095/A-UIR/5- PPs/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **DECKIE ASWANDI**
NPM : **197322039**
Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 07 Juni 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Pemerintahan

Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A.

Pekanbaru, 07 Juni 2021
Staf Pemeriksa

Indrian Syafitri, S.AP., M.Si.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip Syafitri_ind05

**DINAMIKA KEEBIJAKAN DALAM
PENANGANAN COVID-19 DI KOTA
PEKANBARU** by Deckie Aswandi

From Prodi. Ilmu Pemerintahan (TESIS
PASCASARJANA UIR)

Similarity Index	Similarity by Source
27%	Internet Sources: 27% Publications: 4% Student Papers: 9%

Processed on 07-Jun-2021 14:35 WIB

ID: 1601986445

Word Count: 20035

sources:

- 1 6% match (Internet from 09-Dec-2020)
http://eprints.ipdn.ac.id/14/12/isi-Memahami%20Ilmu%20Pemerintahan_compressed.pdf
- 2 2% match (Internet from 24-Oct-2020)
<https://ppc-19.pekanbaru.go.id/PERWAKO%20PSBB.pdf>
- 3 2% match (Internet from 27-May-2021)
<https://news.detik.com/bbc-world/d-5007112/melawan-pandemi-flu-spanyol-dengan-menyantap-bubur-hangat-hirup-udara-segar>
- 4 2% match (Internet from 07-Oct-2020)
<http://jurnal.unsyiah.ac.id/EKaPI/article/download/17370/12524>
- 5 1% match (Internet from 02-Oct-2020)
<https://core.ac.uk/download/pdf/89562218.pdf>
- 6 1% match (Internet from 31-Mar-2021)
<https://core.ac.uk/download/pdf/322502583.pdf>
- 7 1% match ()
INTAN HAKIKI, -. "PENYERAPAN ANGGARAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 71 TAHUN 2010 PADA BPKAD KOTA PEKANBARU", 2020
- 8 1% match ()
Margareta H, -. "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Peran Bank Sampah Bukit Hijau Berlian di Kecamatan Tampan)", 2019
- 9 1% match (Internet from 19-Oct-2020)
http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/210499044/4170E_Book_Sustainability_Bisnis_Pendekatan_MSDM_Islami_di_Masa_Pandemi_C19.pdf
- 10 1% match (Internet from 29-Nov-2020)
<http://politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1402-evaluasi-manajemen-krisis-negara-dalam-penanganan-pandemi-covid-19>
- 11 1% match (Internet from 14-Apr-2021)
<https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/download/249/181/>
- 12 1% match (Internet from 21-Feb-2020)
<https://pt.scribd.com/document/343803377/bab-iv>
- 13 1% match (Internet from 17-Oct-2020)
<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-52586349?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bdetik.com%5D-%5Blink%5D-%5Bindonesian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D>
- 14 1% match (Internet from 02-May-2021)
<https://www.beritasatu.com/nasional/627233/psbb-di-pekanbaru-akan-diperpanjang-dan-dipertegas>
- 15 1% match (Internet from 14-Nov-2017)
<http://repo.lain-tulungagung.ac.id/6426/6/BAB%203.pdf>
- 16 1% match (Internet from 24-Jul-2020)
<http://repository.uir.ac.id/1265/1/Zeki%20Syahroni%20Jon%20Putra%20-%201.pdf>
- 17 1% match (Internet from 10-Jul-2020)
<http://repository.unair.ac.id/53350/>
- 18 1% match (Internet from 07-Oct-2020)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini, untuk Kedua Orang Tua ku abah dan mamak dan untuk Istri tercinta dan tersayang Desva Ibriantika, SE., MM serta anak-anak yang tersayang Arkan Abraham Detik dan Saddam Abrizam Detik yang selalu bertanya papa lagi ngerjakan apa dan selalu memberikan support dan doa. Serta teman-teman yang selalu mensupport sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan sehingga saya dapat menyelesaikan Karya Ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Tesis yang sederhana ini ku persembahkan sebagai sedikit tanda bakti dan ucapan terima kasih ku kepada segenap Hamba Allah.

Ayahanda Aswandi dan Ibunda Jahara yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa dan mendukung, terima kasih untuk semua kasih sayang sehingga bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita. Semoga suatu saat dapat membalas semua pengorbanan dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan Kedua Orang Tua. Tanpa mereka, karya ini tidak akan tercipta.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : DECKIE ASWANDI
2. Tempat, Tanggal Lahir : Rengat, 19 Mei 1983
3. Jenis Kelamin : Laki - Laki
4. Agama : Islam
5. Nama Orang Tua :
Ayah : Aswandi
Ibu : Jahara
6. Pendidikan : SD Negeri 027 Rengat Lulus Tahun 1996
SLTP 005 Rengat Barat Lulus Tahun 1999
SMA Al-Falah Bandung Lulus Tahun 2002
S-1 Institut Teknologi Nasional Bandung Lulus Tahun 2008
7. Alamat : Jl. Merpati Putih Nomor 19 Kel. Tangkerang Labuai
Kecamatan Bukit Raya – Kota Pekanbaru
8. Email : deckie_aswandi@student.uir.ac.id
9. Riwayat Pekerjaan



No	Jabatan/Pekerjaan	Mulai dan Sampai
1.	Staff Pada Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Indragiri Hulu	2011-2013
2.	Staff Pada Bappeda Kota Pekanbaru	2013-2014
3.	Staff Pada Dinas Bina Marga dan SDA Kota Pekanbaru	2014-2017
4.	Kepala Sub Bagian Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru	2017-sekarang

PEKANBARU,

DECKIE ASWANDI, ST

DINAMIKA KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

DECKIE ASWANDI

Penelitian Virus Corona *serve acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-Cov-2)* dilakukan di kota Pekanbaru dari bulan April Tahun 2020 sampai dengan berakhirnya PSBB. Virus Covid-19 ini menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru berat hingga kematian. Infeksi Virus Corona atau yang disebut dengan istilah Covid-19 pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019, virus ini bisa menyerang siapa saja semua golongan usia dan sangat mudah menular dengan cepat ke hampir semua negara, termasuk Indonesia hanya selang beberapa bulan setelah Wuhan. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Pekanbaru harus di barengi dengan pelaksanaan yang lebih tegas, karena masih banyak warga mengabaikan protokol kesehatan. Selain itu pula dampak dari pemberlakuan PSBB juga berdampak pada perekonomian masyarakat sehingga menimbulkan pro dan kontra terhadap persoalan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT). Adapun metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai Teknik untuk pengumpulan data dan wawancara langsung kepada informan yakni ; Walikota Pekanbaru, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Kesehatan, Tim Ahli, Kepala BPBD, Kepala Dinas Sosial, Kepala BPKAD dan masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pendekatan melalui Teori Dinamika untuk melihat Kebijakan penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru berdasarkan 'Four Is' yakni : Ide, kepentingan, institusi dan individu yang diadopsi dari Geoffrey Dudley and Jeremy Richardson dibukunya *Why Does Policy Change* (2000). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan observasi serta wawancara, menemukan bahwa indikator yang paling dominan dalam Kebijakan Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru adalah : Aspek Ide, Aspek Kepentingan dan Aspek Individu. Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Kebijakan Penanganan Covid-19, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, Aspek Ide merupakan salah satu yang menjadi dasar dalam kebijakan penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru. Kebijakan Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru telah sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Pusat. Ada beberapa faktor penghambat pelaksanaan Kebijakan Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru yakni pada faktor masyarakat yang tidak tidak mengikuti protokol kesehatan seperti mengenakan masker dan menjaga jarak, melakukan perkumpulan, hingga tetap bepergian selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kata Kunci :Dinamika, Kebijakan, Covid-19

POLICY DYNAMICS IN HANDLING COVID-19 IN PEKANBARU CITY

ABSTRACT

DECKIE ASWANDI

Research on Corona serve acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-Cov-2) was conducted in Pekanbaru city from April 2020 until the end of PSBB. The Covid-19 virus causes mild disorders of the respiratory system, severe lung infections and even death. Corona Virus infection or what is know as Covid-19 was first discovered in Wuhan City, China at the end of Desember 2019, this virus can attack anyone of all age groups and is very easy to spread quickly to almost all countries, including Indonesia, only a few months after the outbreak. Wuhan, enforcement must be accaompanied by stricter implementation, because there are still many residents who ignore healt protocols. In addition, the impact of the PSBB implementation also has an impact on the community's economy, giving rise to pros and cons to the issue of distributing direct cash assistance (BLT). The research method uses qualitative research methods as a technique for data collection and direct interviews with informants, namely; The Mayor of Pekanbaru, The Regional Secretary of Pekanbaru City, The Head of civil Service Police Unit, The Head of Health Service, The Expert team, Head of the BPBD, Head of the Social Service, Head of BPKAD and the community. In this study, researchers approached through Dynamics Theory to see the Covid-19 handling policies in Pekanbaru City based on the Four Is, namely : Ideas, interests, institutions and individuals adopted from Geoffrey and Jeremy Richadson in their book why does policy change (2000). Based on the results of researchers conducted through descriptive qualitative approaches and observations and interviews, it was found that the most dominant indicators in the Covid-19 Handling Policy in Pekanbaru City were : Aspects of Ideas and Aspects of Interest and Individual Aspects. Pekanbaru City Government in its Covid-19 Handling Policy, based on the results of observations and interview, the Idea Aspect is one of the baics in the Covid-19 handling policy in Pekanbaru City. Policies in Handling Covid-19 in Pekanbaru City are in accordance with Central Government Policies. There are several factors that hinder the implementation of Policies in Handling Covid-19 in Pekanbaru City, namely the community factors who does no follow health protocols such as wearing masks and maintaining distance, holding gatherings, and continuing to travel during Large-Scale Social Restrictions (PSBB). Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in Pekanbaru City

Keywords : Dynamics, Policy, Covid-19

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan sehingga kami dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Dinamika Kebijakan Dalam Penanganan Covid-19 Di Kota Pekanbaru”**. Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterimakasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian tesis ini. Penulis ucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL, Direktur Pascasarjana Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H.,M.Hum, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza,S.IP.,M.A, Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Bapak Dr. Khairul Rahman,S.Sos.,M.Si, Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf,M.Si dan Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian,S.IP.,M.Si sebagai pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis selama ini dari awal hingga tesis ini dapat diselesaikan.

Kiranya penulis berharap tesis ini mudah-mudahan dapat memberikan sumbangsih bagi pendididkan yang selalu menghadapi tantangan seiring dengan tututan jaman.

Pekanbaru,

Penulis

DECKIE ASWANDI

DAFTAR ISI

Halaman

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KETERANGAN BEBAS PLAGIAT	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
LEMBAR TUNJUK AJAR	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Rumusan Masalah	12
1.4 Batasan Masalah	12
1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
1.5.1 Tujuan Penelitian	13
1.5.2 Kegunaan Penelitian	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
2.1 Kajian Pustaka	14
2.2 Ilmu Pemerintahan	14
2.3 Pemerintahan Daerah	24
2.4 Kebijakan Publik	30
2.5 Teori Dinamika	36
2.6 Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru dan Negara Singapura	42
2.6.1 Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru	42
2.6.2 Penanganan Covid-19 di Negara Singapura	43
2.7 Jurnal – jurnal yang Relevan dengan Penelitian ini	48
2.7.1 Jurnal Ega Kurnia dengan Judul Menakar Keberhasilan PSBB dalam penanganan Covid-19	48
2.7.2 Jurnal Zulfa Harirah dengan Judul Merespon Nalar kebijakan Negara dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia	50

2.8	Ulasan Karya	60
2.9	Kerangka Pemikiran.....	68
2.10	Konsep Operasional.....	69
2.11	Konsep Variabel	71
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		72
3.1.	Tipe Penelitian	72
3.2.	Lokasi Penelitian	73
3.3.	Informan.....	73
3.4.	Jenis dan Sumber Data.....	76
3.5.	Teknik Pengumpulan Data.....	77
3.6.	Instrumen Penelitian	77
3.7.	Uji Validasi Data	80
3.8.	Teknik Analisa Data	83
3.9.	Jadwal Kegiatan Penelitian.....	85
BAB IV HASIL PENELITIAN		87
4.1.	Identitas Responden	87
4.1.1	Deskripsi Informan Penelitian	89
4.2.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	95
4.2.1	Gambaran Umum Wilayah Kota Pekanbaru.....	95
4.2.2	Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Tampan.....	100
4.3.	Pembahasan	103
4.3.1	Dinamika Kebijakan Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru	10
3		
4.3.1.1	Aspek Ide	104
4.3.1.2	Aspek Kepentingan	110
4.3.1.3	Aspek Institusi	114
4.3.1.4	Aspek Individu	116
4.4.	Best Praticce	121
4.4.1	Penanganan Pandemi Flu Spayol Tahun 1918	121
4.4.2	Penanganan Covid-19 di Negara Singapura	124
BAB V PENUTUP		127
5.1	Kesimpulan	127
5.2	Saran	128
DAFTAR PUSTAKA		132

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Unsur Pemerintahan Daerah Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 ..	28
Tabel 2.2. Tahap Analisis Kebijakan	32
Tabel 2.3. Penelitian Terdahulu	60
Tabel 2.4 Operasional Variabel.....	71
Tabel 3.1 Data-data Informan	74
Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Penelitian	85
Tabel 4.1 Identitas Responden	88
Tabel 4.2 Kondisi Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Tahun 2019	98
Tabel 4.3 Wilayah Administratif Kota Pekanbaru Tahun 2019	99
Tabel 4.4 Status Pemerintahan, RT dan RW menurut Kelurahan di Kecamatan Tampan Tahun 2018	101
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk menurut Kelurahan dan jenis Kelamin di Kecamatan Tampan Tahun 2018	102

GRAFIK

Grafik 1.1 Tingkat Perkembangan Kasus di Nasional, Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru.....	7
--	---



GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikir Dinamika Kebijakan Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru..... 68



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Virus Corona *serve acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-Cov-2)* adalah virus yang menyerang sistem pernapasan, virus ini menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru paru berat hingga kematian, penyakit karena infeksi virus ini disebut juga Covid-19. Infeksi Virus Corona atau yang disebut dengan istilah Covid-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019, virus ini bisa menyerang siapa saja semua golongan usia dan sangat mudah menular dengan cepat kehampir semua negara, termasuk Indonesia hanya selang beberapa bulan setelah Wuhan.

Virus ini menular dengan cepat melalui percikan dahak dari saluran pernafasan baik secara kontak langsung dengan penderita Covid-19 maupun secara tidak langsung melalui barang yang telah terkontaminasi virus ini. Pandemi adalah epidemi penyakit yang menyebar diwilayah yang luas, di beberapa benua atau seluruh dunia melintasi batas internasional. Menurut WHO (*World Health Organization*) pandemi dinyatakan Ketika penyakit baru ditemukan dan menyebar diseluruh dunia dan penyakit tersebut berjangkit serempak di wilayah dunia, terus menular dan memiliki garis infeksi berkelanjutan.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak negara berada dalam situasi krisis yang luar biasa. Selain karena sifat pandemi yang tidak terduga, krisis ini juga

diakibatkan penyebarannya yang sangat cepat meluas melintasi batas-batas wilayah dan negara. Upaya yang dilakukan oleh negara dalam situasi krisis seperti itu adalah *pertama*, menerapkan undang-undang darurat (*martial law*) dalam berbagai tingkatan sesuai dengan kebutuhannya. *Kedua*, melakukan mitigasi dan kebijakan untuk mendorong upaya-upaya pencegahan. Status virus Corona (Covid-19) dinyatakan WHO menjadi pandemi karena telah menyebar ke seluruh belahan dunia dengan total kematian yang sangat drastis dalam hitungan bulan. Pandemi Covid-19 mendesak banyak negara untuk menerapkan manajemen krisis (*state crisis management*) untuk melakukan pencegahan penularan dan pengobatan sesuai dengan kebijakan masing masing negara.

Pada bulan Desember 2019, WHO China *Country Office* melaporkan kasus pertama *pneumonia corona virus* yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Pemerintah China secara cepat mengambil kebijakan menutup kota Wuhan dan mengkarantina 11 juta penduduknya untuk tidak keluar rumah, sosial *distancing*, menghentikan segala kegiatan diluar rumah termasuk bekerja dan pendidikan, memperketat mobilisasi massa dan membangun rumah sakit khusus penanganan corona virus. (Sumber : Kompas.com, 12 Maret 2020).

Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Pekanbaru harus dibarengi dengan pelaksanaan yang lebih tegas, karena masih banyak warga mengabaikan protokol kesehatan. Dalam pelaksanaan PSBB, masih banyak warga yang belum menyadari untuk menaati aturan, seperti penggunaan masker. Evaluasi kami, masih banyak masyarakat belum gunakan masker di luar rumah. (Sumber: Beritasatu.com, 30 April 2020).

Pemandangan warga mengabaikan protokol kesehatan masih mudah ditemukan di jalan, dan terutama di pasar-pasar tradisional. Di pasar masih terjadi jarak antarpengjual dan pembeli masih terlalu dekat, belum dilakukan physical distancing dan penggunaan masker belum dilakukan di pasar-pasar. Satu hal yang bisa diapresiasi dalam pelaksanaan PSBB adalah upaya dari aparat keamanan yang menghukum warga yang melanggar aturan dengan berkumpul pada malam hari. Karena masih banyak kelemahan dalam pelaksanaan PSBB, hal itu menjadi salah satu sebab PSBB yang sudah dilakukan sejak 17 April dan seharusnya berakhir pada 30 April ini belum terlihat efektif menekan angka penularan virus corona di Ibukota Provinsi Riau tersebut. Hal ini dilihat dari penambahan kasus belum ada secara signifikan penurunannya. Wali Kota Pekanbaru, menyatakan memperpanjang PSBB selama 14 hari ke depan guna memutus mata rantai wabah Covid-19. (Sumber: Beritasatu.com, 30 April 2020).

Selain masalah diatas tersebut, permasalahan setelah di berlakukannya PSBB juga menimbulkan pada persoalan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) hal ini menjadi sorotan dari kalangan mahasiswa terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Kini, giliran Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau (UNRI), melayangkan surat terbuka kepada Wali Kota Pekanbaru. Dalam surat tersebut, mereka menyoroti kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru terutama soal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah ditetapkan untuk kedua kalinya. Ketua BEM Unri menyebut, Pekanbaru telah memasuki masa PSBB yang kedua. Namun banyak hal yang seolah tidak transparan oleh pihak Pemerintah Kota kepada publik terutama mahasiswa terkait

kondisi dalam pelaksanaan PSBB. Ini layaknya sebuah proyek dari Pemerintah Kota Pekanbaru untuk keuntungan beberapa pihak. Contohnya saja dalam pemberian bantuan berupa sembako yang dinilai masih banyak yang semestinya berhak mendapatkan tetapi malah tidak mendapatkan haknya. (Sumber: riaueditor.com, 7 Mei 2020).

Bahkan beberapa aliansi RT/RW juga menolak bantuan sembako tersebut. Tentu saja menurutnya, ini menjadi tanda tanya besar bagi kita semua. Dalam hal ini, BEM Unri telah melakukan diskusi bersama ketua DPRD kota Pekanbaru dan menyampaikan surat terbuka untuk Wali Kota Pekanbaru untuk memberikan gerakan-gerakan yang tepat dan cepat terkait penanganan kondisi pandemi saat ini di kota Pekanbaru. (Sumber: riaueditor.com, 7 Mei 2020).

Selain permasalahan lemahnya pengawasan PSBB dan permasalahan bantuan langsung tunai (BLT), Pemerintah Kota Pekanbaru juga mengalami permasalahan terkait keterbatasan alokasi anggaran. Pemerintah Provinsi menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru belum ingin mengajukan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Alasannya masih terkait dengan anggaran yang terbatas. "Tadi kita melakukan rapat koordinasi *video conference* dengan 12 Pemkab dan Pemkot di Riau yang dipimpin Gubernur Riau, dari sini dapat kesimpulan sejumlah daerah belum siap melaksanakan PSBB," Rapat ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana persiapan kabupaten dan kota melaksanakan PSBB. Dari pertemuan ini, seluruhnya diketahui terkendala anggaran. "Persoalan paling mendasar keterbatasan anggaran APBD. Sehingga Pemprov Riau belum bisa melaksanakan PSBB," Pemerintah Kota Pekanbaru menyampaikan keluhan terkait

anggaran penanganan Covid-19. Dimana saat ini Pemerintah Kota Pekanbaru telah menganggarkan dana penanggulangan Covid-19 hanya sebesar Rp 110 miliar. Dana sebesar itu jika dilaksanakan PSBB hanya bisa untuk 20 hari.(Sumber : detik.com, 8 April 2020).

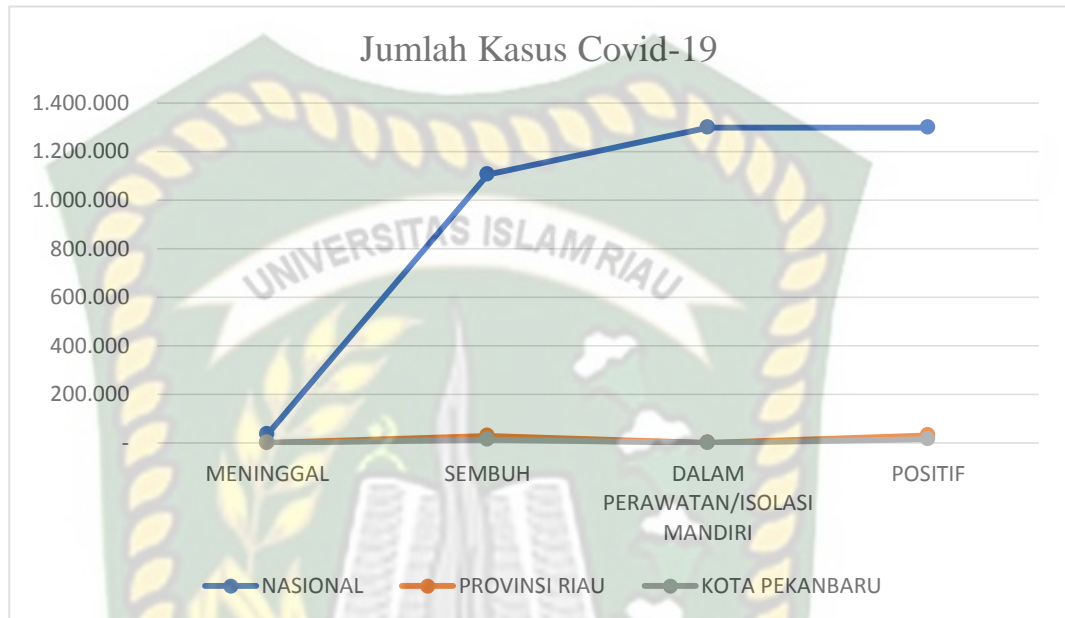
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru mendata ada 900 karyawan swasta di Pekanbaru dirumahkan. Mereka tidak bisa lagi bekerja karena kondisi perusahaan yang kesulitan keuangan menghadapi pandemi Covid-19. "Para karyawan yang dirumahkan itu diperkerjakan sebelumnya oleh perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa di Kota Pekanbaru, akibat daya beli lesu maka mereka menutup juga operasional usahanya. Pendataan ratusan karyawan yang dirumahkan itu terhitung pada Maret - Oktober 2020 dan dari yang didata jumlahnya mencapai 900 orang karyawan dari perusahaan swasta. Menurutnya perusahaan merumahkan pekerjanya karena tidak mampu lagi membayarkan gaji karyawan akibat biaya operasional yang dikeluarkan tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh akibat lesunya daya beli masyarakat. Masyarakat lebih memilih untuk diam di rumah, selain itu pendidikan juga dilakukan secara daring, pekerjaan banyak dilakukan di rumah telah mengakibatkan mempengaruhi transaksi jual beli yang juga berimbas pada perusahaan yang memproduksi jasa dan barang.(Sumber : Medcom.id, 14 Oktober 2020).

Di Indonesia, kasus positif Covid-19 pertama dideteksi pada tanggal 2 maret 2020, yaitu ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari warga negara jepang, dan sebulan setelahnya pada tanggal 9 April 2020 pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Tanggal 11 Februari 2021 Indonesia melaporkan 1.190.990

kasus positif dan menempati peringkat pertama terbanyak se Asia Tenggara dengan angka kematian sebanyak 32.381 jiwa. Covid-19 menimbulkan korban jiwa dan kerugian besar bahkan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Pada perkembangannya, hampir tidak ada satu negara pun yang benar-benar kebal dari Covid-19, termasuk Indonesia. Optimis bahwa virus tidak menyebar di Indonesia berubah drastis, ketika pemerintah mengumumkan lonjakan kasus positif yang semakin hari semakin naik drastis bahkan data statistik 11 februari 2021 Indonesia tercatat 1,19 juta kasus positif : sembuh 993 orang dan meninggal 32.381 orang. (Sumber : Gugus Tugas Covid-19 Republik Indonesia)

Sementara itu berdasarkan data yang diambil dari situs resmi satgas Covid-19 Pemerintah Pusat di Riau kasus pertama Covid 19 terdeteksi pada 18 maret 2020 dan dengan tingkat penyebaran tercepat yaitu mencapai 29.931 orang terinfeksi positif Covid-19 pada bulan Maret 2020. Pekanbaru mendeteksi kasus positif pertama pada tanggal 13 maret 2020 yaitu seorang warga yang baru pulang dari luar negeri mengikuti kegiatan keagamaan tabligh akbar, sejak saat itu penyebaran kasus meningkat tajam dan hingga 11 februari 2021 tercatat kasus positif Covid-19 di Kota Pekanbaru mencapai 14.051 orang dengan status isolasi 335 orang, rawat 200 orang, sembuh 13.205 dan meninggal 311 jiwa. (Sumber : Gugus Tugas Percepatan Covid-19 Kota Pekanbaru). Dapat peneliti sampaikan tingkat perkembangan kasus pada tabel grafik 1.1 sebagai berikut ini :

Grafik 1.1
Tingkat Perkembangan Kasus di Nasional, Provinsi Riau dan
Kota Pekanbaru



Sumber : Gugus Tugas Covid-19 Nasional, Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru Tanggal 23 Februari 2021

Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 membuat empat strategi secara konsisten dilakukan untuk menguatkan kebijakan *physical distancing* sebagai strategi dasar demi mengatasi Pandemi Virus Corona Covid-19, yaitu : strategi pertama sebagai penguatan strategi dasar itu adalah dengan gerakan masker untuk semua yang mengampanyekan kewajiban memakai masker saat berada di ruang publik atau di luar rumah. Strategi kedua, adalah penelusuran kontak (*tracing*) dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan *rapid test* atau tes cepat. Strategi ketiga adalah edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri pada sebagian hasil *tracing* yang menunjukkan hasil tes positif dari *rapid tes* atau negatif dengan gejala untuk melakukan isolasi

mandiri. Strategi keempat adalah isolasi rumah sakit yang dilakukan kala isolasi mandiri tidak mungkin dilakukan, seperti karena ada tanda klinis yang butuh layanan definitif di rumah sakit.

Dalam bidang ekonomi, pemerintah berusaha untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tahun 2020 tetap mencapai 5,3 persen. Kajian kementerian koordinator perekonomian menunjukkan kemungkinan pertumbuhan ekonomi bisa berkurang 0,1-0,3 persen dalam 6 bulan. Terobosan kebijakan tengah disiapkan untuk mengantisipasi dampak ekonomi atas penyebaran virus corona. Pertumbuhan ekonomi tetap dijaga sesuai target 5,3 persen pada 2020, berkaitan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi ini. Sektor pariwisata merupakan bidang yang terdampak secara langsung akibat wabah corona. Untuk itu, pemerintah menyiapkan insentif fiskal demi mendongkrak industri pariwisata yang lesu akibat wabah korona. Insentif ini diharapkan akan mendorong maskapai penerbangan, industri perhotelan, dan agen perjalanan untuk memberikan diskon tarif 30-40 persen selama tiga bulan.

Dengan berbagai pertimbangan, pemerintah pusat menetapkan peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Selain itu, Presiden juga menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Langkah ini diambil untuk memutus rantai penularan Covid-19 dengan perhatian utama pemerintah adalah kesehatan

masyarakat. ”Inti kebijakan pemerintah sangat jelas dan tegas, yaitu kesehatan masyarakat adalah yang utama.

Instrumen moneter dan fiskal pun pada akhirnya disahkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Keberadaan Perppu itu sendiri menuai kontroversi di kalangan masyarakat dan anggota DPR, terutama pasal 27 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa kebijakan bidang perpajakan, keuangan daerah, bagian pemulihan ekonomi nasional biaya penanganan pandemi Covid-19 dan penyelamatan perekonomian bukan merupakan kerugian negara. Sedangkan pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa pejabat yang melaksanakan Perppu tersebut tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana asalkan dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hingga kini, Perppu tersebut masih dalam proses *judicial review* meskipun telah disahkan menjadi Undang-undang pada tanggal 12 Mei 2020 oleh DPR-RI.

Berkesinambungan dengan hal tersebut dan menyikapi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk. 01.07/MENKES/250/2020 yang telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Pekanbaru Provinsi Riau.¹ Dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Pemerintah Kota Pekanbaru menerbitkan Peraturan Walikota

¹ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/250/2020

Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru.²

Meskipun PSBB telah diberlakukan, penerapan strategi manajemen krisis yang dilakukan pemerintah dalam penanganan Covid-19 fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih kurang efektif. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kontroversi yang terjadi baik antara pemangku kepentingan maupun publik dalam penerapan berbagai kebijakan.

Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya mengeluarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru dan dimana di dalam pasal 3 berbunyi yakni :³

1. Membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19);
2. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19);
3. Memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *Corona Virus Disease* (Covid-19); dan
4. Menangani dampak ekonomi, sosial dan keamanan dari penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid- 19).

Serta didalam Perwako tersebut di dalam pasal 22 mengenai Pemenuhan kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB berbunyi :

² Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru

³ Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020

1. Pemerintah Kota Pekanbaru dapat memberikan bantuan sosial kepada penduduk rentan miskin yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB.
2. Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun masih dijumpai permasalahan dalam penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru, meskipun demikian dalam perjalanannya masih terdapat beberapa peraturan pemerintah mengenai kebijakan pencegahan penularan Covid-19 diduga ditemukan beberapa kejanggalan seperti penyalahgunaan pemberian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, perbedaan biaya rapid dan swab test yang telah di subsidi hingga issue penetapan status pasien dpositifkan agar memperoleh bantuan Covid-19 dari pemerintah agar mendapat pembebasan biaya rawatan, diantaranya :

1. Masih sulit nya Satgas Covid-19 dalam membatasi pergerakan orang.
2. Banyaknya pekerja yang akan di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan matinya tempat-tempat usaha.

Berdasarkan fenomena tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menuangkannya pada tesis ini dan diberi judul : **“Dinamika Kebijakan Dalam Penanganan Covid-19 Di Kota Pekanbaru”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan uraian pada latar belakang yang dikemukakan di atas dapat diidentifikasi permasalahan yang ada sebagai berikut :

- a. Lemahnya pengawasan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
- b. Terbatasnya Alokasi Anggaran.
- c. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang belum tepat sasaran.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan pokok penelitian ini yaitu : Bagaimana Dinamika Kebijakan Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru?

1.4 Batasan Masalah

Mengingat banyaknya perkembangan dikemudian hari yang akan bisa ditemukan dalam permasalahan ini, maka perlu adanya batasan-batasan masalah yang jelas mengenai apa yang dibuat dan diselesaikan, maka dalam penelitian ini penulis membatasi masalah penelitian dengan meneliti sebagai berikut ini :

1. Pembatasan pada waktu yakni : dari bulan April Tahun 2020 – berakhirnya PSBB.
2. Pembatasan pada tempat yakni : pada Wilayah Kecamatan Tampan di karenakan wilayah tersebut salah satu yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Kota Pekanbaru.
3. Fokus penanganan pada pelaksanaan PSBB yakni : pada pembatasan kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dan penanganan dampak ekonomi, sosial dan kemananan.

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui Dinamika Kebijakan Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat Kebijakan Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru.

1.5.2. Kegunaan Penelitian

Secara umum kegunaan penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu kegunaan teoritis, akademis dan kegunaan empiris.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan bidang ilmu pemerintahan dan sebagai sumber referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan menambah sumber Pustaka yang telah ada.

2. Kegunaan Akademis

Bagi para akademisi penelitian ini sebagai sumber referensi guna menciptakan dan memperdalam kemampuan pemahaman mengenai dinamika kebijakan dalam penanganan Covid-19.

3. Kegunaan Empiris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi pada pihak-pihak pembuat kebijakan dalam penanganan Covid-19.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kajian Pustaka

Sesuai dengan permasalahan penelitian yang di tetapkan, maka perlu di uraikan beberapa batasan pengertian yang relevan sebagai dasar kerangka teoritis dan analisis dalam melakukan pembahasan lebih lanjut. Berdasarkan hal tersebut, maka yang akan dijelaskan sebagai dasar dalam pembahasan adalah sebagai berikut :

2.2 Ilmu Pemerintahan

Secara umum, kajian pemerintahan dalam perspektif keilmuan masih terbatas jika dilihat perkembangannya dewasa ini. Hal ini disebabkan posisi ilmu pemerintahan yang bersifat transisional dari kajian ilmu lain seperti politik dan hukum. Disebut *transisional* karena ilmu pemerintahan terkesan sulit mengidentifikasi dirinya secara tegas dari bayang-bayang ilmu tersebut.

Secara klasikal, pendekatan yang sering dilakukan melalui celah ilmu politik yang kemudian melahirkan pemahaman tentang praktik pemerintahan dari keseluruhan perangkat yang terbagi melalui cabang-cabang kekuasaan. Dari sini pemerintahan diartikan sebagai pelebagaan kekuasaan yang dioperasionalisasikan secara konkret dari jenjang paling puncak hingga entitas pemerintahan terendah. Dengan kata lain, pemerintahan hanyalah pernyataan konkret dari fenomena kekuasaan yang lebih luas, dimana kekuasaan dengan

segala atributnya dipelajari secara saksama dalam kacamata ilmu politik. Praktisnya pemerintahan dipelajari sebagai teknik mengelola kekuasaan dalam institusi yang dibentuk secara berjenjang. Akhirnya, transisi ilmu pemerintahan tampak seperti bergerak paksa menuju indentifikasi diri, lepas dari rahim kekuasaan yang karena itu terasa tetap berbau ilmu politik murni. Dari sudut lain misalnya ilmu hukum, tampak bahwa gejala pemerintahan hanyalah Tindakan mengelola kekuasaan secara formalistik. Kondisi ini membuat praktik pemerintahan dipandang sebagai suatu aktivitas positif dari jabatan-jabatan yang diemban termasuk kelembagaannya

dalam relasi antar pemerintahan, maupun antar pemerintah dengan rakyat dan/atau sebaliknya. Dalam praktinya gejala pemerintahan dipelajari misalnya lewat ilmu hukum tata negara, ilmu negara, dan ilmu hukum administrasi negara. Merujuk kedua perspektif ilmu tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan dipahami sebagai sebuah unsur dominan dari apa yang dikonstruksikan sebagai negara (*state*) selain tindakan *coersive* (hukum) sebagai alokasi kekuasaan yang bersifat istimewa untuk melakukan sedikit banyak paksaan.

Dalam konteks itu ilmu pemerintahan merekonstruksikan dirinya sebagai sebuah ilmu yang berasal dari manusia dan Kembali pada manusia dalam relasi antara yang memerintah dan yang diperintah. Spektrum ilmu pemerintahan tampak lebih luas dan abstraktif, tidak sekedar bermain pada ranah praktikum, teknikal dan empiric. Pemerintahan mengalami pemaknaan yang bersifat filsafati dan membuka diri pada ruang yang terbentang jauh di hadapan kita. Terlepas dari semua pergulatan ontologi dan epistemologi itu, harus diakui bahwa tak kurang

dari ribuan pengamat, praktisi hingga pembelajaran ilmu pemerintahan sulit menawarkan alternatif yang lebih komprehensif dalam merekonstruksikan ilmu pemerintahan sekaligus menjawab persoalan-persoalan pemerintahan khususnya di Indonesia pasca reformasi Tahun 1998.¹

Pada awalnya, pemerintah dibentuk untuk menghindari terjadinya kekacauan oleh kepentingan individu yang saling berhadapan dalam ruang dan waktu tertentu. Keadaan itu memaksa lahirnya seseorang dengan pengaruh yang ditimbulkannya untuk membentuk kelompok yang terkuat bagi upaya mendamaikan dan melindungi individu dan kelompok dari gangguan pihak lain. Dalam perkembangannya mereka memperoleh hak istimewa untuk melakukan apa saja dalam kerangka menjamin terpenuhinya perlindungan dan keselamatan.

Atas konsekuensi eksklusivisme tersebut, sebuah pemerintahan membutuhkan paling tidak tiga hal pokok menurut Strong, *pertama*, memiliki angkatan perang sebagai satu kekuatan militer yang mampu mempertahankan negaranya dari serangan dan invasi negara lain. *Kedua*, pemerintahan harus *memiliki suatu Lembaga yang bertanggung jawab secara legislatif dalam membuat hukum* bagi proses penyelenggaraan pemerintahan, dan *ketiga*, pemerintahan harus memiliki kemampuan keuangan yang memadai bagi upaya membiayai penyelenggaraan rumah tangga suatu negara.²

Konkretisasi dari praktik pemerintahan dipahami sebagai bagian dari tiga cabang kekuasaan sebagaimana dikembangkan *Montesquieu* lewat *Trias Politica*. Selain *legislatif* dan *yudikatif*, cabang eksekutif dianggap merupakan pengertian pemerintahan dalam arti sempit. Pengkhususan tersebut mengandung konsekuensi

¹ Muhadam Labolo.2017.Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya. Depok: PT. RajaGrafindo Persada. Hlm. 1-4

² Muhadam Labolo.2017.Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya. Depok: PT. RajaGrafindo Persada. Hlm. 27

atas pertanyaan selanjutnya tentang bagaimana proses pemerintahan dalam arti sempit tadi dapat bekerja secara efektif di tengah-tengah masyarakat. Persoalan ini tak kurang telah merangsang sekelompok sarjana di bidang administrasi negara untuk menguraikan bagaimana pemerintahan sebagai satu badan khusus bekerja melalui Lembaga-lembaga yang ada selaku pelaksana setiap keputusan politik.

Pendistribusian setiap kewenangan yang ada ke dalam struktur-struktur pemerintahan merupakan hal yang menarik dimana sebuah pemerintahan dapat dilihat berproses mencapai tujuan-tujuan awalnya. Studi pemerintahan yang menunjukkan cara kerja baik internal maupun eksternal bagaimana struktur dan proses pemerintahan secara umum berlangsung. Pandangan ini membuat institusi pemerintahan hanyalah seongkok institusi tanpa lahan atau keseluruhan lahan tadi merupakan cakupan dari pemerintahan itu sendiri.³

Jika banyak disiplin ilmu mencapai pendekatan post-behaviouralisme, tampaknya ilmu pemerintahan pun tak ketinggalan. Sejak pemikiran dasar *Van de Spigel* diperkenalkan dan selanjutnya dielaborasi oleh generasi berikutnya, *Van Poelje*, ilmu pemerintahan tampaknya memasuki babak baru. Secara praktis Poelje mendefinisikan bagaimana sebaiknya pemerintahan itu melakukan penyusunan Lembaga-lembaganya (dalam bentuk dinas-dinas) serta bagaimana kepemimpinan di dalamnya dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pandangan ini memberi indikasi tentang penyiapan suprastruktur untuk menyelesaikan masalah yang beragam sehingga membutuhkan instrumen yang secara spesifik diperlukan guna menjawab berbagai masalah pemerintahan.⁴

³ C.F. Strong dalam Sidgwick & Jackson Ltd, *Modern Political Constitution* (Londong,1990), hlm 6. Kutipan Muhadam Labolo.2017.Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya. Depok: PT. RajaGrafindo Persada. Hlm. 28

⁴ Muhadam Labolo.2017.Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya. Depok: PT. RajaGrafindo Persada. Hlm. 32-33

pada derajat selanjutnya untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan itu sendiri diperlukan rotasi pada tingkat elite berjalan secara damai. Pandangan poelje menyadari kita bahwa ilmu pemerintahan tidak saja berfokus pada bagaimana menyelesaikan persoalan di tingkat masyarakat secara teknis, tetapi juga berbicara tentang pentingnya kepemimpinan dengan segala bentuk dan konsekuensinya. Jika disimpulkan secara sederhana, pandangan poelje sesungguhnya berbicara tentang dua intisari utama, yaitu upaya pemecahan masalah yang diperintah dan upaya menyelesaikan masalah yang memerintah. Masalah yang diperintah dipecahkan dengan membentuk dinas-dinas secara terspesialisasi (*openbaare-dienst*), sedangkan masalah yang memerintah dilakukan dengan rotasi kepemimpinan yang baik. Fenomena tersebut menjadi sandaran yang kuat dimana antara gejala pemerintahan dan politik menjadi sesuatu yang sulit untuk dielakkan. Bagaimanapun poelje telah menanamkan pengertian ilmu pemerintahan yang paling mungkin untuk digarisbawahi, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memimpin hidup Bersama manusia ke arah kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah.

Proses dimana pemerintahan seharusnya bekerja menurut fungsi-fungsinya banyak dirumuskan oleh sarjana pemerintahan seperti *Rosenbloom* maupun *Michael Goldsmith* yang menegaskan lewat fungsi negara.⁵ Sedangkan dari aspek manajemen pemerintahan terkait dengan fungsi-fungsi memimpin, memberi petunjuk, memerintah, menggerakkan, koordinasi, pengawasan dan motivasi

⁵ Dalam Hamdi, *Bunga Rampai Pemerintahan*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2002) Kutipan Muhadam Labolo.2017.Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya. Depok: PT. RajaGrafindo Persada. Hlm. 33

⁶ Syaukani dkk, *Otonomi Dalam Negara Kesatuan RI*, 2002. Kutipan Muhadam Labolo.2017.Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya. Depok: PT. RajaGrafindo Persada. Hlm. 34

dalam hubungan pemerintahan. Hal ini digambarkan oleh Karl W. Deutsch bahwa penyelenggaraan pemerintahan itu ibarat membawa di tengah samudera.⁶

Jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, maka dengan sendirinya diasumsikan pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan melahirkan kemandirian serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Terkait dengan pelayanan, Ndraha lebih menitikberatkan pada aspek pelayanan sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan itu dikelompokkan menjadi layanan sipil dan jasa publik. Layanan sipil bersifat pelayanan yang mesti dilakukan terhadap orang-perorangan, pribadi atau *privat*, sedangkan jasa publik bersifat kolektif sehingga mengandung nilai istimewa. Fungsi ini kemudian melahirkan definisi penting tentang pemerintahan sebagai suatu ilmu, dimana ilmu pemerintahan mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan sehingga diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Dalam pengertian sederhana pemerintahan merupakan upaya mengelola kehidupan Bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati bersama. Untuk mencapai tujuan tadi, pemerintah membutuhkan instrument berupa organisasi yang berfungsi merealisasikan semua consensus dimaksud. Dalam kaitan itu pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional maupun tugas dan kewenangannya. Kegiatan pemerintahan berkaitan dengan segala aktivitas yang terorganisasi,

bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan negara, serta demi tujuan negara.

Struktur fungsional menyangkut pemerintahan sebagai seperangkat fungsi negara yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar tertentu demi tujuan negara. Sementara tugas dan kewenangannya berhubungan dengan keseluruhan tugas dan kewenangan negara yang dilakukan secara konkret oleh pemerintah.

Untuk melihat perkembangan fungsi pemerintahan kiranya dapat dilihat melalui pandangan lain, dimana pemerintah adalah segenap alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Dengan demikian, apa pun yang dilakukan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan tugas negara sehingga pemerintah acapkali disebut representasi paling konkret dari negara. Pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang pada tingkat tertentu berfungsi menjaga dan menjamin sistem ketertiban dan penyediaan sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi kepentingan aktivitas sosialnya. Bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Berhubungan dengan pelayanan, pemerintah modern pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan Bersama.⁷

⁷ Muhadam Labolo.2017.Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 35-37

Pemerintah memiliki 2 (dua) fungsi dasar, yaitu :

1. Fungsi Primer atau fungsi pelayanan.

Fungsi pemerintah sebagai *provider* jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil dan layanan birokrasi.

2. Fungsi Sekunder atau fungsi pemberdayaan.

Sebagai *provider* kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Fungsi primer secara terus-menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya masyarakat semakin meningkat pula fungsi primer pemerintah. Sebaliknya, fungsi sekunder berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan yang diperintah. Maknanya semakin berdaya masyarakat semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah dari *rowing* (pengaturan) ke *steering* (pengendalian).⁸

Fungsi sekunder secara perlahan-lahan dapat diserahkan pada masyarakat untuk dipenuhi sendiri. Pemerintah berkewajiban secara terus-menerus berupaya memberdayakan masyarakat agar meningkatkan keberdayaan sehingga pada gilirannya masyarakat memiliki kemampuan untuk melayani dirinya sendiri atau memenuhi kebutuhannya secara mandiri terlepas dari campur tangan pemerintah.

Fungsi-fungsi pemerintahan secara umum berkenaan dengan fungsi :

1. Pengaturan;
2. Pelayanan;
3. Pemberdayaan dan;

4. Pembangunan.

⁸ Muhadam Labolo.2017.Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya. Depok: PT. RajaGrafindo Persada. Hlm. 38

Pelaksanaan fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, termasuk terciptanya tatanan sosial yang baik di berbagai kehidupan masyarakat. Fungsi pelayanan pada akhirnya diharapkan dapat membuahkan keadilan dalam masyarakat. Pemberdayaan diharapkan mampu mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Oleh karena itu, seiring dengan pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, sekaligus keterbatasan yang dimilikinya, maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri mencukupi kebutuhannya.

Dalam dinamika pemerintahan, elemen penting yang paling mampu menunjukkan superioritas di antara yang lain cenderung melakukan hegemoni untuk menguasai pemerintahan. Kecenderungan awal penguasaan masyarakat dimulai dari satu atau lebih kelompok minoritas yang kuat serta memiliki lebih banyak sumber daya. Salah satu penguasaan sumber daya adalah keberadaan pemimpin yang tangguh untuk melakukan mobilisasi bagi tegaknya pemerintahan baru. Mengingat betapa pentingnya keberadaan pemimpin untuk mengelola kolektivitas yang memuat kebutuhan Bersama bagi tujuan yang diinginkan, maka disengaja atau tidak situasi *primus inter pares* sulit terhindarkan dalam

masyarakat mana pun. Kiranya hal tersebut cukup menjadi salah satu alasan lahirnya pemimpin di antara yang lain. Pola-pola interaksi di antara mereka harus diintergrasikan dan diarahkan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi tabrakan kepentingan, dimana antara satu dengan yang lain saling melengkapi atau saling melayani guna memenuhi kebutuhannya dan menghindari keterbatasan yang dialami. Dalam konteks ini pemimpin menjadi sangat berarti bagi pusat pergerakan interaksi masyarakat.⁹

Gejala pemerintahan muncul ketika keadaan sulit terkendali. Dalam istilah menggambarkan tentang keadaan masyarakat yang berada dalam situasi serba tak teratur. Sama seperti yang dipikirkan oleh Hobbes sebelumnya tentang kondisi masyarakat yang berada dalam suasana saling menyerang. Dalam keadaan demikian setiap individu berharap akan datangnya seseorang yang dengan kekuataannya mampu mengendalikan keadaan menjadi lebih baik. Dengan alasan apapun setiap individu akan menyerahkan segenap kehidupannya untuk diintervensi, sepanjang tujuan dari kelompok itu sendiri adalah untuk menyelamatkan kepentingan mereka pada momen demikian pemerintahan dapat terbentuk untuk mengendalikan situasi menjadi lebih stabil. Situasi demikian memaksa pemerintah untuk menggunakan sifat jahatnya dalam meminimalisasi kepentingan kelompok lain yang dianggap menjadi sumber kejahatan utama.¹⁰

Pada hakikatnya pemerintah memiliki dualitas sifat, yaitu sifat kemuliaan sekaligus sifat merusak. Masalahnya adalah kapan kedua sifat tadi dapat digunakan secara sah, sebab tidaklah tepat jika pemerintah menampilkan kemuliaan pada sekelompok penjahat dan di lain pihak bersikap kasar pada seorang

⁹ Muband, Laila. 2017. *Model dan Implementasi Sistem Kajian Teori Keperawatan*. Pekanbaru: Alfabeta.

pahlawan. Kemuliaan sebagai sifat baik pemerintah digunakan Ketika pemerintah berusaha melindungi dan memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya. Sementara daya jahat pemerintah seringkali harus digunakan Ketika berhadapan dengan sekelompok orang yang berusaha mengganggu tujuan bersama melalui sifat kemuliaan tadi. Salah satu jalan adalah melakukan pengawasan untuk meringkai Tindakan pemerintah pada tujuan yang sesungguhnya. Hal ini dicapai setelah memperluas partisipasi publik dalam Lembaga-lembaga pemerintahan.

2.3 Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah memiliki seorang Kepala Daerah yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah untuk Provinsi disebut Gubernur, Kepala Daerah untuk Kabupaten disebut dengan Bupati, dan Kepala Daerah untuk Kota disebut Walikota. Masa Jabatan Kepala daerah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- 2) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

- 3) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- 5) Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan;
- 7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Berdasarkan dari pemahaman di atas, maka dapat diberi restriksi sebagai berikut :

1. Kalau pemerintah hanyalah eksekutif yang menjalankan pemerintahan dalam arti sempit, sedangkan pemerintahan meliputi seluruh unsur atau fungsi penyelenggara Negara baik eksekutif, legislative maupun yudikatif.
2. Kalau pemerintah menunjuk ke suatu badan pemerintahan, sedangkan pemerintahan merupakan proses atau cara dalam memerintah.

Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan :

1. Desentralisasi.

Desentralisasi atau biasa juga disebut desentralisasi politik yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan

¹¹ Amelia Haryanti. 2019. Sistem Pemerintahan Daerah. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS. Hlm. 37-38

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam desentralisasi politik semacam ini, rakyat dengan menggunakan dan memanfaatkan saluran-saluran tertentu (perwakilan) ikut serta dalam pemerintahan, dengan batas wilayah daerah masing-masing.

2. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Persoalannya adalah bagaimana pemerintah daerah mampu menerima semua kewenangan yang diserahkan untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.¹²

Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, unsur pemerintahan daerah merupakan salah satu bagian dari unsur pemerintahan daerah. Selanjutnya unsur pemerintah daerah juga terdiri dari 2 (dua) unsur yakni :

1. Unsur Kepala Daerah.

Kepala Daerah merupakan unsur yang mengepalai suatu daerah otonom dan juga memimpin pelaksanaan pemerintah daerah dan sekaligus juga sebagai penanggungjawab terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepala Daerah di Indonesia terdiri dari Gubernur sebagai kepala daerah provinsi, Bupati sebagai kepala daerah kabupaten, dan Walikota

sebagai kepala daerah kota. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, kepala daerah memiliki tugas, fungsi, kewenangan

dan kewajiban yang telah di atur dalam Peraturan perundang-undangan. Tugas, fungsi, kewenangan dan kewajiban seorang kepala daerah senantiasa berubah-ubah antara satu UU dengan UU lainnya tentang pemerintahan daerah, dan sangat tergantung pada dinamika masyarakat daerah dan tuntutan dari dinamika pemerintahan daerah itu sendiri.

2. Unsur Perangkat Daerah.

Unsur Perangkat Daerah merupakan pegawai daerah, yang digaji melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersangkutan. Unsur Perangkat Daerah diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Daerah, serta dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepala Kepala daerah melalui sistem dan prosedur yang diatur Peraturan Perundang-undangan maupun Peraturan Daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, maka perangkat daerah memiliki tugas, fungsi, kewenangan dan kewajiban yang diatur peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah. Secara umum Tugas, fungsi, kewenangan dan kewajiban perangkat daerah senantiasa mengalami perubahan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang menagturnya, dan senantiasa mengikuti perkembangan dinamika masyarakat daerah dan tuntutan dinamika pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.¹³

¹³ Rahyunir Rauf.2018.Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pekanbaru: Zanafa Publishing. Hlm. 35-37

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa secara umum tentang unsur dari pemerintahan daerah yang dapat dilihat ringkasannya pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1

Unsur Pemerintahan Daerah Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014

No	Indikator	Unsur
1.	Unsur Pemerintahan Daerah	1. Pemerintah Daerah 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2.	Unsur Pemerintah Daerah	1. Kepala Daerah 2. Perangkat Daerah
3.	Unsur Perangkat Daerah Kab/Kota	1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD 3. Dinas Daerah 4. Badan Daerah 5. Sebutan lainnya seperti :Inspektorat 6. Satuan Polisi Pamong Praja

		7. Kecamatan (sedangkan kelurahan menjadi perangkat kecamatan)
--	--	--

Sumber : Rahyunir Rauf (2016)

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, dapat dinyatakan dengan jelas bahwa dalam system pemerintahan daerah di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat adanya 2 (dua) unsur yang dalam hal ini adalah unsur pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), serta unsur perangkat daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini, terdapat adanya perubahan kedudukan terhadap institusi Kelurahan, yang sebelumnya merupakan bagian dari unsur perangkat daerah, akan tetapi pada saat Undang-undang yang baru ini kedudukan kelurahan mengalami perubahan yang cukup mendasar, dalam hal ini kelurahan menjadi bagian dari perangkat kecamatan, sehingga secara tidak langsung maka kelurahan kedudukannya berada dibawah institusi kecamatan dan Lurah sebagai kepala kelurahan tentunya juga menjadi bawahan langsung Camat sebagai kepala kecamatan, serta konsekuensinya yang selama ini Lurah bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota, maka pada UU ini Lurah bertanggungjawab langsung kepada Camat.¹⁴

Sehubungan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah bahwa :
 “Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas asas desentralisasi, asas dekonstrasi dan asas tugas pembantuan”.¹⁵

¹⁴ Rahyunir Rauf.2018.Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pekanbaru: Zanafa Publishing. Hlm. 51-53

¹⁵ Sadu Wasistio dan Yonatan Wiyoso.2009.Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). Bandung: Fokusmedia. Hlm.

Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah asas dekonstrasi, bahwa : “Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam hubungannya denga tugas pemerintahan, pemerintah pusat dapat menyerahkan urusan-urusan kepada daerah secara dekonstrasi, yaitu urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan ini tetap menjadi tanggungjawab pemerintah pusat”.

Latar belakang diadakannya system dekonstrasi ialah tidak semua urusan pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah menurut asas desentralisasi. Pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonstrasi ini diantaranya adalah :

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum.
2. Terpeliharanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam system administrasi negara.
3. Terpeliharanya keserasian pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶

2.4 Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam definisi yang mashur dari Dye adalah *whatever governments choose to dor or not to do*. Maknanya Dye hendak menyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah baik eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan. Jika anda melihat banyak jalan berlubang, jembatan rusak atau sekolah rubuh kemudian anda mengira bahwa pemerintah tidak berbuat apa-apa, maka drannya pemerintah itu menurut Dye adalah kebijakan. Interpretasi dari kebijakan yang Reskin, 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Dikembangkan Nomor 32 tahun 2004 dengan Perubahan-perubahannya. Bandung: Pustaka Setia. Hlm.88 menurut Dye di atas harus dimaknai dengan dua hal penting yakni :

1. Bahwa kebijakan haruslah dilakukan oleh badan pemerintah.
2. Kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Kebijakan publik dalam kerangka subtantif adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi. Dengan membawa kebijakan publik dalam ranah upaya memecahkan masalah publik maka warna administrasi publik akan lebih terasa kental. Kebijakan publik diarahkan untuk memecahkan masalah publik untuk memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan publik. Kebijakan publik sejauh mungkin diupayakan berada dalam rel kebijakan yang beraras pada sebesar-besar kepentingan publik. Kebijakan publik memang masuk dalam ranah kepentingan dengan banyak aktor yang berkepentingan di dalamnya. Nilai-nilai rasional yang dikembangkan dalam analisis kebijakan publik sejauh mungkin didekatkan kepada kepentingan publik. Sampai titik ini memang diperlukan komitmen aktor politik untuk memperjuangkan nilai-nilai kepentingan publik.¹⁷

Kebijakan publik memiliki dimensi yang sangat luas dari mulai identifikasi masalah publik, desain program atau kebijakan, implementasi, monitoring hingga evaluasi kebijakan. Untuk lebih mudah dipahami dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut : ¹⁸

¹⁷ Dwiyanto Indiahono.2017.Kebijakan Publik Berbasis *Dyanamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media. Hlm. 17-19

¹⁸ Subarsono, AG.2005.Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 10

Tabel 2.2
Tahap Analisis Kebijakan

Tahap	Karakteristik
Perumusan Masalah	Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah
<i>Forecasting</i> (Peramalan)	Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk apabila membuat kebijakan
Rekomendasi Kebijakan	Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi
Monitoring Kebijakan	Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya
Evaluasi Kebijakan	Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan

Model implementasi kebijakan publik ada empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi yakni sebagai berikut :

- a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.
- b. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumberdaya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan, sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang

memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

- c. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam *guideline* program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan *resistensi* dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.
- d. Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standar operating procedur* (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline* program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor.

Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, Panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara tepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “virus Weberian” yang kaku, terlalu hirarkis dan birokratis.¹⁹

Kebijakan publik merupakan ranah tempat bergantung banyak pihak untuk penyelesaian masalah publik secara rasional dan dapat diterima oleh berbagai kelompok kepentingan yang terlibat. Kebijakan publik juga harus dikembangkan sebagai alat untuk mengedepankan perubahan di sektor publik, sehingga pergerakan reformasi di sektor publik dapat bergerak lebih cepat dari yang diusahakan oleh kebijakan publik sebelumnya.

Kebijakan publik dengan demikian harus menghindari pola pikir *ortodoks* untuk menyelesaikan masalah publik yang kian kompleks dan rumit. Pola pikir yang terlalu menyederhanakan masalah publik dengan memberikan kebijakan publik yang tambal sulam harus sudah mulai ditinggalkan. Pemerintah dan analis kebijakan di masa yang akan datang harusnya sudah mulai berfikir mengenai perubahan yang lebih bermakna. Untuk itu pemerintah dan analis kebijakan harus mulai berani :

- a. Berfikir dan menganalisis ulang mengenai desain-desain kebijakan publik yang telah ada,

- b. Berfikir dan menganalisis desain-desain program dan kebijakan yang berhasil dilaksanakan di berbagai daerah di tanah air maupun di luar negeri,
- c. Berfikir diluar batas-batas peraturan baku yang sewaktu-waktu dapat dirubah,
- d. Berfikir kreatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan kebijakan secara cepat dan tepat,
- e. Selalu berfikir menciptakan kebijakan yang unggul dan mampu menciptakan birokrasi yang unggul pula.²⁰

²⁰ Dwiyanto, Indiahono. 2017. Kebijakan Publik Berbasis *Dyanamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media. Hlm. 55-56

Dinamika menggambarkan atau memotret kondisi empiris apa adanya. Dinamika kebijakan dengan menggunakan Teori 'Four Is' dan Pentingnya Waktu, yakni adalah sebagai berikut :

1. *Ideas and Individuals as Independent Variabel*. Gagasa dan individu sebagai *variabel independent*;
2. *Ideas and Interests : Disentangling Causality*. Gagasan dan kepentingan : menguraikan kausalitas;
3. *Institutions and Ideas : Arenas as instrument of change*. Lembaga dan gagasan: arena sebagai instrumen perubahan;
4. *Idividuals : Mobility Matters*. Pergerakan individu.

Geoffrey Dudley dan *Jeremy Richardson* menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara jalan raya dan kereta api, di mana sementara

kebijakan jalan didominasi oleh komunitas kebijakan hegemonik yang menganggap pembangunan jalan sebagai ‘solusi kebijakan yang ideal, kebijakan kereta api di sisi lain telah ditandai dengan inti berongga’. Dalam kasus jalan raya ini mengungkap pembuatan kebijakan yang hegemonik, namun kemudian serangkaian tantangan dramatis terhadap paradigma dominan oleh para pencinta lingkungan yang pada akhirnya mengakibatkan rusaknya ‘solusi’ jalan. Dalam kasus rel, ‘inti berlubang’ terutama diserbu ketika ketua British Rail, Dr. Beeching, memasukkan konsep ‘kereta api komersil’. Namun belakangan ini, gagasan privatisasi telah memaksakan dirinya sebagai salah satu kandidat yang paling tidak mungkin.

Karena itu, tantangan utama kontemporer adalah memberikan beberapa jawaban efektif untuk pertanyaan : Mengapa Kebijakan Berubah? Jika model komunitas dan jaringan kebijakan tampak lebih efisien dalam menggambarkan stabilitas dan perubahan kebijakan bertahap, maka tampaknya menjadi proposisi logis untuk memusatkan perhatian terutama pada penentuan dinamika perubahan kebijakan radikal.

Namun, ada satu elemen kunci lebih lanjut dalam menentukan dinamika perubahan kebijakan ‘urutan ketiga’- yaitu waktu. Terlepas dari pengaruh yang meluas, waktu sering diabaikan sebagai variable vital, namun dalam studi longitudinal pentingnya menjadi jelas. Dalam mengembangkan kerangka kerja advokasi (ACF), Sabatier menekankan bahwa memahami proses perubahan kebijakan—dan peran pembelajaran yang berorientasi kebijakan di dalamnya membutuhkan perspektif waktu satu dekade. Begitu waktu terserap ke dalam

persamaan perubahan kebijakan, maka itu pun menjadi variabel yang harus diperhitungkan.

Elemen kunci dalam analisis kami di sini adalah cara di mana ide dapat bermutasi, dan dengan demikian ditransplantasikan di sektor tertentu. Sebagaimana diamati oleh John, proses evolusi berbeda dengan mekanisme seleksi klasik Darwinian di mana para aktor manusia mampu secara sadar beradaptasi dengan lingkungan mereka. Oleh karena itu, mutasi ide kebijakan mungkin melibatkan tidak hanya elemen kebetulan yang ditekankan oleh model aliran kebijakan, tetapi juga pilihan yang lebih disengaja yang disiratkan oleh ACF. Dalam dinamika perubahan kebijakan 'urutan ketiga', studi kasus kami menunjukkan bahwa setiap Menteri tampaknya menjadi agen yang sangat berpengaruh dalam proses ini. Implikasi dari perspektif khusus ini untuk studi jaringan kebijakan adalah bahwa para Menteri mungkin memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang proses kebijakan dari aktor lain. Mereka tidak hanya memiliki kekuatan yang lebih formal dari pada aktor jaringan lainnya-mereka mungkin sering memiliki kumpulan nilai yang berbeda dan hampir selalu memiliki skala waktu yang berbeda. Akibatnya, pepatah lama 'di mana Anda berdiri tergantung di mana Anda duduk' dapat diadaptasi menjadi, 'di mana Anda berdiri tergantung pada apa yang Anda lihat dari tempat Anda duduk'. Jika visi pejabat mungkin terbatas pada kepentingan produsen utama dalam subsistem kebijakan, seorang Menteri mungkin mengetahui berbagai pelaku yang beroperasi di sektor kebijakan yang berbeda dan arena pembuatan kebijakan yang berbeda. Oleh karena itu, para menteri sering kali sangat menyadari orang-orang yang tidak

berpartisipasi secara langsung-khususnya anggota partai, aktivis partai, dan, terutama, para pemilih.

Mengisi 'kursi kosong' opini publik bisa menjadi elemen penting dalam proses perubahan kebijakan 'urutan ketiga'. Akibatnya dapat dikatakan bahwa Menteri Transportasi mungkin 'melihat' jutaan pengendara yang tidak puas dengan lambatnya kemajuan dalam membangun jalan baru; atau ribuan penumpang kereta api yang marah kesal karena kereta mereka selalu terlambat dan penuh sesak; atau kelompok lokal yang memprotes rencana untuk membangun jalan utama melalui lingkungan mereka. Tidak satu pun dari kepentingan ini yang dapat terlibat langsung sebagai klien tetap Kementerian, tetapi para Menteri kemungkinan besar akan mempertimbangkan konsekuensi pemilu dari pengucilan sebagian besar penduduk yang berpotensi signifikan.

Namun para Menteri bukanlah lembaran kertas yang telah diprogram sebelumnya atau kosong, tetapi, seperti kita semua, memiliki seperangkat lensa konseptual yang unik, dengan kepribadian yang serasi. Dengan demikian, para menteri berada dalam situasi pilihan ketika berhadapan dengan komunitas dan jaringan kebijakan nasional. Dalam istilah kami, mereka dapat memilih untuk menjadi 'promiscuous' dengan berbagai aktor kebijakan lain, atau dapat menjadi 'selibat', membuat keputusan kebijakan yang kesepian atau terinternalisasi, sesuai dengan keyakinan dan prinsip mereka sendiri, atau dalam menanggapi tekanan eksternal lainnya, yaitu mereka adalah pelaku kebijakan yang mobile dan bukan statis. Dalam waktu yang relatif singkat, mereka dapat berperan sebagai pemimpin dan pembentuk koalisi advokasi, pelaku kebijakan, atau perantara kebijakan.

Mobilitas yang melekat ini menempatkan Menteri pada posisi untuk memperkenalkan inovasi kebijakan dan menghasilkan perubahan dalam komposisi jaringan kebijakan itu sendiri.

Kebijakan publik tidak dapat dipahami hanya dalam istilah konsep seperti kekuasaan, pengaruh, tekanan kepentingan, dan keputusan. Ide dan argumen, jauh dari sekadar rasionalisasi atau hiasan retorik, merupakan bagian integral dari pembuatan kebijakan. Namun demikian, seperti yang ditunjukkan Radaelli, setelah diterima oleh pembuat kebijakan, 'paradigma ekonomi mengalami proses pelembagaan'. Dengan demikian, institusi memberikan stabilitas pada kepercayaan kausal bersama, mengatur struktur makna, menciptakan jaringan aktor, dan membatasi persepsi kepentingan dan perubahan sosial ekonomi. Penetrasi ide-ide ini, dan pelembagaan selanjutnya dan yang dicoba, yang menjadi perhatian utama.²¹

Model tempat sampah memberikan wawasan penting tentang dinamika terpisah dari elemen proses kebijakan seperti masalah, solusi, peserta, dan peluang pilihan. Kingdon menggunakan model ini untuk lebih menekankan pada 'terorganisir' daripada 'anarki', dan untuk menemukan struktur dan pola dalam proses, yaitu Kingdon juga menekankan diskontinuitas antar elemen, tetapi kemudian berusaha untuk menjelaskan bagaimana 'aliran kebijakan' yang sebagian besar independen ini dapat digabungkan untuk menggambarkan fenomena 'sebuah gagasan yang waktunya telah tiba'. Kingdon mendefinisikan tiga aliran kebijakan yang mengalir melalui system-yaitu *masalah, kebijakan dan politik*. Meskipun aliran-aliran ini terpisah dan memiliki dinamikanya sendiri, pada beberapa titik

kritis aliran-aliran ini bergabung, dan perubahan kebijakan terbesar tumbuh dari penggabungan itu. Dengan demikian, ide-ide melayang di sekitar 'sup primitif kebijakan', di mana yang terkuat muncul ke permukaan melalui proses seleksi alam.

Namun, pada waktu kritis tertentu, aliran kebijakan datang bersamaan. Penggabungan ini kemungkinan besar terjadi ketika jendela kebijakan-peluang untuk mendorong proposal atau konsepsi masalah-terbuka. Jendela-jendela ini terbuka baik oleh munculnya masalah yang memaksa atau oleh kejadian-kejadian dalam aliran politik.²²

Penyebaran Pandemi Covid-19 secara global dengan cepat telah melampaui epidemi lain baru-baru ini baik dalam ukuran maupun cakupannya. Selain korban manusia yang mematikan dan gangguan pada jutaan nyawa manusia, krisis ekonomi global yang signifikan. Dalam menghadapi tantangan dan serangkaian risiko yang masih belum pasti, para pemimpin bisnis khawatir tentang bagaimana perusahaan mereka akan terpengaruh dan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Di tengah masa krisis ini, ada sejumlah pelajaran dari sejarah yang bisa diterapkan sekarang.

Pada masa Rasulullah SAW, pernah juga terjadi krisis akibat dari pandemi kusta. Sama halnya dengan Pandemi Covid-19, pandemi ini pada masa Rasulullah merupakan penyakit menular yang mematikan dan belum ditemukan obatnya. Sebagai langkah kebijakan penanganan pandemi pada masa kepemimpinan Rasulullah juga telah menerapkan isolasi, karantina dan lock down. Pada masa

²¹ Geoffrey Dudley and Jeremy Richardson 2000. *Why Does Policy Change*. Taylor & Francis e-library.hlm.6-10

²² Geoffrey Dudley and Jeremy Richardson 2000. *Why Does Policy Change*. Taylor & Francis e-library.hlm.15-16

pandemi kusta tersebut Rasulullah mewajibkan warganya untuk menjaga jarak dari penduduk yang menderita kusta tersebut, seperti tertulis dalam hadits “Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah tersebut. Sebaliknya jika wabah itu terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninggalkan tempat itu”. (HR. Al-Bukhari).

Pemerintahan pada masa tersebut, melarang warganya agar tidak mendekati daerah yang terkena pandemi, dan larangan keluar dari daerah tersebut, jika berada dalam daerah yang terkena pandemi. Pemerintahan Rasulullah juga tetap memberikan supply kebutuhan pokok sehari-hari, obatobatan dan tenaga medis selama masa isolasi dan karantina. Krisis yang timbul sebagai dampak dari pandemi, memberikan pelajaran berharga mengenai kepemimpinan yang tepat untuk menentukan strategi dan kebijakan untuk mengatasi krisis yang terjadi tanpa mengabaikan kesejahteraan spiritual dan material seluruh masyarakat. Memimpin dengan menggunakan hati dan akal sehat adalah salah satu pola kepemimpinan yang bisa diterapkan pada masa krisis ini. Memimpin dengan hati membutuhkan ketrampilan halus atau soft skill yang sangat signifikan. Keseimbangan antara hati dan logika dengan akal sehat tentang berbagai perhitungan rasio bisnis dan mendengarkan semua suara stakeholder dengan menggunakan hati ketika mengambil sebuah keputusan, akan membuat suasana organisasi tetap nyaman meskipun krisis melanda.²³

2.6 Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru dan Negara Singapura

2.6.1 Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru

Dengan menimbang pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Pekanbaru Provinsi Riau dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Pekanbaru bertujuan untuk :

- 1) Membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang
²³ Olivia Fachrunnisa dan Diah Ayu Kusumawati.2020.*Sustainability Bisnis : Pendekatan Manajemen Sumber Daya Insani di Masa Pandemi Covid-19*.Unissula Press hlm 15-19 dalam menekan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19);
- 2) Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19);
- 3) Memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat Corona Virus Disease (COVID-19); dan
- 4) Menangani dampak ekonomi, sosial dan keamanan dari penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19).

Adapun Ruang lingkup Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru meliputi :²⁴

- a. Pelaksanaan PSBB;
- b. Hak, kewajiban serta jaminan ketersediaan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB;
- c. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga dan sumber daya penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. Pendanaan; dan
- g. Sanksi.

2.6.2 Penanganan Covid-19 di Negara Singapura

Kasus Covid-19 yang sedang melonjak tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, namun juga negara tetangga seperti Singapura. Tiga menteri Singapura yang tergabung dalam Satgas Covid-19 Antar-Kementerian Singapura menyatakan bahwa Singapura siap untuk hidup bersama dengan Covid-19 karena pemerintah yakin bahwa virus corona akan menjadi endemik yang tidak bisa dimusnahkan dari dunia. Masyarakat Singapura rencananya akan menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa

²⁴ Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru

adanya lockdown karena virus corona diyakini akan hidup bersama manusia hingga beberapa tahun ke depan. Singapura telah menyiapkan 4 faktor kunci dalam memutuskan gagasan tersebut, yang dapat mendorong terwujudnya era kenormalan baru dengan lebih aman. Menteri Singapura Lee Hsien Loong menargetkan dua per tiga warganya disuntik dosis pertama vaksin Covid-19 pada awal Juli.²⁵

Pemerintah pun menambahkan pada Hari Nasional Singapura yang jatuh pada tanggal 9 Agustus mendatang, target menjadi sebanyak dua per tiga populasi sudah mendapatkan vaksin secara penuh atau dua dosis vaksin. Vaksinasi menjadi kunci utama berjalannya era kenormalan baru karena terbukti mengurangi penyebaran Covid-19 dan memperkuat daya tahan tubuh bagi mereka yang terjangkit Covid-19. Tercatat, ada 120 warga Singapura yang telah divaksinasi lengkap, namun tetap terinfeksi Covid-19.²⁶

Pasien yang telah divaksin penuh tercatat tidak memiliki gejala atau gejala ringan. Sedangkan, sekitar 8 persen dari mereka yang tidak divaksinasi mengalami gejala serius. Maka, vaksinasi merupakan langkah penting yang

²⁵ harus diambil oleh seluruh masyarakat. Testing atau pemeriksaan Covid-19 <https://www.tribunnews.com/parapuan>. Diakses tgl 12 Juli 2017 Pukul 12.10 Wib

²⁶ Ibid merupakan salah satu langkah penting untuk memutus penyebaran Covid-19.

Pemeriksaan utamanya diadakan di wilayah perbatasan negara, untuk mengidentifikasi orang-orang yang masuk ke Singapura. Dinilai tidak nyaman, serta membuat kita menunggu dengan lama, pemerintah Singapura kini sudah tidak bergantung lagi pada tes PCR. Singapura juga berencana memperbanyak tes Covid-19 yang cepat serta mudah dilakukan, seperti swab

antigen dan breathalyser. Tes tersebut tidak memerlukan pengambilan sampel swab tetapi cukup dengan napas. Melihat perkembangan pengobatan Covid-19, Kementerian Kesehatan Singapura memastikan bahwa negaranya memiliki stok obat-obatan yang memadai. Singapura, secara mandiri, memiliki serangkaian pengobatan efektif untuk pasien Covid-19. Singapura kini mampu mengobati sakit kritis akibat Covid-19, mempercepat pemulihan, dan mengurangi perkembangan penyakit hingga kematian. Tenaga medis di Singapura juga turun ke lapangan untuk melakukan penelitian, pengembangan, dan produksi obat-obatan untuk Covid-19. Mencegah penyebaran Covid-19 tentu bukan hanya tugas pihak-pihak tertentu. Seluruh lapisan masyarakat pun harus berkontribusi. Kesadaran sosial merupakan kunci yang diutamakan juga oleh pemerintah Singapura dalam menangani Covid-19 dan mencegah penyebarannya. Setiap masyarakat harus memiliki kesadaran penuh untuk menerapkan hidup bersih dan sehat. Menghindari berkumpul di tempat umum, serta tetap di rumah saja ketika sakit, adalah sebagian contoh perilaku untuk saling menjaga kesehatan sesama masyarakat. 4 kunci tersebut diyakinkan dapat membantu terwujudnya era kenormalan baru di Singapura.

Pemerintah Singapura meyakini bahwa virus corona tidak bisa lenyap dan akhirnya menjadi endemik. Itu berarti, SARS-CoV-2 tidak akan hilang dan akan terus ada di sekitar manusia dan populasi global selama beberapa tahun ke depan. Baca juga: Singapura Persiapkan Rencana Hidup Bersama Covid-19 Oleh karenanya, “Negeri Singa” berencana menyiapkan cetak biru alias

blueprint agar warganya hidup dengan Covid-19. Blueprint tersebut disusun untuk mempersiapkan warga Singapura dapat beraktivitas normal dengan Covid-19 tanpa harus menjalani karantina dan lockdown. The Straits Times melaporkan, blueprint yang sedang dipersiapkan tersebut akan menjadi panduan hidup warganya dengan Covid-19.²⁷

Singapura menargetkan agar penerbangan internasional dapat beroperasi kembali. Rencananya, warga yang sudah divaksin tak perlu menjalani karantina jika dia dinyatakan negatif Covid-19 menurut hasil tes. Pembukaan penerbangan internasional dapat dimulai dengan menerapkan travel bubble dengan sejumlah negara atau wilayah yang dianggap berhasil mengendalikan penyebaran virus corona. Pekerja asing seperti asisten rumah tangga dan buruh konstruksi diharapkan bisa masuk lagi ke Singapura. Pasalnya, saat ini sektor perekonomian yang bergantung kepada pekerja asing mengalami kekurangan tenaga kerja sehingga membuat mereka kewalahan.²⁸

²⁷ Lihat <https://www.kompas.com/global/>. diakses Tgl 12 Juli 2021

²⁸ Ibid

Pada fase endemi, kasus Covid-19 menjadi relatif konstan selama bertahun-tahun, dengan kambuh sesekali. Ini juga berarti wabah Covid-19 dapat terus terjadi dari waktu ke waktu. Gugus tugas Covid-19 Singapura menyatakan, Covid-19 akan ditangani seperti penyakit endemik lainnya, misalnya influenza dan cacar air. Saat ini, Singapura tengah gencar melakukan vaksinasi. Pada 9 Agustus, negara tersebut menargetkan dua pertiga warganya mendapat vaksin virus corona. Setiap hari, ada sekitar

80.000 warga Singapura divaksinasi. Vaksinasi disebut ampuh memangkas penyebaran Covid-19. Kalaupun terinfeksi virus corona, mayoritas penerima vaksin ini tidak menunjukkan gejala atau hanya mengalami gejala ringan.

Saat ini, “Negeri Merlion” sedang menjalani transisi menuju new normal setelah mencabut lockdown parsial yang sempat diterapkan sejak 16 Mei hingga 13 Juni. Warga Singapura kini bisa berkumpul maksimal lima orang dan bersantap bersama maksimal dua orang. Pada akhir April, Singapura sempat diguncang oleh virus corona varian Delta yang disebut dapat menular lebih cepat. Dalam 10 bulan sebelum April, kasus Covid-19 lokal konsisten mendekati angka nol. Menurut data terbaru, total kasus Covid-19 di Singapura adalah 62.530 kasus, di mana 143 pasien saat ini menjalani perawatan di rumah sakit. Sebanyak 170 orang sedang menjalani pemulihan di fasilitas isolasi. Sementara itu, jumlah korban meninggal akibat Covid-19 di Singapura adalah 36 orang.

2.7 Jurnal-jurnal yang Relevan dengan Penelitian ini

2.7.1 Jurnal Ega Kurnia Yazid dengan Judul : Menakar Keberhasilan PSBB dalam Penanganan Covid-19

Penanganan Covid-19 ini akan menginvestigasi beberapa indikator penting yang dijadikan metrik kemajuan yang telah dicapai oleh Indonesia. Indikator-indikator tersebut ialah progres penyembuhan pasien, jumlah tes yang dilakukan, fasilitas kesehatan daerah, hingga tren proporsi kasus Covid-19.

Selanjutnya, indikator tersebut akan menceritakan kabar baik dan kabar buruk dari penanganan Covid-19 di Indonesia. kemajuan yang cukup signifikan ditandai dengan meningkatnya jumlah korban sembuh yang bahkan melampaui jumlah korban meninggal pada pertengahan April ini menjelang H+50 penanganan Covid-19.²⁹ Pada bulan ini pula, jumlah pasien sembuh mencatat rekor terbanyak yakni 137 pasien sembuh dalam sehari.³⁰ Hal ini perlu diapresiasi, karena ini berarti kabar baik yang menunjukkan bahwa secara umum tenaga medis dan fasilitas kesehatan kita menuju arah yang tepat dalam memenangkan pertarungan melawan pandemi ini.

Kendati demikian, penting untuk membenturkan fakta ini dengan indikator *Case Fatality Rate* (CFR) atau rasio kasus meninggal Covid-19. Sejauh ini, tren CFR kasus Covid-19 di Indonesia berkisar di angka 8-9 persen. Nilai ini perlu diperhatikan secara hati-hati, karena ada indikasi kasus tidak dilaporkan (*underreporting*) dari kasus meninggal ini, mengingat sejak wabah ini masuk ke Indonesia, tingkat pemakaman harian setidaknya untuk wilayah episentrum DKI Jakarta meningkat hingga 40 persen. Dugaan ini cukup

²⁹ masuk akal karena sangat sulit melakukan uji pada korban meninggal, Ega Kurma Yazid. 2000. Manakah Keberhasilan PSBB dalam Penanganan Covi-19. Jurnal CSIS Commentaries DMRU-065-ID

³⁰ khususnya bagi korban yang belum sempat diperiksa ke rumah sakit. jumlah tes per penduduk yang dilakukan di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan beberapa negara lain terutama negara-negara yang telah berhasil menangani penyebaran Covid-19. Ini berarti menjadi salah satu kabar buruk dari proses penanganan Covid-19 di tanah air. Indonesia hanya mempunyai kapasitas tes 0,18 orang per 1.000 penduduk. Angka ini jelas jauh

tertinggal dari Italia (18,98 per 1.000 penduduk), Korea Selatan 11,50 orang per 1.000 penduduk), bahkan dari negeri tetangga Malaysia (3,76 orang per 1.000 penduduk).

Rendahnya kapasitas tes ini dapat membuat angka yang tercatat oleh pemerintah kemungkinan underreporting dibandingkan dengan kasus riil di lapangan. Apabila masalah ini tak kunjung diatasi maka Indonesia sulit untuk memisahkan orang-orang yang positif terkena Covid-19 dengan orang-orang yang tidak terpapar. Alhasil, orang-orang yang positif ini berpotensi menularkan ke orang-orang yang lain tanpa disadari. Berkaca dari Italia dan Korea Selatan, dengan jumlah tes yang ada sekarang, Indonesia butuh meningkatkan jumlah tes hingga 63-105 kali lebih banyak dengan yang sudah dilakukan sekarang. Dengan skenario yang lebih ringan, Indonesia juga dapat berkaca dari Malaysia yang terbukti menurunkan angka kasus baru per harinya. Dibutuhkan jumlah tes 20 kali lebih banyak untuk mencontoh Malaysia dalam melakukan tes massal.

Dengan kata lain, penting bagi pemerintah daerah untuk memperhatikan indikator-indikator ini mengingat terdapat tren yang menunjukkan bahwa kasus Covid-19 mulai didominasi di daerah-daerah. Pertama Pertama, kepemimpinan pemerintah daerah diperlukan untuk menginisiasi jumlah tes yang lebih ambisius setidaknya 20 kali lipat dari jumlah tes saat ini dalam rangka mendapat ukuran yang lebih akurat terkait penyebaran virus ini. Kedua, penting bagi pemerintah daerah untuk memahami kondisi kapasitas fasilitas kesehatan, serta senantiasa menyiapkan skenario terburuk

wilayahnya dalam menangani pasien Covid-19. Ketiga, penting bagi pemerintah daerah untuk berfokus pada penurunan angka di bawah angka 1,0 melalui Tindakan-tindakan tegas dan terukur dalam membatasi aktivitas yang membutuhkan kontak fisik. Terakhir, penting bagi wilayah-wilayah yang memiliki jumlah kasus dan pertumbuhan kasus tinggi untuk menerapkan PSBB mengingat adanya indikasi penurunan kasus baru setelah diberlakukannya PSBB, dengan catatan tetap memperhatikan kebutuhan dasar kelompok miskin dan rentan. Akan menjadi nilai tambah juga apabila ada kolaborasi dari daerah dan/atau nasional untuk mengembangkan antivirus atau bahkan vaksin Covid-19.

2.7.2 Jurnal Zulfa Harirah dengan Judul : Merespon Nalar Kebijakan Negara dalam Menangani Pandemi Covid-19 di Indonesia

Tahun 2020 merupakan tahun krisis dan mengkhawatirkan yang dialami oleh seluruh negara di dunia akibat pandemi virus Covid 19 (Phan, Nguyen, & al, 2020). Virus Covid 19 merupakan penyakit baru yang memiliki tingkat penularan relatif cepat dan tingkat kematian yang tinggi (Susilo & dkk, 2020). Hingga saat ini belum ditemukan terapi definitif yang tepat untuk mengobati virus ini (Whitworth, 2020). Oleh sebab itu, virus Covid 19 tidak dapat dianggap penyakit yang sepele meskipun pada tahun 1960, virus Covid 19 ini dianggap sebagai penyebab flu biasa (Al-Osail & Al-Wazzah, 2017).³¹

Penyebaran yang cukup signifikan itu sudah dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kasus pertama Covid 19 di Indonesia terkonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020. Tentu saja bukan hal yang mengejutkan karena

Indonesia termasuk negara yang terlambat mengkonfirmasi kasus positifnya meskipun penerbangan dari Wuhan (sebagai tempat asal virus covid 19 ini muncul) masih dilakukan hingga 23 Januari 2020. Hingga kini jumlah kasus yang terkonfirmasi positif virus Covid 19 meningkat signifikan. Tercatat hingga tanggal 19 April jumlah kasus positif Covid 19 di Indonesia berjumlah 6.575 orang, yang sembuh 686 orang, sementara yang meninggal dunia berjumlah 582 orang (Kompas, 2020). Pada tanggal 20 Mei 2020, jumlah ini meningkat drastis menjadi 19.189 kasus positif, sementara yang sembuh berjumlah 4.575 orang dan meninggal sebanyak 1.242 orang (Nugraheny, 2020). Jika dihitung sejak kasus pertama kali tanggal 2 Maret 2020, maka dalam waktu sekitar 2,5 bulan ada penambahan sekitar 19.187 orang. Data ini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan dan bahkan diprediksi masih akan meningkat jumlahnya.³²

Pada hakikatnya, kebijakan merupakan media bagi pemerintah dan masyarakat untuk berinteraksi dan menyatukan pengetahuan. Memahami kebijakan hanya sebagai sebuah pemenuhan tahapan kebijakan yang kaku dan linear tidak mampu menjawab dinamika politik yang terjadi secara nyata. Kebijakan harus mengakomodir kepentingan berbagai pihak sehingga mampu

—menjamin terpenuhinya kebutuhan. Proses pengelolaan kebijakan merupakan
³¹ Zulfa Harirah.2000.Merespon Nalar Kebijakan Negara dalam menangani Pandemi Covid-19 di Indonesia. Jurnal: Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia : Volume 7, No. 1, Mei 2020. Interaksi yang berlangsung antara negara dan masyarakat. Seperti yang
 ISSN: 2442-7411

³² Ibid
 dikemukakan oleh John Locke dan Stuart Mill bahwa keterlibatan warganegara dalam proses kebijakan publik begitu penting karena mampu

memberikan pengetahuan dan pemahaman dan mengembangkan rasa tanggung jawab sosial.

Dalam proses pembuatan kebijakan, *Rational decision making process* mengkaji kebijakan dari kacamata yang penuh perhitungan (rasional) dan dikendalikan oleh obyektivitas. Pertama, berdasarkan pilar utamanya yaitu dari sisi kebijakan adalah bersifat rasional, sehingga kebijakan harus berdasarkan informasi yang lengkap dan seluruh variabel diidentifikasi. Kemudian dari sisi proses kebijakan, model ini dilakukan berdasarkan langkah-langkah, fase, dan proses yang logis. Prosesnya meliputi kalkulasi, proyeksi, perencanaan, dan formulasi, dan harus berdasarkan kelengkapan informasi. Dari aspek konteks institusi model ini cenderung bersifat tertutup, unicentris, hierarki, dan otoritatif. Kedua, berdasarkan implikasi untuk analisis kebijakan bahwa model ini memberikan pengetahuan dan informasi yang diperlukan dalam suatu kebijakan. Karena misi dari analisis kebijakan adalah untuk mengurangi ketidakpastian dalam pembuatan kebijakan.³³

Kesuksesan kebijakan akan ditentukan oleh respon dari masyarakat. Perubahan kebijakan yang diharapkan tidak hanya sebagai hasil dari pertarungan kepentingan antar aktor, tetapi pembelajaran berorientasi kebijakan (*policy learning*) juga menjadi bagian penting dari perubahan

³³ kebijakan. *Policy oriented learning* ini berkaitan dengan bertambahnya pengetahuan mengenai parameter permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Sehingga perubahan kebijakan yang terjadi pada level sekunder dipengaruhi oleh *policy oriented learning* dari koalisi advokasi.

Zulfa Harirah. 2000. Merespon Nalar Kebijakan Negara dalam menanggapi Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal : Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia* : Volume 7, No. 1, Mei 2020, ISSN: 2442-7411

Pengalaman berbagai negara menghadapi penyakit Covid seharusnya mendorong Pemerintah Indonesia memiliki kesiapsiagaan yang tinggi dan respon yang cepat dalam melawan penyakit covid 19. Kasus Covid 19 di Italia misalnya, menjadi salah satu contoh penanganan paling buruk di dunia, sebab selama berminggu-minggu tidak ada tindakan untuk menahan pandemi tersebut (Livingston & Bucher, 2020). Akibatnya, jumlah kematian yang diakibatkan oleh Covid 19 menjadi sangat tinggi (Porcheddu, Serra, Kelvin, & dkk, 2020). Kondisi tersebut ternyata juga terjadi di negara-negara barat seperti Spanyol, Prancis, Jerman, Inggris (Saglietto, D'Ascenzo, Biondi, & dkk, 2020) dan bahkan Amerika Serikat (Chowell & Mizumoto, 2020).

Beberapa negara lain yang mengambil langkah lebih dini dan cepat adalah Taiwan, Hongkong dan Singapura (Lee, Chiew, & Khong, 2020) (Wang, Ng, & Brook, 2020). Kebijakan untuk melacak orang yang datang dari Wuhan, melakukan social distancing, peningkatan jumlah rapid tes hingga pelacakan kontak dilakukan secara cepat setelah China mengumumkan jenis pneumonia baru yang berasal dari Wuhan. Gerak cepat ini menjadi pembeda dibandingkan kebijakan yang diambil oleh negara-negara barat yang cenderung belum mengambil langkah di awal munculnya wabah di negara mereka.

Pembelajaran kebijakan bisa dilihat dari Korea Selatan yang sempat menjadi negara dengan jumlah kasus positif terbanyak diluar China, namun mampu mengambil kebijakan yang dapat mengontrol wabah secara signifikan (Shim, Tariq, Choi, Lee, & Chowell, 2020). Komitmen pemerintah untuk

melakukan pengujian secara ketat dan juga melakukan pelacakan kontak terhadap pasien Covid 19 terbukti berhasil membuat pandemi Covid 19 di Korea Selatan mereda. Perbandingan sederhana dari kebijakan yang diambil oleh Pemerintah di berbagai negara mempengaruhi bagaimana penanganan Covid 19.

Namun sayangnya pemerintah Indonesia dianggap lambat dalam menangani wabah ini (Febriyandi, 2020). Presiden baru menandatangani Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 setelah 11 hari mengumumkan kasus pertamanya. Pada 20 Maret 2020, Presiden menerbitkan Kepres Nomor 9 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan pada Gubernur untuk mengarahkan dan mengevaluasi penanganan covid 19 di daerah masing-masing.

Sebelumnya serangkaian kebijakan yang diambil Pemerintah justru terlihat seperti tidak serius. Pada hakikatnya, sebuah perumusan kebijakan tidak selalu menghasilkan produk peraturan perundang-undangan. Pada beberapa keadaan, pembuat kebijakan justru tidak mengambil tindakan apapun terhadap sebuah permasalahan dan membiarkannya selesai sendiri. Atau seringkali dalam menyelesaikan sebuah masalah, pembuat kebijakan tidak berhasil mencapai kata sepakat mengenai solusi yang harus dilakukan (Muchlis, 2014). Namun jika terjadi, kondisi ini tentu berbahaya dalam hal penanganan wabah mematikan.

Sebelum ditemukan kasus positif di Indonesia, Presiden mengeluarkan empat instruksi sebagai langkah mengantisipasi dampak covid 19 terhadap perekonomian, yaitu dengan memperbanyak kegiatan konferensi dalam negeri, MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition) meningkatkan promosi pariwisata kepada wisatawan yang batal mengunjungi Cina, Korea dan Jepang, serta menyiapkan 72 miliar untuk membayar influencer dalam mempromosikan Indonesia sebagai tujuan wisata. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki nalar economic developmentalist dalam menghadapi Virus Covid 19 (Almuttaqi, 2020). Disaat negara lain membatasi jumlah kunjungan, Indonesia justru membuka peluang bagi wisatawan untuk berkunjung dengan alasan meningkatkan perekonomian.

Namun setelah kasus positif covid 19 semakin meningkat, maka beberapa kebijakan pemerintah mulai diubah, yaitu:³⁴

- a. Mengadakan alat pelindung diri (APD) gratis bagi rumah sakit rujukan covid 19.
- b. Membeli alat tes Covid-19.
- c. Menghimbau masyarakat untuk tidak keluar daerah.
- d. Menghimbau masyarakat untuk melakukan *social distancing*, *physical distancing*, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, serta kampanye slogan “dirumah saja”.

~~e. Membuat kebijakan meliburkan sekolah dan universitas, serta~~
³⁴ Zulfa Harirah.2000.Merespon Nalar Kebijakan Negara dalam menangani Pandemi Covid-19 di Indonesia: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia : Volume 7, No.1 Mei 2020
 Kebijakan bekerja dari rumah.
 ISSN: 2442-7411

- f. Melakukan rapid tes covid 19, menyemprot desinfektan di tempat umum.
- g. Memeriksa kesehatan masyarakat yang melakukan perjalanan luar daerah bahkan melakukan isolasi.
- h. Mengambil berbagai kebijakan ekonomi untuk tetap mempertahankan daya beli masyarakat.
- i. Menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Langkah konkrit *social distancing* yang dilakukan Pemerintah selanjutnya adalah meliburkan siswa, mahasiswa dan pekerja dan menggantinya dengan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah. Meskipun kegiatan ini tidak dapat diartikan sebagai kebebasan tanpa batas (Abidah & dkk, 2020). Anjuran untuk melakukan *social distancing* ini dilakukan karena pemerintah memahami bahwa penyebaran virus Covid-19 bersifat *droplet* dari percikan saat batuk maupun bersin karena memiliki gejala seperti flu dan infeksi pernafasan (Mijnes & dkk, 2004). Sehingga pemerintah kemudian memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan masker dalam kondisi sakit maupun sehat. Hal ini dilakukan guna menghindari puncak epidemi yang dapat membanjiri layanan kesehatan, sehingga jumlah kasus positif Covid-19 tidak jauh melebihi kapasitas perawatan kesehatan yang ada.

Namun kebijakan *social distancing* dan *physical distancing* dinilai tidak berhasil dilakukan. Pada kenyataannya, himbauan ini tidak dipatuhi oleh masyarakat. Disisi lain, pemerintah juga ragu untuk mengambil kebijakan

lockdown. Tentu saja alasannya adalah bahwa *lockdown* akan memberikan dampak yang sangat buruk bagi perekonomian. Pemerintah yang dinilai lamban dalam mengambil keputusan akan *lockdown* atau tidak, ternyata membuat daerah mengambil kebijakan untuk melakukan *local lockdown*. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh James E. Anderson (1979) bahwa kebijakan publik adalah kewenangan yang dapat ditetapkan oleh pemerintah (Taufiqurokhman, 2014). Sehingga Pemerintah lah yang memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan apapun terkait penanganan pandemi Covid-19.

Seperti yang kita ketahui, Indonesia menjadi salah satu negara yang belum menerapkan karantina nasional bagi masyarakat dalam menghadapi pandemi ini. Salah satu penyebabnya adalah kajian mengenai masalah perekonomian yang harus difikirkan secara matang. Pemerintah tidak memberlakukan *lockdown*, namun cara pemerintah menanggapi situasi ini adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang dianggap mampu menstabilkan perekonomian. Nalar rasional yang digunakan oleh pemerintah tentu saja sah dilakukan sebagai *Rational decision making process*.

Kebijakan *lockdown* yang tidak menjadi pilihan bagi pemerintah dengan alasan rasionalitasnya diganti dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dimulai sejak tanggal 31 Maret 2020 (Kemenkeu, 2020). Peraturan Pemerintah mengenai kebijakan ini kemudian dibuat bersamaan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden mengenai status darurat kesehatan. Aturan ini diturunkan menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Pada tanggal 10 April barulah Pemerintah melaksanakan pembatasan sosial skala besar yang mulai diberlakukan di Jakarta, kemudian menyusul di kota-kota lainnya.

Pada dasarnya kebijakan karantina wilayah tertuang dalam UU no 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Dalam pasal 9 disebutkan bahwa karantina dilakukan dengan tujuan untuk menjaga masyarakat agar terhindar dari penyakit dan atau penyebab resiko kesehatan masyarakat lainnya. Dalam kebijakan karantina, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan memastikan masyarakat tetap sehat serta bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan lockdown maupun social distancing dapat menjadi solusi yang tepat untuk menangani virus Covid-19. Sebab kebijakan ini dianggap dapat meminimalisir penyebaran virus Covid-19. Namun nyatanya tidak semua memiliki persepsi dan nalar yang sama dalam melihat kebijakan penanganan covid di Indonesia, sehingga ada yang taat dan banyak yang tidak.

Dalam hal penanganan Covid 19 dari sisi pemerintah, lemahnya koordinasi dan kerancuan komunikasi semakin meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam menghadapi musuh tak terlihat ini. Bukan saja soal konsistensi pernyataan, tetapi juga terjadi tumpang tindih informasi seperti pemberlakuan *lockdown* di tingkat daerah meskipun Presiden mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Ditambah lagi dengan kaburnya informasi mengenai bahaya

desinfektan ke tubuh manusia, aturan soal mudik yang hanya sebatas himbauan untuk tidak mudik terbilang *absurd*.

Dari sisi masyarakat, perilaku individu akan sangat berpengaruh terhadap pengendalian penyebaran Covid-19. Kunci dari pengendalian itu adalah dengan melakukan isolasi diri di rumah, menghubungi pihak medis dari jarak jauh kecuali memiliki gejala parah, dan menjauhi aktivitas pertemuan massal. Namun perilaku tidak normal justru ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia. Di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia yang semakin banyak menunjukkan kasus positif, masyarakat seakan tidak takut dan memilih untuk berlibur, jalan-jalan ke pusat perbelanjaan, mengadakan tabligh akbar, dan kegiatan lain yang dilakukan secara berkerumun. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan himbauan pemerintah untuk melakukan social distancing dan tetap di rumah.

Berkaca pada penanganan Covid-19 di negara lain, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan. Diantaranya yaitu kebijakan meliburkan sekolah, universitas, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, melakukan tes rapid secara massal, memberi bantuan sosial, mengeluarkan himbauan untuk melakukan *social distancing* dan *physical distancing*, hingga menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hingga saat ini Pemerintah belum mau mengambil kebijakan untuk lockdown seperti yang sudah dilakukan negara lain. Kebijakan ini tentu saja diambil dengan alasan khusus, salah satunya dengan mempertimbangkan dampak ekonomi dan alasan Kesehatan.³⁵

³⁵ Zulfa Harirah.2000.Merespon Nalar Kebijakan Negara dalam menangani Pandemi Covid-19 di Indonesia. Jurnal : Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia : Volume 7, No.1 Mei 2020 ISSN: 2442-7411

Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah menunjukkan nalar rasional. Dari sisi kesehatan, kebijakan untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan secara rasional dapat diterima sebagai cara menghindari penularan virus Covid-19. Sedangkan dari sisi ekonomi, Pemerintah memperhitungkan betul dampak ekonomi yang ditimbulkan dari kebijakan lockdown. Pemerintah terkesan melakukan kebijakan secara bertahap untuk menghindari dampak ekonomi secara drastis. Sehingga kebijakan pembatasan sosial berskala besar adalah kebijakan yang dipilih oleh Pemerintah untuk dilaksanakan. Ini menunjukkan rasionalitas kebijakan negara.

2.8 Ulasan Karya

Ulasan karya merupakan ulasan mengenai hasil penelitian terdahulu yang dilakukan dan dipublikasikan serta selaras *dengan* penelitian yang sedang dilakukan.²⁹ Berikut beberapa ulasan karya yang penulis ambil sebagai salah satu acuan dalam melaksanakan penelitian pada tabel 2.3 :

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti/Judul Penelitian/Penerbit	Hasil Penelitian
(1)	(2)
Ranggi Ade Febrian, “Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual Dan Teoritis)” Journal.uir.ac.id. 2015	Koordinasi pemerintahan tentunya menghadapi tantangan yang besar, yang disebabkan oleh masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Yang dimaksud dengan masalah koordinasi dapat disebutkan bahwa masalah perihal kerjasama antara aparatur pemerintahan dan pertaliannya satu sama lain.

Nama Peneliti/Judul Penelitian/Penerbit	Hasil Penelitian
(1)	(2)
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol UIR	<p>Koordinasi pemerintahan menjadi faktor dominan ketidak berhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsi pembangunan, fungsi pelayanan, dan fungsi pemberdayaan. Kesukaran yang diprediksi oleh Polje dalam tulisannya seakan terbukti dengan ego sektoral yang dimiliki lembaga-lembaga pemerintah, yang terkesan gengsi untuk bekerjasama, meminta bantuan atau sekedar bertanya dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Dalam kajian konseptual dan teoritis dalam tulisan ini penulis melihat konsep yang dituangkan oleh Van Poelje yang berjudul “Algemene Inleiding tot bestuurskunde” yang menunjukkan bahwa pemegang peran koordinasi dalam pemerintahan selalu menjadi poros, dan penjaga keseimbangan serta kelancaran berputarnya “mesin” pemerintahan yang ada disepertinya. Perkembangan koordinasi pemerintahan di Indonesia dari masa ke masa khususnya pada penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai contoh praktis. Konsep koordinasi juga bisa diadopsi dari Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam pemerintahan yang sudah diakui kebijaksanaannya oleh dunia. Tulisan ini setidaknya menjadi sumbangan pemikiran dalam konteks konseptual dan teoritis bagi pemerintah untuk mengevaluasi metode dan implikasi koordinasi pemerintahan yang telah dilaksanakan selama ini.</p>
Ega Kurnia Yazid,	Melibatkan beberapa indikator seperti jumlah tes,

Nama Peneliti/Judul Penelitian/Penerbit	Hasil Penelitian
(1)	(2)
<p>“Menakar Keberhasilan PSBB dalam Penanganan Covid-19 : Data dan Peringatan bagi Pemerintah Daerah”</p> <p>Jurnal CSIS Commentaries DMRU-065-ID, Tahun 2020</p>	<p>CFR, kapasitas fasilitas kesehatan, hingga progres PSBB, tulisan ini mencoba mengevaluasi kinerja penanganan Covid-19 di Indonesia selama dua bulan terakhir sejak kasus pertama diumumkan. Kabar baik dari indikator CFR yang mulai menuju arah yang lebih baik karena jumlah pasien sembuh sudah melampaui korban meninggal. Seiring itu, PSBB juga tampaknya memberikan sinyal baik dalam menurunkan tambahan kasus di wilayah episentrum. Meski begitu, masih terdapat beberapa catatan seperti jumlah tes yang kurang memadai serta adanya pergeseran tren yang menunjukkan bahwa kasus Covid-19 mulai bergerak ke daerahdaerah membuat pemerintah tidak boleh lengah dengan capaian-capaian kecil ini. Mulai saat ini, pemerintah daerah memiliki peran lebih penting lagi dalam mengukur tingkat penyebaran, mengawal, dan melindungi warganya dari ancaman Covid-19.</p>
<p>Muhyiddin,</p> <p>“Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia”</p> <p>The Indonesian Journal of Development Planning, Volume IV No. 2 – Juni 2020</p>	<p>Untuk skenario perencanaan pembangunan jangka menengah pada masa kehidupan normal baru ini Pemerintah mempunyai 3 alternatif pilihan strategi. Pertama, tetap dengan rencana semula yang sudah tertuang dalam RPJMN 2020-2024, dengan sedikit penyesuaian program untuk mengakomodir kehidupan normal baru dalam ancaman Covid-19. Kedua, melakukan penyesuaian program dan target secara moderat dengan mendasarkan asumsi yang sudah diperbaharui sesuai situasi dan kondisi pandemi Covid-19, kemudian mempertahankan program</p>

Nama Peneliti/Judul Penelitian/Penerbit	Hasil Penelitian
(1)	(2)
	dimana asumsi-asumsi yang menjadi dasar masih relevan dan masih bisa disesuaikan dengan keadaan pasca Covid-19. Ketiga, merombak seluruh program dan target-target yang ditetapkan berdasarkan berbagai asumsi dan perkembangan baru pasca Covid-19 dan krisis ekonomi yang mengiringinya. Dalam hal ini semua program yang telah ditetapkan di RPJMN 2020-2024 dikaji ulang, dirumuskan kembali strateginya, dan dijadwal ulang periode pelaksanaannya.
<p>Heri Kurniawansyah HS, Amrullah, M.Salahuddin, Muslim, Sri Nurhidayati,</p> <p>“Konsep kebijakan strategis dalam menangani eksternalitas ekonomi dari covid - 19 pada masyarakat rentan di indonesia”</p> <p>Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 1 No. 2, 2020:</p>	<p>Orientasi terhadap fleksibilitas ekonomi di tengah pandemi Covid-19 ini bisa dilakukan manakala pemerintah secara sistematis dan konsisten melaksanakan tiga konsep kebijakan strategis yaitu kebijakan alokasi, kebijakan distribusi, dan kebijakan stabilisasi. Tiga kebijakan tersebut harus ditopang dengan formulasi dan strategi kongkrit yang sesuai dengan kondisi empirisnya. Pelatihan online tidak akan menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat di tengah pandemi ini, melainkan dengan implementasi kebijakan yang kongkrit melalui 3 konsep kebijakan tersebut.</p>
<p>Zulfa Harirah,</p> <p>“Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia”</p>	<p>Meningkatnya jumlah kasus positif Covid 19 di Indonesia membawa masalah yang serius. Prevalensi penyebaran virus Covid 19 telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari remaja hingga kalangan tua. Dampaknya telah dirasakan diseluruh bidang baik</p>

Nama Peneliti/Judul Penelitian/Penerbit	Hasil Penelitian
(1)	(2)
<p>Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia: Volume 7, No. 1, Mei 2020 ISSN: 2442-7411</p>	<p>perekonomian, politik, kesehatan, sosial maupun agama. Sektor kerja baik formal maupun informal juga tak luput terkena imbas negatif. Penularan virus mematikan ini secara massif telah menguras energi negara. Pemerintah dituntut untuk segera mengeluarkan kebijakan yang ampuh dalam menangani wabah Covid 19. Berkaca pada penanganan Covid 19 di negara lain, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan. Diantaranya yaitu kebijakan meliburkan sekolah, universitas, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, melakukan tes rapid secara massal, memberi bantuan sosial, mengeluarkan himbauan untuk melakukan social distancing dan physical distancing, hingga menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hingga saat ini Pemerintah belum mau mengambil kebijakan untuk lockdown seperti yang sudah dilakukan negara lain. Kebijakan ini tentu saja diambil dengan alasan khusus, salah satunya dengan mempertimbangkan dampak ekonomi dan alasan kesehatan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah menunjukkan nalar rasional. Dari sisi kesehatan, kebijakan untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan secara rasional dapat diterima sebagai cara menghindari penularan virus Covid 19. Sedangkan dari sisi ekonomi, Pemerintah memperhitungkan betul dampak ekonomi yang ditimbulkan dari kebijakan lockdown. Pemerintah</p>

Nama Peneliti/Judul Penelitian/Penerbit	Hasil Penelitian
(1)	(2)
	<p>terkesan melakukan kebijakan secara bertahap untuk menghindari dampak ekonomi secara drastis. Sehingga kebijakan pembatasan sosial berskala besar adalah kebijakan yang dipilih oleh Pemerintah untuk dilaksanakan. Ini menunjukkan rasionalitas kebijakan negara. Dari tulisan ini dapat diketahui bahwa keberhasilan kebijakan ditentukan oleh respon masyarakat terhadap kebijakan. Dalam hal penanganan Covid 19 di Indonesia, kebijakan negara dengan nalar rasional akan mampu diterima secara rasional pula oleh masyarakat jika Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk menjamin tersedianya sumber daya ekonomi bagi masyarakat.</p>
<p>Wibowo hadiwardoyo, “Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19” Jurnal Universitas Muhammadiyah, Jakarta Tahun 2020</p>	<p>Kunci dari penyehatan kembali kondisi ekonomi nasional adalah survival di tingkat individu dan entitas usaha. Oleh karena itu negara harus mengerahkan segenap upaya, termasuk dengan memberikan stimulus, agar rakyatnya tidak collaps semasa krisis, tetap produktif dan memiliki penghasilan memadai, serta bisnis dapat terus berjalan. Yang diperlukan adalah kebijakan yang tepat, baik secara lokasi, waktu, maupun prosedurnya. Apabila PSBB dapat menjamin putusannya rantai penularan Covid19, maka lakukanlah dengan benar, dan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pembatasan yang berkepanjangan, atau berpindah-pindah lokasi karena tidak serempak, berisiko melampaui batas kemampuan survival individu maupun entitas bisnis. Dan bila itu yang terjadi, maka</p>

Nama Peneliti/Judul Penelitian/Penerbit	Hasil Penelitian
(1)	(2)
	penyelamatan tidak dapat dilakukan, dan kerugian akan semakin besar baik secara ekonomi maupun sosial.
<p>Enrico, “Dinamika Mortalitas Dalam Kejadian Luar Biasa: Studi Kasus Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2020” Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Indonesia, Tahun 2020</p>	<p>Peran influencer dalam kondisi ini menjadi penting untuk mempengaruhi kesadaran masyarakat Indonesia yang saat ini telah banyak memakai media sosial. Influencer dapat menempuh langkah ini dengan membuat gerakan sosial berbasis dalam jaringan atau online. Langkah tersebut juga dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Dalam segi teknologi, penyebaran Covid-19 dapat diminimalisir dengan pembuatan aplikasi peta penyebaran Covid-19. Aplikasi tersebut dapat memberikan peringatan kepada penggunanya mengenai daerah mana saja yang memiliki angka persebaran Covid-19 yang dirangkum dari berbagai media pemberitaan nasional serta input data oleh para pengguna nya itu sendiri dan divisualisasikan dalam bentuk peta interaktif berbasis GPS. Aplikasi tersebut dapat digunakan oleh para pengguna yang tidak memungkinkan bekerja dari rumah seperti ojek online, ojek konvensional, dan profesi lainnya, serta orang-orang yang hendak berpergian karena ada sesuatu yang sangat penting. Aplikasi tersebut bersifat open-source sehingga pengguna nya sendiri dapat memasukkan data mengenai wilayah mana saja yang memiliki angka persebaran Covid-19. Aplikasi ini dimonitor secara ketat oleh bot aplikasi serta tim developer</p>

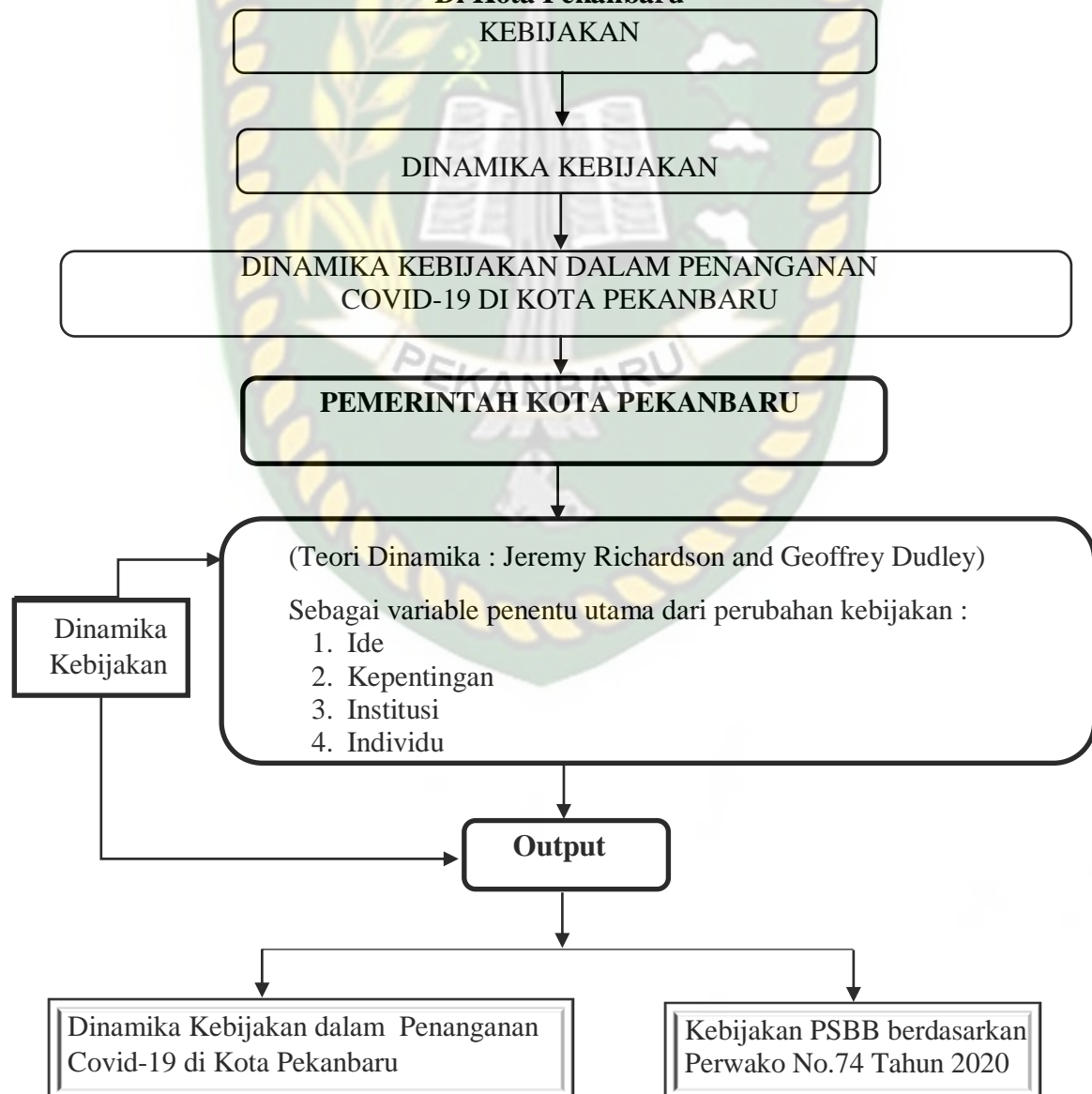
Nama Peneliti/Judul Penelitian/Penerbit	Hasil Penelitian
(1)	(2)
	aplikasi itu sendiri untuk menghindari adanya pemberitaan palsu atau input data palsu yang dilakukan oleh para pengguna yang tidak beritikad baik.

Berdasarkan penjabaran mengenai studi terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa orang mengenai penelitian masalah Pandemi Covid-19, maka permasalahan yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini adalah “ Dinamika Kebijakan Dalam Penanganan Covid-19 Di Kota Pekanbaru”.

2.9 Kerangka Pikiran

Kerangka pemikiran diperlukan oleh peneliti dalam proses sistematika dan alur pemikiran sebuah penelitian. Oleh karena itu kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan pada gambar berikut ini, yaitu sebagai berikut :

Gambar 1.1
Kerangka Pemikir
Dinamika Kebijakan Dalam Penanganan Covid-19
Di Kota Pekanbaru



Sumber : Pengolahan Peneliti

2.10 Konsep Operasional

Untuk memudahkan Analisa data dan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan penelitian ini, maka penulis perlu membuat konsep operasional agar pembaca muda memahami maksud dan tujuan penulis ini, diantaranya :

1. **Dinamika** adalah adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok secara keseluruhan. karenanya, dapat disimpulkan bahwa dinamika adalah kedinamisan atau keteraturan yang jelas dalam hubungan secara psikologis.
2. **Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)** adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* baru yaitu *Sars-CoV-2*, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019.
3. **Tanggap Darurat** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
4. **Pemerintah Daerah di sini adalah Pemerintah Kota Pekanbaru** yakni kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. **Ide** adalah rancangan yang tersusun di dalam pikiran artinya sama dengan gagasan atau cita-cita.
6. **Kepentingan Umum** adalah kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan yang memiliki ciri-ciri tertentu, antara lain menyangkut semua sarana umum bagi berjalannya kehidupan yang beradab.
7. **Kepentingan Pribadi** adalah suatu tujuan atau hal yang bermanfaat atau menghasilkan sesuatu terhadap diri sendiri, dan tidak menghasilkan suatu keuntungan kepada orang lain.
8. **Institusi** adalah merupakan suatu organisasi yang ada dan pendiriannya atas dasar tujuan yang nantinya akan langsung berhubungan dengan masyarakat.
9. **Individu** adalah satu organisme tunggal yang hidupnya berdiri sendiri dan secara fisiologis bersifat bebas, serta tidak memiliki hubungan organik dengan sesamanya

2.11 Konsep Variabel

Adapun Indikator variabel dalam penelitian ini mengenai Dinamika Kebijakan Dalam Penanganan Covid-19 Di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembuatan kebijakan yang hegemonik, namun kemudian serangkaian tantangan dramatis terhadap paradigma dominan oleh para pecinta lingkungan yang pada akhirnya mengakibatkan rusaknya solusi jalan (Menurut Geoffrey Dudley and Jeremy	Dinamika	Ide	1. Struktural 2. Fungsional
		Kepentingan	1. Ekonomi 2. Sosial 3. Kesehatan 4. Politik
		Institusi	Perangkat Daerah
		Individu	1. Pelaksanaan PSBB 2. Masyarakat

Richardson.2000)			
-------------------------	--	--	--

Sumber : Olahan Penulis 2021



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian yang non hipotesis sehingga dalam rangka penelitiannya bahkan tidak perlu merumuskan hipotesisnya. Metode penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan obyek penelitian secara akurat.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk dapat menggali informasi secara utuh dari sumber informasi dan data dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode deskriptif.

Pelaksanaan metode penelitian deskriptif tidak terbatas hanya pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Mengacu pada tujuan penulisan ini yakni dinamika kebijakan dalam penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru.

Penelitian kualitatif berkenaan dengan data yang bukan angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif. Metode penelitian kualitatif terutama digunakan untuk memperoleh data yang kaya, informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan.¹

Metode penelitian kualitatif menggunakan focus group, interview secara mendalam dan observasi berperan serta dalam mengumpulkan data. Teori Grounded adalah merupakan salah satu jenis metode kualitatif, dimana peneliti dapat menarik generalisasi (apa yang diamati secara induktif), teori yang abstrak tentang proses, tindakan atau interaksi berdasarkan pandangan dari partisipan yang diteliti.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan pada Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, lokasi ini diambil di karenakan wilayah tersebut salah satu yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Kota Pekanbaru sehingga penelitian tentang Dinamika Kebijakan dalam Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru dapat memperoleh data yang dimaksud dalam penelitian ini.

3.3 Informan

Menurut Bungin, Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.² informan penelitian ini ada dua macam, yaitu :

1. Informan Kunci (key informan) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informan pokok yang diperlukan dalam penelitian;

¹ Sugiyono.2020.Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta CV. Hlm. 3-5

² Bungin Burhan.2007.Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana. Hlm. 76

2. Informan Utama (main informan) merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

Teknik yang digunakan untuk menentukan sumber data informan atau person dalam penelitian kualitatif adalah *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling* adalah informan sebagai sumber data dengan pertimbangan yang bersangkutan memiliki informasi dibutuhkan oleh penulis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi mengenai dinamika kebijakan dalam penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini informan penelitian yang diikuti sertakan peneliti sebanyak 15 (lima belas) orang, dengan unsur pemerintah sebanyak 8 (delapan) orang dan masyarakat sebanyak 7 (tujuh) orang. Adapun informan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1
Data-data Informan

No	Nama Jabatan	Umur (Tahun)	Jenis Kelamin (L/P)	Pendidikan Terakhir	Status	Keterangan
1.	Walikota Pekanbaru	61	L	S-3	Kawin	Key Informan
2.	Sekretaris Daerah	46	L	S-2	Kawin	Key Informan
3.	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	58	L	S-2	Kawin	Informan
4.	Ketua Tim Ahli	45	L	S-1	Kawin	Informan

No	Nama Jabatan	Umur (Tahun)	Jenis Kelamin (L/P)	Pendidikan Terakhir	Status	Keterangan
	(Dirut. RSUD Madani)					
5.	Kepala BPBD	43	L	S-2	Kawin	Informan
6.	Kepala BPKAD	56	L	S-2	Kawin	Informan
7.	Kepala Dinas Sosial	42	P	S-2	Kawin	Informan
8.	Kepala Satpol-PP	44	L	S-2	Kawin	Informan
9.	Masyarakat 1	46	L	S-3	Kawin	Dosen UIN Riau
10.	Masyarakat 2	42	P	D-3	Kawin	Swasta – Bengkel Servis Mobil
11.	Masyarakat 3	30	L	S-1	Kawin	Pekerja Swasta
12.	Masyarakat 4	40	P	D-3	Kawin	PNS
13.	Masyarakat 5	26	P	S-1	Kawin	Pegawai Honorer
14.	Masyarakat 6	37	L	SMA	Kawin	Driver Gocar
15.	Masyarakat 7	30	L	S-1	Kawin	Driver Blue

No	Nama Jabatan	Umur (Tahun)	Jenis Kelamin (L/P)	Pendidikan Terakhir	Status	Keterangan
						Bird

Sumber : Olahan Penulis 2021

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dimaksud sumber data penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk menggali data-data tersebut, maka penelitian ini dilakukan pada komponen yang berhubungan dengan dinamika kebijakan dalam penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru.

Sesuai dengan tujuan penelitian yang disebutkan diatas, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan dengan menggunakan teknik wawancara dan data lain berupa studi literatur yang sangat mendukung penulisan ini terkait Kebijakan dalam Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru. dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara hasil pertemuan *face to face* (tatap muka).
- b. Data Sekunder yaitu data yang sudah jelas dan tersedia yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada kaitannya dengan penelitian. Meliputi : profil Pemerintah Kota Pekanbaru dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dinamika kebijakan dalam penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut :

1. Pengamatan secara intensif (*observation*).

Dalam melakukan *observation*, penulis berada di lokasi penelitian di Kota Pekanbaru dan mengamati secara teliti dan seksama keadaan yang sesungguhnya di lapangan serta mengamati gejala-gejala yang ada dan timbul untuk dijadikan bahan penelitian.

2. Wawancara yang dilakukan secara mendalam (*in depth interview*).

Dalam melakukan *in depth interview*, penulis melakukan *interview* langsung kepada pembuat kebijakan yang bertanggung jawab terhadap dinamika kebijakan dalam penanganan covid-19 pasca tanggap darurat pada Pemerintah Kota Pekanbaru.

3. Dokumentasi.

Dalam melakukan teknik dokumentasi, penulis mengumpulkan seluruh data-data, laporan dan foto-foto kegiatan terkait dinamika kebijakan dalam penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru.

3.6 Instrumen Penelitian

Sesuai dengan metode penelitian dan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dari lapangan, Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Melalui Teknik ini, akan digambarkan seluruh data atau fakta yang

diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori-teori yang sesuai.

Dalam pelaksanaan penelitian, analisis data dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengamatan. Jadi selama proses penelitian berlangsung data yang diperoleh dapat langsung dianalisis. Selanjutnya analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan empiris, dengan mengacu pada metode analisis Miles dan Huberman, bahwa analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu :

1. Reduksi data, bahwa data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sampai kesimpulan akhirnya ditarik dan diverifikasi.
2. Penyajian data, yaitu merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, yang meliputi berbagai gambar, jaringan kerja, kajian kegiatan, tabel dan lain-lain yang dirancang untuk merakit informasi agar mudah dimengerti dan dapat disimpulkan.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu merupakan usaha untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang ditemui dalam reduksi data maupun penyajian data.

Dalam penelitian ini, proses analisis dilakukan dengan menggunakan analisis interaktif melalui tahapan awal yaitu pengumpulan data primer maupun data sekunder. Data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan, dapat

dilakukan proses reduksi data, penyajian data dan verifikasi untuk memperoleh kesimpulan.

Selanjutnya analisis data ini akan dilakukan secara induktif, yakni penganalisaan dengan cara menarik kesimpulan atas data yang berhasil dikumpulkan dari yang berbentuk khusus ke bentuk umum, atau penalaran untuk mencapai suatu kesimpulan mengenai semua unsur-unsur penelitian yang tidak diperiksa atau diteliti dalam penelitian mengenai dinamika kebijakan dalam penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “*divalidasi*” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Penelitian kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.³

³ Sugiyono.2020.Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta CV. Hlm. 101-102

3.7 Uji Validas Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.⁴

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi *uji credibility* (validitas interval), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas). Untuk mengecek keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data. Adapun teknik yang dilakukan antara lain :

a. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan akan dapat meningkatkan kepercayaan/kredibilitas data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti Kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan nara sumber akan semakin terbentuk *rapport*, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Bila telah terbentuk rapot, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, dimana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari.

Pada tahap awal peneliti memasuki lapangan, peneliti masih dianggap orang asing, masih dicurigai, sehingga informasi yang diberikan belum lengkap, tidak mendalam dan mungkin masih banyak yang dirahasiakan.

⁴ Sugiyono.2020.Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta CV. Hlm. 181-183

Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek Kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Bila data yang diperoleh selama ini setelah dicek Kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.⁵

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan dapat meningkatkan kredibilitas data, meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan Kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi Teknik pengumpulan data dan waktu.

⁵ Sugiyono.2020. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta CV. Hlm. 186-193

d. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan

data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

e. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif, seperti camera, handycam, alat rekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

f. Mengadakan Member Check

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan napa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi

data berarti datanya data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan napa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan napa yang dimaksud sumber data atau informan.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah menyediakan data mentah yang berupa transkrip, catatan lapangan dan pandangan peneliti sendiri, mengorganisasikan dan menyimpan data yang akan dianalisis, membaca seluruh data, melakukan koding, menyusun tema-tema dan deskripsi data, mengkonstruksi antar tema, interpretasi dan memberi makna tema yang telah tersusun menurut Creswell.⁶

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara berulang-ulang, beberapa hari, beberapa bulan, sampai datanya jenuh, dengan sebagai berikut:⁷

1. Pengumpulan data

Kegiatan utama dalam setiap penelitian adalah pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Wawancara makin lama di

lapangan, jumlah data yang terkumpul akan semakin banyak banyak dan bervariasi.

2. Deskripsi data mentah

⁶ Sugiyono.2020.Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta CV. Hlm. 160

⁷ Sugiyono.2020.Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta CV. Hlm. 167-170

Data mentah yang telah terkumpul selanjutnya ditampung dan dideskripsikan atau didisplaykan. Data ini masih berserakan, belum punya bentuk, belum punya arti dan makna. Dalam penelitian kualitatif penyajian data mentah ini diletakkan dalam lampiran, karena jumlahnya sangat banyak.

3. Reduksi data

Data mentah yang telah terkumpul yang jumlahnya sangat banyak perlu direduksi. Reduksi berarti mengurangi data. Reduksi dilakukan dengan memilih data yang dianggap penting, merupakan data yang baru yang belum pernah dikenal, data yang unik yang berbeda dengan data yang lain dan merupakan data yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Untuk mereduksi data penelitian juga berbekal dari teori tertentu.

4. Kategorisasi data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya data tersebut dipilah, atau dikelompokkan, atau diklasifikasikan, atau disusun ke dalam kategori tertentu, sehingga memiliki arti dan makna. Penelitian kualitatif pada tahap tertentu bisa berakhir pada tahap menemukan kategorisasi.

5. Mengkonstruksi hubungan kategorisasi

No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan																											
		Tahun 2021																											
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
6	Konsultasi dan Bimbingan Tesis																												
7	Ujian Tesis																												
8	Revisi dan Pengesahan Tesis																												
9	Pengadaan dan Penyerahan Tesis																												

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Pada Bab 4 ini Peneliti akan memaparkan fokus dari penelitian yaitu Dinamika Kebijakan Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru. Dimana penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting).¹

Pada penelitian kualitatif peneliti dituntut dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh sumber data. Pada penelitian kualitatif peneliti bukan sebagaimana seharusnya apa yang dipikirkan oleh peneliti tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh sumber data.

Dengan melakukan penelitian melalui pendekatan deskriptif maka peneliti harus memaparkan, menjelaskan, menggambarkan data yang telah diperoleh oleh peneliti melalui wawancara mendalam yang dilakukan dengan para informan. Dalam bab ini menggambarkan tentang : Identitas Responden, gambaran umum lokasi penelitian, pembahasan dan *best practice* sebagai berikut :

4.1 Identitas Responden

Data dalam penelitian ini berasal dari data primer berupa wawancara yang diajukan kepada : Walikota Pekanbaru, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Plt.Kepala Dinas Kesehatan, Ketua Tim Ahli (Direktur.RSUD Madani), Kepala BPBD, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Sosial, Kasat Pol-PP dan Masyarakat.

¹ Sugiyono.2020.Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta CV. Hlm. 8

Tabel 4.1
Identitas Responden

No	Nama Jabatan	Umur (Tahun)	Jenis Kelamin (L/P)	Pendidikan Terakhir	Status	Keterangan
1.	Walikota Pekanbaru	61	L	S-3	Kawin	Key Informan
2.	Sekretaris Daerah	46	L	S-2	Kawin	Key Informan
3.	Plt.Kepala Dinas Kesehatan	51	L	S-1	Kawin	Informan
4.	Ketua Tim Ahli	45	L	S-1	Kawin	Informan
5.	Kepala BPBD	43	L	S-2	Kawin	Informan
6.	Kepala BPKAD	56	L	S-2	Kawin	Informan
7.	Kepala Dinas Sosial	42	P	S-2	Kawin	Informan
8.	Kepala Satpol- PP	45	L	S-2	Kawin	Informan
9.	Masyarakat 1	46	L	S-3	Kawin	Dosen UIN Riau
10.	Masyarakat 2	42	P	D-3	Kawin	Swasta – Bengkel Servis Mobil
11.	Masyarakat 3	30	L	S-1	Kawin	Pekerja Swasta
12.	Masyarakat 4	40	P	D-3	Kawin	PNS

No	Nama Jabatan	Umur (Tahun)	Jenis Kelamin (L/P)	Pendidikan Terakhir	Status	Keterangan
13.	Masyarakat 5	26	P	S-1	Kawin	Pegawai Honorer
14.	Masyarakat 6	37	L	SMA	Kawin	Driver Gocar
15.	Masyarakat 7	30	L	S-1	Kawin	Driver Blue Bird

Sumber : Olahan Penulis 2021

4.1.1 Deskripsi Informan Penelitian

Semua informan dalam penelitian ini tidak merasa keberatan untuk disebutkan namanya, adapun informan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H. Dr. Firdaus, ST., MT (Walikota Pekanbaru).

Informan peneliti wawancara adalah Bapak Dr. H. Firdaus, ST., MT selaku Key informan dalam penelitian ini. Peneliti memiliki kesan bahwa beliau adalah sosok yang sangat ramah dan murah senyum selain itu juga peneliti merasa diperlakukan sebagai seorang mahasiswa oleh beliau, sehingga peneliti merasa bebas untuk melakukan wawancara. Dengan diterimanya peneliti oleh Bapak Dr. H. Firdaus, ST., MT selaku Walikota Pekanbaru, ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi peneliti. Selain itu pula Beliau juga sangat antusias membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

2. H. Muhammad Jamil, M.Ag., M.Si (Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru).

Selama peneliti menjalani proses penelitian dan wawancara Bapak Muhammad Jamil merupakan Key informan peneliti, sebelum melakukan wawancara dan berdiskusi sebelum turun ke lapangan. Beliau sangat antusias untuk memberikan informasi yang peneliti butuhkan kapan saja asalkan tidak mengganggu kesibukan beliau dalam bekerja. Dengan penampilan yang ramah, tegas, berwibawa, lugas dalam berbicara beliau bersedia menjawab semua pertanyaan yang diajukan peneliti. Beliau pun tidak segan-segan untuk membantu peneliti mencari informan lainnya agar bersedia menjadi informan dalam penelitian serta mencari data-data yang berguna bagi kesempurnaan penelitian ini. Tidak ada perasaan canggung dalam diri peneliti karena peneliti dan beliau telah saling mengenal sejak peneliti bertugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru yang beliau pimpin sampai sekarang.

3. dr Zaini Rizaldy Siragih (Plt. Kepala Dinas Kesehatan).

Informan ketiga adalah Bapak dr. Zaini Rizaldy Siragih, beliau peneliti lihat sebagai sosok yang ramah selain itu beliau juga tidak keberatan untuk dimintai waktunya untuk melakukan wawancara. Walaupun peneliti dan beliau baru saling mengenal ketika peneliti meminta kesediaannya untuk menjadi informan dalam penelitian ini tetapi dengan senyum khasnya beliau mengutarakan kesediaannya. Dalam menjawab pun beliau sangat blak-blakan dan santai sehingga tidak ada rasa canggung dalam diri peneliti.

4. dr. Arnaldo Eka Putra, SpPD (Direktur RSUD Madani Kota Pekanbaru).

Informan yang satu ini pun tidak kalah ramahnya dari informan yang lainnya. Selain itu beliau juga orang yang humoris dan tipikal orang yang cepat akrab dengan orang lain. Beliau juga tidak segan-segan membantu mencarikan data-data yang bermanfaat bagi penelitian ini. Beliau juga membuka ruang bagi peneliti untuk melakukan diskusi tentang kegiatan selama PSBB.

5. Zaharman (Kepala BPBD).

Informan yang satu ini pun tidak kalah ramahnya dari informan yang lainnya. Selain itu beliau juga orang yang humoris dan tipikal orang yang cepat akrab dengan orang lain. Beliau juga tidak segan-segan membantu mencarikan data-data yang bermanfaat bagi penelitian ini. Beliau juga membuka ruang bagi peneliti untuk melakukan diskusi tentang kegiatan BPBD selama PSBB.

6. Drs. H. Syoffaizal, M.Si (Kepala BPKAD).

Informan ini pun tidak kalah ramahnya dari informan yang lainnya, selain itu juga peneliti telah mengenal terlebih dahulu terhadap beliau sebelum melakukan wawancara. Oleh karena itu peneliti menjadi tidak canggung dan sedikit bebas bertanya terhadap beliau. Sebelum peneliti memulai bertanya, beliau dahulu bertanya kepada peneliti. Dengan

akrabnya peneliti dengan beliau sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan wawancara.

7. Chairani, S.STP., M.Si (Kepala Dinas Sosial).

Informan ini pun begitu ramahnya, selain itu juga peneliti telah mengenal terlebih dahulu terhadap beliau sebelum melakukan wawancara. Oleh karena itu peneliti menjadi tidak canggung dan sedikit bebas bertanya terhadap beliau. Beliau salah satu Kepala Dinas perempuan yang peneliti lakukan wawancara, sebelum peneliti memulai bertanya beliau sangat antusias untuk menjawab pertanyaan peneliti. Dengan akrabnya peneliti dengan beliau sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan wawancara.

8. Iwan Simatupang, A.P., S.Sos., M.Si (Kepala Sat Pol-PP).

Informan ini pun tidak kalah ramahnya dari informan yang lainnya, selain itu juga peneliti telah mengenal terlebih dahulu terhadap beliau sebelum melakukan wawancara. Oleh karena itu peneliti menjadi tidak canggung dan sedikit bebas bertanya terhadap beliau. Sebelum peneliti memulai bertanya, beliau dahulu bertanya kepada peneliti. Dengan akrabnya peneliti dengan beliau sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan wawancara mendalam.

9. Dr. Trian Zuhadi/Masyarakat 1-warga Kec.Tampan (Dosen Uin Riau).

Informan yang satu ini pun tidak kalah ramahnya dari informan yang lainnya. Selain itu beliau juga orang yang humoris dan tipikal orang

yang cepat akrab dengan orang lain. Beliau juga tidak segan-segan membantu penelitian dalam setiap mengajukan pertanyaan. Beliau juga membuka ruang bagi peneliti untuk melakukan diskusi tentang kegiatan selama PSBB di Wilayah Kecamatan Tampan dan aktivitas di Kampus.

10. Kiki Mukhsis/Masyarakat 2 – warga Kec. Tampan (Toko Bengkel Servis Mobil dan Ganti Ban).

Informan yang satu ini pun begitu ramahnya, selain itu beliau juga orang yang cepat akrab dengan orang lain. Beliau juga tidak segan-segan membantu penelitian dalam setiap mengajukan pertanyaan.

11. Muamar/Masyarakat 3 – warga Kec. Tampan (Pekerja Swasta).

Informan yang satu ini pun tidak kalah ramahnya dari informan yang lainnya. Selain itu beliau juga orang yang humoris dan tipikal orang yang cepat akrab. Beliau juga tidak segan-segan membantu penelitian dalam setiap mengajukan pertanyaan. Beliau juga membuka ruang bagi peneliti untuk melakukan diskusi tentang kegiatan selama PSBB di Wilayah Kecamatan Tampan.

12. Devi Rusnita/Masyarakat 4 – warga Kec. Tampan (PNS)

Informan Ibu Devi Rusnita, beliau peneliti lihat sebagai sosok yang ramah selain itu beliau juga tidak keberatan untuk dimintai waktunya untuk melakukan wawancara. Walaupun peneliti dan beliau baru saling mengenal ketika peneliti meminta kesediaannya untuk menjadi informan dalam penelitian ini tetapi dengan senyum khasnya beliau

mengutarakan kesediaannya. Dalam menjawab pun beliau sangat blak-blakan dan santai sehingga tidak ada rasa canggung dalam diri peneliti.

13. Fadla Anisa/Masyarakat 5 – warga Kec. Tampan (Pegawai Honorer).

Informan Ibu Fadla Anisa, beliau peneliti lihat sebagai sosok yang ramah dan murah senyum, selain itu beliau juga tidak keberatan untuk dimintai waktunya untuk peneliti lakukan wawancara. Walaupun peneliti dan beliau baru saling mengenal ketika peneliti meminta kesediaannya untuk menjadi informan dalam penelitian ini dengan beliau mengutarakan kesediaannya. Dalam menjawab pun beliau sangat blak-blakan dan santai sehingga tidak ada rasa canggung dalam diri peneliti.

14. Kriston Sirait/Masyarakat 6 (Driver Gocar).

Informan Pak Kriston Sirait, beliau peneliti lihat sebagai sosok yang ramah, selain itu beliau juga tidak keberatan untuk dimintai waktunya untuk peneliti lakukan wawancara walaupun beliau sedang mengemudi. Walaupun peneliti dan beliau baru saling mengenal ketika peneliti meminta kesediaannya untuk menjadi informan dalam penelitian ini dengan beliau mengutarakan kesediaannya. Dalam menjawab pun beliau sangat blak-blakan sehingga peneliti bisa menggali lebih dalam setiap pertanyaan yang diajukan.

15. Muhammad Risky Akbar/Masyarakat 7 (Driver Blue Bird).

Informan terakhir yang terakhir melakukan wawancara adalah Muhammad Risky Akbar seorang driver blue bird. Peneliti memiliki kesan bahwa beliau adalah orang yang ramah. Secara keseluruhan seluruh informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang ramah dan terbuka ketika peneliti melakukan wawancara serta tidak segan-segan membantu peneliti ketika peneliti membutuhkan sesuatu yang kaitan dengan penelitian.

4.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.2.1 Gambaran Umum Wilayah Kota Pekanbaru

Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan permukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda pada saat itu. Oleh karena itu Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat

melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting. Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang.

Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang. Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudia lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa Tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintah Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. Selanjutnya perkembangan tentang Pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan sampai ditetapkan menjadi Ibu Kota Provinsi Riau.

Kota Pekanbaru memiliki luas wilayah $\pm 632.26 \text{ Km}^2$ yang terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan dan 83 (delapan puluh tiga) kelurahan, dengan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan kabupaten

Pelalawan, sebelah timur dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan serta sebelah barat yang berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Berdasarkan release data terakhir dari BPS, pada Tahun 2019 jumlah penduduk di Kota Pekanbaru 1.149.360 jiwa atau meningkat 2,78% dibandingkan Tahun 2018 dengan total 1.117.359 jiwa. Hampir 16,38% dari jumlah penduduk di Provinsi Riau berada di Kota Pekanbaru. Penduduk laki-laki di Kota Pekanbaru lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan dengan rasio 105,34. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Tampan, yaitu sebanyak 307.947 jiwa (27,56%), kemudian disusul oleh Tenayan Raya dengan jumlah penduduk 167.929 jiwa (15,03 %) sedangkan yang terendah terdapat di Kecamatan Sail, yaitu sebanyak 21.492 jiwa (1,92 %). Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kota Pekanbaru didominasi oleh penduduk usia produktif yaitu penduduk dengan usia 19-64 Tahun sebesar 60,69 %. Sedangkan penduduk kelompok umur 0-19 Tahun sebesar 36,54 % dan penduduk berusia 65 tahun ke atas sebesar 2,75 %. Adapun laju pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru antara Tahun 2010-2018 adalah sebesar 2,7 %. Untuk tingkat kepadatan penduduk di Kota Pekanbaru pada Tahun 2018 adalah sebesar 1.767 Jiwa/Km². dengan tingkat kepadatan yang paling tinggi adalah pada Kecamatan Sukajadi sebesar 12.612 Jiwa/Km², sedang paling kecil adalah Rumbai Pesisir sebesar 469 Jiwa/Km².

Berdasarkan release data BPS Kota Pekanbaru Tahun 2020, jumlah Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) di Kota Pekanbaru adalah sebanyak

558.065 Jiwa, yang terdiri dari 338.153 laki-laki dan 219.912 perempuan. Jika dibandingkan Tahun 2017, kondisi ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru Tahun 2018 cukup membaik yakni naik 5,73 %, hal ini menunjukkan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada Tahun 2019 meningkat dari 494.362 orang menjadi 514.200 orang dengan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 43.865 orang. Dalam hal tingkat pengangguran, pada Tahun 2019 di Kota Pekanbaru mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2018 yakni dari 8,42 % menjadi 7,86 %. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Pekanbaru Tahun 2019 adalah sebesar 66,12. Adapun perkembangan tenaga kerja di Kota Pekanbaru ditunjukkan di bawah ini :

Tabel 4.2.

Kondisi Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru Tahun 2019

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Angkatan Kerja	338.153	219.912	558.065
Bekerja	310.515	203.685	514.200
Pengangguran Terbuka	27.638	36.227	43.865
Bukan Angkatan Kerja	92.234	193.743	285.977
Sekolah	49.177	46.507	95.684
Mengurus Rumah Tangga	22.890	137.756	160.646
Lainnya	20.167	9.480	29.647
Jumlah	430.387	413.655	844.042
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	78,57	53,16	66,12
Tingkat Pengangguran	8,17	7,38	7,86

Sumber : BPS Kota Pekanbaru, 2020

Berdasarkan release data BPS Kota Pekanbaru pada Tahun 2019, Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Pekanbaru menjadi 72,22. Salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya angka harapan hidup adalah faktor kesehatan lansia, dengan memberikan penyuluhan kepada lansia tentang Kesehatan maka kesadaran akan menjaga Kesehatan juga meningkat sehingga angka usia harapan hidup menjadi meningkat.

Pada Tahun 2018 fasilitas kesehatan yang ada di Kota Pekanbaru diantaranya 25 Rumah Sakit, 14 Rumah Sakit Bersalin, 49 Poliklinik, 34 Puskesmas Pembantu dan 60 Apotek. Tenaga Kesehatan yang ada di Kota Pekanbaru pada Tahun 2018 terdiri 935 orang Dokter, 3.194 orang Perawat, 941 orang Bidan dan Tenaga Farmasi sebanyak 646 orang.

Secara administratif, Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki 12 Kecamatan dan 83 Kelurahan dengan jumlah Kelurahan di masing-masing Kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3.

Wilayah Administratif Kota Pekanbaru Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan
1.	Tampan	9
2.	Payung Sekaki	7
3.	Bukit Raya	5
4.	Marpoyan Damai	6
5.	Tenayan Raya	13
6.	Lima Puluh	4

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan
7.	Sail	3
8.	Pekanbaru Kota	6
9.	Sukajadi	7
10.	Senapelan	6
11.	Rumbai	9
12.	Rumbai Pesisir	8
	Pekanbaru	83

Sumber : LKjIP Tahun 2019

4.2.2 Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Tampan

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Kecamatan Tampan merupakan salah satu Kecamatan di Ibukota Pekanbaru yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, tanggal 20 September 1996 Nomor KPTS: 151/IX/1996.

Kecamatan Tampan terbentuk dari beberapa Desa dan Kecamatan dari Kampar yaitu ; Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar, Desa Sidomulyo Barat, Desa Labuh Baru dan Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu.

Secara geografis, lokasi penelitian berada pada kooordinat $101^{\circ} 22' 45''\text{BT}$ – $101^{\circ} 23' 09''\text{BT}$ dan $0^{\circ} 28' 41''\text{LU}$ – $0^{\circ} 29' 09''\text{LU}$ memiliki luas wilayah 59.81 km^2 dengan jumlah kelurahan sebanyak 9 kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Simpang Baru

2. Kelurahan Sidomulyo Barat
3. Kelurahan Tuah Karya
4. Kelurahan Delima
5. Kelurahan Tuah Madani
6. Kelurahan Sialang Munggu
7. Kelurahan Tobek Gadang
8. Kelurahan Bina widya
9. Kelurahan Air Putih

Kondisi iklim dan cuaca di Kecamatan Tampan mengikuti iklim Kota Pekanbaru pada umumnya yang beriklim sangat basah, tipe A klasifikasi Schmidt dan Ferguson. Suhu berkisar antara 21,6°-35,0° C dengan rata-rata 28,0°C, sedangkan kelembaban udara berkisar antara 57,9%-93,2% dengan rata-rata 74,6% dan tekanan udara 1.007,2 Mb-1.013,0 Mb, dengan rata-rata 1,010,1 Mb serta mempunyai kecepatan angin 7-8 knot/jam. Curah hujan antara 1.408 mm/th-4.344 mm/th, dengan rata-rata curah hujan mencapai 2.938 mm/th dan hari hujan selama 198 hari. Musim hujan terjadi pada bulan Januari sampai April dan September sampai Desember. Musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai Agustus. Keadaan topografi Kecamatan Tampan yaitu datar dengan kelerengan antara 0-8% dan ketinggian lokasi lebih kurang 20 m dpl. Jenis tanahnya adalah brown forest soil. Kondisi tekstur tanahnya berupa lempung dengan tingkat kesuburan sedang.

Tabel 4.4

**Status Pemerintahan, Jumlah Rukun Tetangga (RT)
dan Rukun Warga (RW) Menurut Kelurahan di Kecamatan Tampan
Tahun 2018**

Kelurahan	Status Pemerintahan	Jumlah RT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Simpang Baru	Kelurahan	38	10
Sidomulyo Barat	Kelurahan	127	27
Tuah Karya	Kelurahan	84	19
Delima	Kelurahan	38	10
Tuah Madani	Kelurahan	31	8
Sialang Munggu	Kelurahan	127	31
Tobek Godang	Kelurahan	68	15
Bina Widya	Kelurahan	30	9
Air Putih	Kelurahan	64	10

Sumber : Kantor Camat Tampan 2018

Kecamatan Tampan terdiri dari sembilan kelurahan, 139 RW dan 607 RT. Sembilan kelurahan tersebut adalah Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Buah Karya, Kelurahan Delima Kelurahan Buah Madani, Kelurahan Sialang Munggu, Kelurahan Tobek Godang, Kelurahan Bina Widya dan Kelurahan Air Putih dengan jumlah rumah tangga pada tahun 2018 sebanyak 75.904 rumah tangga.

Tabel 4.5

**Jumlah Penduduk menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin
Di Kecamatan Tampan Tahun 2018**

Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Simpang Baru	17.336	16.298	33.634

Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Sidomulyo Barat	25.543	24.058	49.601
Tuah Karya	24.521	23.347	47.868
Delima	15.006	14.795	29.801
Tuah Madani	10.781	9.243	20.024
Sialang Munggu	24.188	24.523	48.711
Tobek Godang	16.831	16.031	32.862
Bina Widya	11.092	9.785	20.877
Air Putih	12.897	11.672	24.569
Jumlah	158.195	149.752	307.947

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2020

Jumlah penduduk Kecamatan Tampan mencapai 307.947 jiwa pada tahun 2018. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 6,96 persen dari tahun 2017. Kepadatan penduduknya mencapai 5.148 jiwa/km².

4.3 Pembahasan

Penelitian ini membahas tentang Dinamika Kebijakan Dalam Penangan Covid-19 di Kota Pekanbaru. Alasan Peneliti menulis penelitian ini adalah untuk mengetahui Dinamika Kebijakan Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat kebijakan dalam penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu bulan Maret sampai April Tahun 2021 dengan pemenuhan persyaratan administrasi penelitian dari pengurusan surat izin penelitian mulai pada Universitas Islam Riau Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan, hingga persetujuan informan. Penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan Dinamika Kebijakan Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru.

4.3.1 Dinamika Kebijakan Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru

Dinamika Kebijakan Dalam Penangan Covid-19 di Kota Pekanbaru khususnya Wilayah Kecamatan Tampan bila dilihat dari Konsep Teori Dinamika yang di kemukan oleh Geoffrey Duddley dan Jeremy Richardson di pengaruhi oleh beberapa variable :

- 1) Ide
- 2) Kepentingan
- 3) Institusi
- 4) Individu

Dianalisis melalui indikator berikut ini :

4.3.1.1 Aspek Ide

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan, Pemerintah Kota Pekanbaru perlu memperhatikan sebuah peraturan ataupun kebijakan untuk menjadi tolok ukur dari pelaksanaan kebijakan tersebut, seperti yang dikatakan oleh Geoffrey Duddley dan Jeremy Richadson² mengemukakan cara di mana ide dapat bermutasi dan dengan demikian ditransplantasikan di sektor tertentu.

Untuk mengetahui aspek ide pada Dinamika Kebijakan Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru tersebut berdasarkan wawancara penulis dengan Walikota Pekanbaru di mana beliau mengatakan bahwa:

Apakah saudara telah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dalam penanganan Covid-19.

“Dapat saya sampaikan, bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru telah memiliki Tim Ahli untuk penanganan pandemi Covid-19. Dengan keluarnya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/250/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Pekanbaru dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Merespon instruksi tersebut, Pemerintah Kota bersama Tim Ahli serta Forkopimda langsung menyusun dan menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru agar penyebaran Covid-19 dapat diantisipasi dengan baik penularannya. Tentu segala keputusan yang diambil oleh Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan dari Tim Ahli dengan menyampaikan hasil saran tersebut melalui Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Jadi cukup jelas disini bahwa

Pemerintah Kota Pekanbaru telah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dalam penanganan Covid-19 yakni telah memiliki Tim Gugus Tugas di daerah serta melakukan kampanye dan sosialisasi bagaimana menjalankan dan menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari serta menginstruksikan kepada seluruh PNS, masyarakat dan pusat-pusat perdagangan, jasa dan industri untuk bekerja dengan memperhatikan 4 M yakni; Memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan menjaga jarak”³

Berdasarkan hasil analisis dokumen Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/250/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Pekanbaru dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) serta hasil wawancara dengan narasumber penelitian dapat diketahui ide kebijakan dalam penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru bersumber dari Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/250/2020 serta hasil rekomendasi Tim Ahli yang di bentuk oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Hanya

saja belum adanya standar dari pemerintah tentang masker yang seperti apa yang mesti dipergunakan untuk mencegah tertular Covid-19.

Wawancara penulis dengan Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru dimana beliau pun mengamini pernyataan Walikota dengan mengatakan bahwa :

“Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, beliau telah melakukan 4 M sesuai arahan dan instruksi Walikota. Dan beliau sampaikan sesuai arahan dan intruksi pimpinan, bahwa seluruh PNS masyarakat dan pusat-pusat perdagangan, jasa dan industri untuk menerapkan 4 M yakni; Memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan menjaga jarak”⁴

³ Hal serupa juga disampaikan dengan tegas oleh Ketua Tim Ahli sekaligus Wawancara terkait Ide. Bapak H. Muhammad Jamil tanggal 16 April 2021

⁴ Wawancara terkait Ide. Bapak H. Muhammad Jamil tanggal 16 April 2021
Direktur RSUD Madani Kota Pekanbaru di mana beliau mengatakan bahwa :

“Walikota telah mengajukan PSBB kepada Pemerintah Pusat, Saya selaku Ketua Tim Ahli di amanahkan oleh Walikota untuk mengkaji PSBB yang akan diterapkan di Kota Pekanbaru. Dapat saya sampaikan jumlah kasus positif Covid-19 beberapa hari terakhir menunjukkan tren menaik. Tercatat sampai dengan tanggal 10 Mei 2020 terdapat 73 kasus positif, yang mana dalam kurun waktu delapan hari saja, terjadi kenaikan 28 kasus positif yaitu posisi tanggal 2 Mei 2020 jumlah kasus positif Covid-19 sebanyak 45 kasus menjadi 73 kasus pada tanggal 10 Mei 2020, yang kalau dirata-ratakan terjadi kenaikan kasus positif 3-4 kasus per hari. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kami bersama-sama Tim dan Forkopimda mengusulkan kepada Walikota untuk menerapkan PSBB di Wilayah Kota Pekanbaru demi menyelamatkan kesehatan masyarakat”⁵

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Satpol-PP di mana beliau mengatakan bahwa :

“Satpol-PP selaku Perangkat Daerah yang memiliki fungsi Penegakan Peraturan Daerah, melakukan pengawasan dan pembinaan kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru untuk mematuhi apa yang telah di Himbau Pemerintah, yakni untuk menjalankan 4 M tersebut. Satpol-PP

sesuai tugas pokok dan fungsinya akan menindak bagi masyarakat yang tidak mematuhi aturan pemerintah daerah”⁶

Kepala BPKAD pun menyampaikan hal serupa di mana beliau mengatakan bahwa :

“Pemerintah Kota Pekanbaru, sesuai arahan dari Pemerintah Pusat dan Surat edaran walikota untuk mematuhi dan mentaati instruksi tersebut demi mengurangi penyebaran virus Covid-19 tersebut”⁷

Hal serupa juga disampaikan Kepala Dinas Kesehatan di mana beliau mengatakan bahwa :

“Untuk menjalankan instruksi Pemerintah Pusat, Kepala Daerah beserta Kepala Dinas harus memberikan contoh kepada masyarakat sehingga himbauan 4 M yakni Memakai masker, mencuci tangan, menghindari

kerumunan dan menjaga jarak dalam berjalan baik dan sesuai harapan. Dengan demikian penyebaran covid-19 dapat di atasi dengan baik”⁸

⁵ Wawancara terkait Ide. Bapak dr. Arnaldo Eka Putra tanggal 8 Juni 2021

⁶ Wawancara terkait Ide. Bapak Iwan Simatupang tanggal 16 April 2021.

⁷ Wawancara terkait Ide. Bapak Drs. H. Syoffaizal,. M.Si tanggal 16 April 2021.

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial di mana beliau mengatakan bahwa :

“Dinas Sosial selaku instansi teknis terhadap kebijakan PSBB tersebut, dalam menjalankan serta menyalurkan bantuan ke pada warga yang terkena dampak akibat dari kebijakan PSBB dan pandemi Covid-19 tetap memperhatikan 4 M yakni Memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan menjaga jarak dalam menyalurkan bantuan”⁹

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala BPBD di mana beliau mengatakan bahwa :

“Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai tupoksi, menyediakan sarana dan prasarana di perkantoran dan masyarakat tempat pencuci tangan dan menepatkan posko-posko pada setiap kecamatan untuk memantau warga agar tetap menjalankan protokol Kesehatan sesuai arahan pemerintah”¹⁰

Selain Pejabat Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, Penulis juga mewawancarai beberapa kelompok masyarakat Wilayah Kecamatan Tampan dan driver online dengan jumlah sebanyak 7 (tujuh) orang responden yakni :

Hal serupa juga disampaikan oleh masyarakat bernama Muamar di mana beliau mengatakan bahwa :

“Saya selaku masyarakat mengikuti himbuan Pemerintah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan memperhatikan protokol Kesehatan ”¹¹

Sedangkan masyarakat bernama Kiki Mukhsis di mana beliau mengatakan bahwa :

“Saya selaku pedagang, di dalam aktivitas sehari-hari di tempat usaha saya, kami telah menyediakan tempat pencuci tangan bagi para pelanggan khususnya dan pekerja pada umumnya. Hal ini kami lakukan sesuai himbuan dari pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19”¹²

Hal serupa juga disampaikan oleh masyarakat Bernama Devi Rusnita di mana beliau mengatakan bahwa :

“Saya selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) alhamdulillah telah menjalankan aktivitas sehari-hari dengan memperhatikan protokol Kesehatan yakni; memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Dan saya selaku PNS tentu harus menjadi contoh bagi masyarakat”¹³

Sedangkan masyarakat sekaligus Dosen Fakultas ekonomi Universitas Islam Riau yakni Bapak Dr. Trian Zulhadi, SE., M.Ec mengatakan bahwa :

“Saya selaku Pengajar dan masyarakat tentu sangat mendukung apa yang telah Pemerintah keluarkan terkait penanganan Pandemi Covid-19. Oleh karena itu masyarakat harus mendukung kebijakan yang telah di keluarkan pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19”¹⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh Masyarakat Fadla Anisa di mana beliau mengatakan bahwa :

“Saya selaku Pegawai Honorer alhamdulillah telah menjalankan aktivitas sehari-hari dengan memperhatikan protokol Kesehatan yakni; memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Selain itu pula pimpinan saya di kantor juga menghimbau kepada bawahannya untuk tidak masuk kantor apabila kondisi tubuh tidak fit, hal ini dilakukan agar kami tidak tertular Covid-19 atau sebaliknya”¹⁵

Hal serupa juga disampaikan oleh Pengemudi Driver Gocar bernama Kriston Sirait di mana beliau pun mengatakan bahwa :

“Selama mencari orderan, Bapak Kriston Sirait selalu menggunakan masker, menyediakan hand sanitezer, menjaga jarak antara pengemudi dan penumpang serta dengan jumlah kapasitas penumpang 4 (empat)

- orang dengan pengemudi. Hal ini dilakukan oleh Bapak Kriston Sirait untuk menghindari tertularnya Virus Covid-19 dan mematuhi himbauan Pemerintah.”¹²
- ¹³ Wawancara terkait Ide. Ibu Devi Ruentil tanggal 7 April 2021.
- ¹⁴ Wawancara terkait Ide. Bapak Dr. Trian Zuhadi 1 April 2021.
- ¹⁵ Wawancara terkait Ide. Ibu Fadla Anisa 7 April 2021.

Hal serupa juga disampaikan oleh Pengemudi Driver Blue Bird bernama Risky Akbar di mana beliau pun mengatakan bahwa :

“Selama mencari orderan, Perusahaan telah menyediakan hand sanitezer di dalam mobil dan Saya selaku Driver setiap akan mulai bekerja selalu diberikan pengarahan terkait 4 M yakni : Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan menghindari kerumunan serta juga di dalam mobil untuk menjaga jarak antara pengemudi dengan jumlah kapasitas penumpang 4 (empat) orang beserta pengemudi. Hal ini dilakukan oleh Bapak Risky untuk menghindari tertularnya Covid-19 dan mematuhi himbauan Pemerintah”¹⁷

Berdasarkan wawancara diatas dikatakan bahwa Dinamika Kebijakan Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru khususnya Wilayah Kecamatan Tampan di lakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/250/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Pekanbaru dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dimana hal ini menunjukkan bahwa ide dapat bermutasi dan dengan demikian dapat ditransplantasikan di sektor tertentu. Oleh karena itu, mutasi ide kebijakan mungkin melibatkan tidak hanya elemen kebetulan yang ditekankan oleh model aliran kebijakan tetapi juga pilihan yang lebih disengaja yang disiratkan. Selain pertimbangan tersebut, yang menjadi pertimbangan di keluarkannya Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Pekanbaru berdasarkan pertimbangan Tim Ahli, melihat perkembangan penyebaran Covid-19 di Kota Pekanbaru yang perlu diantisipasi penyebarannya serta Tim Ahli menghitung tingkat penularan Covid-19 yang begitu cepat dapat menyerang manusia dengan masa inkubasi berlangsung selama 14 hari, maka sangat mungkin seseorang yang terjangkit Covid-19 menyebarkannya pada orang lain.

Hal ini sesuai dengan pendapat para ahli yang mengatakan ide adalah elemen kunci dalam analisis Dinamika yakni cara dimana ide dapat bermutasi dan dengan demikian ditransplantasikan¹⁸. Penulis mengutip tulisan Leo Agustino dalam bukunya Dasar-dasar Kebijakan Publik (2017:61) “Bahwa nilai (atau kriteria serta standar) apakah yang mempengaruhi para pembuat keputusan (*decision-makers*) dalam menentukan keputusan yang akan mereka tetapkan untuk menjadi kebijakan, tidak ada yang dapat memastikan nilai mana yang digunakan oleh para *decision makers* dalam menetapkan keputusan. Tapi tentu saja kita tidak

pernah berharap bahwa para pembuat keputusan membuat keputusan hanya didasarkan pada nilai coba-coba atau keberuntungan semata.

4.3.1.2 Aspek Kepentingan.

Kepentingan mungkin memainkan peran penting dalam menanamkan gagasan, tetapi jika kepentingan yang sama ini sebenarnya juga merupakan koalisi advokasi berbasis nilai berbagi keyakinan inti yang dalam maka pada akhirnya mereka juga akan dibentuk dan didorong oleh gagasan (Sabatier 1993:16). Dalam menguraikan antara ide dan kepentingan, penting untuk mengidentifikasi sejauh mana kepentingan dapat dibingkai oleh ide.

Untuk mengetahui sejauhmana peran aspek kepentingan pada Dinamika

¹⁸ Kebijakan Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru, Chaginfasyal & Fudang e-Library.

wawancara penulis dengan Walikota Pekanbaru di mana beliau mengatakan bahwa:

Dalam menangani Covid-19 apakah ada kepentingan ekonomi masyarakat yang perlu diselamatkan.

“Dalam hal Penetapan kebijakan dan penerapan PSBB, tentu Pemerintah Kota Pekanbaru memperhatikan aspek-aspek yang akan terdampak akibat Kebijakan PSBB itu sendiri. Apa saja aspek nya, tentu aspek ekonomi hal yang utama baik masyarakat yang terdampak langsung maupun tidak. Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengantisipasi hal tersebut dan menuangkannya di dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru. Akibat pandemi Covid-19 di tengah masyarakat menimbulkan masalah eknomi, yang awalnya mereka berpenghasilan baik akibat pandemi Covid-19 penghasilan menjadi menurun, yang dulunya mereka bekerja mereka di PHK. Pemerintah Kota Pekanbaru bersama Dinas terkait telah mendata, mana warga yang terdampak akibat pandemi Covid-19.

Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat melalui bantuan yang akan diberikan Pemerintah Kota Pekanbaru maupun oleh Pemerintah Pusat”¹⁹

Hal ini selaras dengan Wawancara penulis dengan Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru dimana beliau pun mengamini pernyataan Walikota dengan mengatakan bahwa :

“Ekonomi masyarakat dalam menangani pandemi Covid-19 ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Pekanbaru selain mengatasi penyebaran Covid-19 itu sendiri. Hal ini dilakukan Pemerintah dan menuangkannya di dalam Perwako Nomor 74 Tahun 2020 tentang PSBB. Hal ini dilakukan akibat dampak dari Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian dunia yang berimbas kepada perekonomian masyarakat”²⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Satpol-PP di mana beliau mengatakan bahwa :

“Ekonomi masyarakat dalam menangani pandemi Covid-19 ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Pekanbaru selain mengatasi penyebaran Covid-19 itu sendiri. Hal ini dilakukan Pemerintah dan menuangkannya di dalam Perwako Nomor 74 Tahun 2020 tentang PSBB. Hal ini dilakukan akibat dampak dari Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian dunia yang berimbas kepada perekonomian masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat melalui bantuan yang akan diberikan Pemerintah Kota Pekanbaru maupun oleh Pemerintah Pusat”²¹

Kepala BPKAD pun menyampaikan hal serupa di mana beliau mengatakan bahwa :

“Ekonomi masyarakat dalam menangani pandemi Covid-19 ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Pekanbaru selain mengatasi penyebaran Covid-19 itu. Pemerintah Kota Pekanbaru mendata penduduk yang terkena dampak langsung akibat pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan akibat dampak dari Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat”²²

¹⁹ Wawancara terkait aspek kepentingan Pemerintah Kota Pekanbaru, Pekanbaru, 16 April 2021.

²⁰ Wawancara terkait aspek kepentingan, Bapak H. Muhammad Jamil tanggal 16 April 2021.

²¹ Wawancara terkait aspek kepentingan, Bapak H. Muhammad Jamil tanggal 16 April 2021.

²² Wawancara terkait aspek kepentingan, Bapak H. Muhammad Jamil tanggal 16 April 2021.

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial di mana beliau mengatakan bahwa :

“Pada saat walikota menyusun serta menerapkan Kebijakan PSBB, Walikota bersama Forkopimda dan Tim ahli mengkaji dan mendata warga baik yang langsung terdampak akibat pandemi Covid-19 maupun yang tdk langsung. Berdasarkan data yang kami peroleh masyarakat yang terdampak langsung akibat pandemi Covid-19 cukup banyak, sehingga Saya selaku Kepala Dinas Sosial mendata Kembali jumlah masyarakat berdasarkan usulan RT/RW, Lurah dan Kecamatan agar data tersebut menjadi *valid*. Pemerintah Kota Pekanbaru menuangkan di dalam pasal pada Perwako No.74 Tahun 2020 tentang PSBB hal ini dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk membantu masyarakat yang terdampak tersebut”²³

Hal serupa juga disampaikan Kepala Dinas Kesehatan di mana beliau mengatakan bahwa :

“Pada saat walikota Menyusun dan menerapkan Kebijakan PSBB, kami dari Dinas Kesehatan fokus kepada penyebaran Covid-19 dan ambil data dari Dinas Kesehatan kepada penyebaran Covid-19 dan ambil data tentang protokol Kesehatan yang harus dijalankan masyarakat serta penanganan pasien yang tertular Covid-19. Sepengetahuan saya Pemerintah Kota Pekanbaru telah memperhatikan aspek ekonomi masyarakat baik itu dalam Menyusun dan menerapkan Kebijakan PSBB”²⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala BPBD di mana beliau mengatakan bahwa :

“Tentu kepentingan ekonomi masyarakat yang utama perlu di selamatkan selama Pandemi Covid-19. Dengan gerak cepatnya Pemerintah Kota Pekanbaru membuat dan memberlakukan Kebijakan PSBB untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, selain itu Pemerintah Kota Pekanbaru telah menuangkannya dalam satu pasal tentang pemberian bantuan untuk masyarakat selama PSBB berlangsung”²⁵

²¹ Wawancara dari Dinas Kesehatan kepada penyebaran Covid-19 dan ambil data dari Dinas Kesehatan kepada penyebaran Covid-19 dan ambil data tentang protokol Kesehatan yang harus dijalankan masyarakat serta penanganan pasien yang tertular Covid-19. Sepengetahuan saya Pemerintah Kota Pekanbaru telah memperhatikan aspek ekonomi masyarakat baik itu dalam Menyusun dan menerapkan Kebijakan PSBB”²⁴

²² Wawancara terkait aspek kepentingan. Drs. H. Syoffaizal, M.Si tanggal 16 April 2021.

²³ Wawancara terkait aspek kepentingan. Ibu Chairani, S.STP., M.Si tanggal 22 April 2021.

Berdasarkan wawancara diatas dikatakan bahwa Dinamika Kebijakan Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru di lakukan berdasarkan kajian bersama tim ahli yang berorientasi pada kepentingan masyarakat yang paling utama. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru pada Pasal 3 point 4 yakni : “menangani dampak ekonomi, sosial dan keamanan dari penyebaran Covid-19”. Dimana hal ini menunjukkan bahwa kepentingan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada saat itu murni untuk menyelamatkan masyarakat Kota Pekanbaru dengan mempertimbangkan resiko tingkat penularan Covid-19 pada masyarakat perkotaan yang cukup tinggi. Penulis mengutip tulisan Leo Agustino dalam bukunya Dasar-dasar Kebijakan Publik (2017:61) “bahwa untuk membuat keputusan banyak nilai dan faktor yang mempengaruhi penentuannya dalam

²⁴ Wawancara terkait aspek kepentingan. Bapak Zaharman. Z. politikus kongresi 17 April 2021. persyaratan

²⁵ Wawancara terkait aspek kepentingan. Bapak Zaharman tanggal 22 April 2021.

procedural (proses), kompromi yang telah dibuat sebelumnya dengan kelompok tertentu, waktu dan sebagainya, namun sejatinya keputusan dibuat melalui pilihan dan nilai yang berorientasi pada penyelesaian masalah.

4.3.1.3 Aspek Institusi.

Pembuat keputusan, khususnya birokrat, dapat juga dipengaruhi oleh nilai organisasi. Organisasi, seperti instansi pemerintah, menggunakan banyak mekanisme *stick-and-carrot* dalam upayanya untuk membujuk pegawainya agar dapat menerima dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang ditentukan organisasi.

Hal ini menunjukkan bagaimana restrukturisasi kelembagaan dapat identik dalam menghasilkan proses kebijakan.²⁶

Untuk mengetahui sejauhmana peran aspek institusi pada Dinamika Kebijakan Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru, hal ini sejalan dengan wawancara penulis dengan Walikota Pekanbaru di mana beliau mengatakan bahwa:

Dalam menangani Covid-19 ini institusi sebagai pusat utama yang menjadi kebijakan apakah sudah tepat

“Pemerintah Kota Pekanbaru telah membentuk Tim Gugus tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang di ketuai langsung oleh Saya selaku Walikota Kota Pekanbaru, Pimpinan Forkopimda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Sosial, Satpol PP dan instansi terkait lainnya. Gugus tugas memiliki fungsi sebagai Tim Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru, tentu Tim Gugus Tugas sebagai *leading* sektor dalam penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru didasari oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomo 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan

²⁶ Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) Daerah”²⁷
 Geoffrey Duddley and Jeremy Ricardhson.2000. Why Does Policy Change. Taylor & Francis e-Library.

²⁷ Wawancara terkait aspek institusi. Bapak H.D. Firdaus, STPMT tanggal 16 April 2021. Berdasarkan wawancara diatas dikatakan bahwa Pemerintah Kota dalam

kebijakan penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru telah membentuk Tim Ahli dan institusi tersendiri untuk menangani wabah Covid-19. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas penulis melakukan wawancara dengan Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru dimana beliau mengatakan :

“Pemerintah Kota Pekanbaru telah membentuk Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19). Dimana Gugus tugas memiliki fungsi sebagai Tim Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru, semua perkembangan tentang wabah Covid-19 di Kota Pekanbaru pusat datanya adalah Tim Gugus Tugas. Tentu Tim Gugus

Tugas telah bekerja sesuai dengan amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) Daerah”²⁸

Berdasarkan wawancara dari informan diatas dapat diartikan bahwa kebijakan dalam penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru dalam kategori aspek institusi pelaksana sudah melakukan pembentukan tim gugus tugas dalam hal pelaksanaan penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru. Hal ini dapat diartikan bahwa aspek institusi dalam penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru memiliki peran yang cukup vital.

Untuk melihat hal tersebut penulis melakukan wawancara Ketua Tim Ahli di mana beliau mengatakan:

“Pelaksanaan PSBB oleh Pemerintah Daerah diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 tanggal 31 Maret 2020. Dalam pidato Presiden Republik Indonesia disampaikan

²⁷ bahwa PP ini diputuskan dengan pertimbangan yang sesuai kultur negara Indonesia. Kami selaku Tim Ahli untuk Pemerintah Kota Pekanbaru telah bekerja sesuai yang di sarankan oleh Pemerintah Pusat serta yang paling penting, langkah Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menetapkan PSBB telah sesuai dengan standar protokol internasional dari WHO untuk menangani persebaran Covid- 19 ini”²⁹

²⁸ Wawancara terkait aspek institusi. Bapak H.Dr.Firdaus, ST., MT tanggal 16 April 2021.
²⁹ Wawancara terkait aspek institusi. Bapak H.Muhammad Jami tanggal 16 April 2021.

4.3.1.4 Aspek Individu.

Peran individu sebagai agen utama dalam sebuah kebijakan memiliki peran yang sangat penting dalam menggabungkan arus kebijakan yang terpisah dari masalah kebijakan dan politik.³⁰

Sementara peran perantara kebijakan, yang perhatian utamanya adalah menemukan beberapa kompromi yang masuk akal yang akan mengurangi intensitas konflik. Membayangkan individu sebagai agen yang sampai batas tertentu tidak hanya berdiri terpisah dari jaringan dan komunitas.³¹

Aspek individu memiliki peran penting untuk keberhasilan suatu kebijakan yang telah dibuat. Untuk melihat hal tersebut penulis melakukan wawancara dengan Walikota Pekanbaru di mana beliau mengatakan bahwa:

Masyarakat secara umum telah menyadari bahwa pentingnya menjaga Kesehatan dan menggunakan protokol kesehatan

“Pada prinsip nya masyarakat telah menjalankan protokol Kesehatan yang di tetapkan oleh Pemerintah, hanya saja ada Sebagian masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan. Ini berdasarkan data hasil Operasional yustisi dari Satgas Covid-19 dan Satpol PP Kota Pekanbaru”³²

Pertanyaan yang sama penulis tanyakan kepada Bapak Muhammad Jamil

selaku Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru di mana beliau mengatakan bahwa :

²⁹ Was
³⁰ Geoffrey Duddley and Jeremy Ricarhdson.2000.Why Does Policy Change. Taylor & Francis e-Library.

³¹ Ibid “Berdasarkan data-data yang ada pada prinsip nya masyarakat telah

³² Wawancara terkait aspek indiyidu, Bapak H.Dr.Firdaus, ST., MT tanggal 16 April 2021
menjalankan protokol kesehatan yang di tetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, tetapi ada sebagian masyarakat yang mengabaikan protokol Kesehatan itu sendiri. Ini berdasarkan data hasil yustisi Satpol PP Kota Pekanbaru”³³

Untuk melihat hal tersebut penulis melakukan wawancara Ketua Tim Ahli di mana beliau mengatakan bahwa :

“Pemerintah Daerah sebaiknya berhati-hati dalam penerapan PSBB karena akan menjadi krusial jika pelaksanaannya tidak dilaksanakan dengan seutuhnya. Pembatasan skala besar bukan hanya skala wilayah

tetapi juga skala aktivitas, jam dan kesadaran besar dari semua penduduk, pemangku kepentingan dan Pemerintah”³⁴

Pertanyaan yang sama penulis tanyakan kepada Kepala Satpol-PP Bapak Iwan Simatupang di mana beliau mengatakan :

“Berdasarkan data hasil yustisi Satpol PP Kota Pekanbaru bersama Tim Satgas Covid-19 Kota Pekanbaru pada prinsip nya masyarakat telah menjalankan protokol kesehatan yang di tetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Hanya saja masyarakat kurang disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan apabila sedang melakukan aktivitas di luar rumah”³⁵

Berdasarkan wawancara diatas dikatakan bahwa Dinamika Kebijakan Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru, tingkat keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh aspek individu baik itu sikap individu dari pemerintah sebagai contoh maupun individu dari masyarakat itu sendiri dalam mematuhi kebijakan yang di tetapkan pemerintah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara, dimana masih banyak masyarakat yang belum disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan yang telah di tetapkan pemerintah selama Pembatasan Sosial

³² Wawancara Berskala Besar (PSBB) berlingkup H. Muhammad Jamil tanggal 16 April 2021

³⁴ Wawancara terkait aspek individu. Bapak dr. Arnaldo Eka Putra tanggal 8 Juni 2021

³⁵ Wawancara terkait aspek individu. Bapak Iwan Simatupang, AP, .M.Si tanggal 16 April 2021

Namun mengetahui peran aspek individu masyarakat penulis melakukan wawancara dengan beberapa kelompok masyarakat Wilayah Kecamatan Tampan dan driver online.

Menurut masyarakat bernama Muamar di mana beliau mengatakan bahwa

:

“Karena protokol kesehatan dibuat oleh WHO (*word health organization*) selaku organisasi kesehatan dunia yang mana protokol kesehatan dibuat berguna untuk mencegah penularan Covid-19 dan

memutus rantai penyebaran Covid-19 guna menuju tatanan kehidupan new normal dan inilah alasan mengapa protocol Kesehatan tetap penting”³⁶

Sedangkan masyarakat bernama Kiki Mukhsis di mana beliau mengatakan bahwa :

“Tentu saya selaku masyarakat harus mendukung kebijakan pemerintah yang mengharuskan menjaga kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan di massa pandemi Covid-19. Ini kita lakukan untuk menghindari tetularnya virus Covid-19, saya selaku pengusaha telah menerapkan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan di lingkungan tempat usaha yang saya jalani ”³⁷

Masyarakat Devi Rusnita beliau pun mengatakan hal yang sama yakni :

“Saya selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) alhamdulillah telah menjalankan aktivitas sehari-hari dengan memperhatikan protokol Kesehatan yakni; memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Dan saya selaku PNS tentu harus menjadi contoh bagi masyarakat”³⁸

Sedangkan masyarakat sekaligus Dosen Fakultas ekonomi Universitas

³⁶ Wawancara terkait aspek individu. Bapak Muamar tanggal 7 April 2021

³⁷ Wawancara terkait aspek individu. Ibu Kiki Mukhsis tanggal 7 April 2021, Islam Riau yakni Bapak Dr. Trian Zuhadi, SE, M. Ed mengatakan bahwa :

³⁸ Wawancara terkait aspek individu. Ibu Devi Rusnita tanggal 7 April 2021

“Saya selaku Pengajar dan masyarakat tentu sangat mendukung apa yang telah Pemerintah keluarkan terkait penanganan Pandemi Covid-19. Oleh karena itu masyarakat harus mendukung kebijakan yang telah di keluarkan pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19”³⁹

Masyarakat Fadla Anisa beliau pun mengatakan bahwa :

“Saya selaku Pegawai Honorer alhamdulillah telah menjalankan aktivitas sehari-hari dengan memperhatikan protokol Kesehatan yakni; memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Selain itu pula pimpinan saya di kantor juga menghimbau kepada bawahannya untuk tidak masuk kantor apabila kondisi tubuh

tidak fit, hal ini dilakukan agar kami tidak tertular Covid-19 atau sebaliknya’’⁴⁰

Pengemudi Driver Gocar bernama Kriston Sirait beliau pun mengatakan bahwa :

“Selama mencari orderan, Bapak Kriston Sirait selalu menggunakan masker, menyediakan hand sanitezer, menjaga jarak antara pengemudi dan penumpang serta dengan jumlah kapasitas penumpang 4 (empat) orang dengan pengemudi. Hal ini dilakukan oleh Bapak Kriston Sirait untuk menghindari tertularnya Virus Covid-19 dan mematuhi himbauan Pemerintah’’⁴¹

Pengemudi Driver Blue Bird bernama Risky Akbar beliau pun mengatakan bahwa :

“Selama mencari orderan, Perusahaan telah menyediakan hand sanitezer di dalam mobil dan Saya selaku Driver setiap akan mulai bekerja selalu diberikan pengarahan terkait 4 M yakni : Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan menghindari kerumunan serta juga di dalam mobil untuk menjaga jarak antara pengemudi dengan jumlah kapasitas penumpang 4 (empat) orang beserta pengemudi. Hal ini dilakukan oleh Bapak Risky untuk menghindari tertularnya Covid-19 dan mematuhi himbauan Pemerintah’’⁴²

— Berdasarkan hasil temuan penelitian diatas, peneliti mengutip pernyataan

³⁹ Wawancara terkait aspek individu. Bapak Dr. Trian Zuhadi tanggal 1 April 2021.

⁴⁰ Wawancara terkait aspek individu. Ibu Farla Anisa tanggal 7 April 2021. Leo Agustino (2016:51) dalam judul buku Dasar-dasar Kebijakan Publik,

⁴¹ Wawancara terkait aspek individu. Bapak Kriston Sirait tanggal 5 April 2021.

⁴² Wawancara terkait aspek individu. Bapak Risky Akbar tanggal 15 April 2021.

pendekatan dalam kebijakan publik diantaranya adalah : Teori sistem, Teori kelompok, Teori elite, Teori proses fungsional, Teori kelembagaan dan Teori dinamika. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pendekatan melalui Teori Dinamika untuk melihat Kebijakan penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru berdasarkan ‘*Four Is*’ yakni : Ide, kepentingan, institusi dan individu. Berdasarkan hasil peneliti yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan observasi serta wawancara, indikator yang paling dominan dalam Kebijakan

Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru adalah : Aspek Ide, Aspek Kepentingan dan Aspek Individu.

Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Kebijakan Penanganan Covid-19, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, Aspek Ide merupakan salah satu yang menjadi dasar dalam kebijakan penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru. Berdasarkan indikator pada aspek ide telah melibatkan struktural dan fungsional. Sedangkan pada Aspek Kepentingan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Kebijakan penanganan Covid-19 telah mempertimbangkan faktor-faktor yakni ; ekonomi, sosial, Kesehatan dan politik serta Apek Individu sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan PSBB, Pemerintah harus mau hadir dan turun ke wilayah untuk menunjukkan pentingnya pelaksanaan PSBB. Walikota bersama tokoh agama dan masyarakat akan menjadi simpul kuat tersendiri PSBB di wilayah dan komunitasnya. Masyarakat saat ini hanya butuh empati dan contoh nyata Pemerintah untuk berdisiplin ber-PSBB, maka masyarakat akan bergerak dengan kekuatannya untuk disiplin dan fokus pada kesehatan.

4.4 Best Practice

4.4.1 Penanganan Pandemi Flu Spanyol Tahun 1918

Pada Tahun 1918 dunia dilanda pandemi flu Spanyol yang menewaskan setidaknya 50 juta orang di seluruh dunia. Banyak langkah dilakukan untuk mencegah penyebaran virus baik oleh pemerintah maupun orang-orang diantaranya dengan mengenakan masker, menghirup udara segar dan menyantap bubur hangat.

Covid-19 adalah virus yang benar-benar baru, yang secara tidak proporsional mempengaruhi para lansia. Jenis influenza mematikan yang melanda dunia pada 1918 cenderung menyerang mereka yang berusia antara 20 dan 30 tahun, dengan sistem kekebalan tubuh yang kuat. Namun berbagai tindakan yang diambil oleh pemerintah maupun individu untuk mencegah penyebaran infeksi tampaknya sudah pernah dilakukan.

Lembaga kesehatan Inggris *Public Health England* mempelajari wabah flu Spanyol untuk menyusun rencana kontingensi awal untuk menghadapi virus corona. Pelajaran utama yang mereka petik adalah gelombang kedua dari penyebaran virus ini, pada musim gugur 1918, terbukti jauh lebih mematikan ketimbang serangan pada gelombang pertama.

Para staf perempuan dari salah satu divisi perang berjalan kaki selama 15 menit untuk menghirup udara segar di pagi hari untuk menangkal virus semasa Perang Dunia I tahun 1918. Negara itu masih dilanda perang ketika virus tersebut merenggut korban pertama yang tercatat pada Mei 1918. Pemerintah Inggris, seperti banyak negara lainnya, tidak siap dengan wabah ini. Mereka tampaknya lebih mengutamakan perang ketimbang mencegah kematian akibat flu.

Menurut laporan yang dibuat Sir Arthur Newsholme tahun 1919 untuk *Royal Society of Medicine*, wabah ini meluas bak kebakaran melalap mobil-mobil serdadu dan pabrik amunisi, serta bus-bus dan kereta api. Namun panduan tertulis untuk masyarakat yang disusunnya pada Juli 1918, berisi anjuran agar orang-orang tetap di rumah jika mereka sakit dan menghindari

aktivitas kerumunan, tidak digubris oleh pemerintah. Sir Arthur berpendapat bahwa banyak nyawa bisa diselamatkan jika aturan-aturan ini diikuti, namun ia menambahkan Ada beberapa situasi nasional yang harus mengedepankan tugas-tugas utama, bahkan saat menyangkut soal kehidupan dan risiko kesehatan.

Sejumlah perempuan yang bekerja di kantor mengenakan masker bedah untuk mencegah penyebaran virus flu. Kala itu di tahun 1918, obat untuk menyembuhkan influenza belum ditemukan, juga tidak ada antibiotik untuk mengobati komplikasi seperti pneumonia. Banyak rumah sakit kewalahan. Pemerintah tidak menerapkan pembatasan wilayah yang lebih ketat atau *lockdown* untuk menekan penyebaran virus, meski banyak gedung pertunjukan teater, ruang dansa, bioskop dan gereja ditutup, dalam beberapa kasus selama berbulan-bulan. Pub, yang membatasi jam operasional selama perang, sebagian besar tetap buka. Liga Sepak Bola dan Piala FA juga dibatalkan karena perang, namun tidak ada upaya untuk membatalkan pertandingan lain atau membatasi jumlah penonton.

Pertandingan-pertandingan olahraga yang melibatkan kaum pria, juga kompetisi sepak bola perempuan, yang menarik perhatian banyak orang, berlanjut sepanjang pandemi. Sejumlah jalanan di dalam kota dan sekitarnya disemprot dengan desinfektan dan beberapa orang memakai masker anti-kuman, saat mereka menjalani kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Pesan-pesan layanan kesehatan pun membingungkan banyak orang - dan, seperti saat ini, banyak kabar bohong dan teori konspirasi bertebaran. Di beberapa pabrik, aturan dilarang merokok dilonggarkan, dengan keyakinan bahwa rokok akan membantu mencegah infeksi. Dalam sebuah debat tentang pandemi, anggota parlemen dari partai Konservatif, Claude Lowther, lantang bertanya: Apakah sudah ada faktanya bahwa cara yang ampuh untuk melawan influenza itu adalah dengan merokok tiga kali sehari.

Berbagai kampanye dan membagikan selebaran dilakukan untuk memperingatkan agar tidak menyebarkan penyakit melalui batuk dan bersin. Pada November 1918, *News of the World* menyarankan para pembacanya: "mencuci hidung dengan sabun dan air setiap malam dan pagi; paksa diri Anda untuk bersin pada malam dan pagi hari, lalu bernapas dalam-dalam. Jangan mengenakan selendang; langsung pulang ke rumah selepas kerja dan menyantap bubur hangat.

4.4.2 Penanganan Covid-19 di Negara Singapura

Pemerintah Singapura meyakini bahwa virus corona tidak bisa lenyap dan akhirnya menjadi endemik. Itu berarti, SARS-CoV-2 tidak akan hilang dan akan terus ada di sekitar manusia dan populasi global selama beberapa tahun ke depan. Baca juga: Singapura Persiapkan Rencana Hidup Bersama Covid-19 Oleh karenanya Negeri Singa berencana menyiapkan cetak biru alias *blueprint* agar warganya hidup dengan Covid-19. *Blueprint* tersebut disusun untuk mempersiapkan warga Singapura dapat beraktivitas normal dengan Covid-19 tanpa harus menjalani karantina dan lockdown. The Straits Times melaporkan, blueprint yang sedang dipersiapkan tersebut akan menjadi panduan hidup warganya dengan Covid-19.

Singapura menargetkan agar penerbangan internasional dapat beroperasi kembali. Rencananya, warga yang sudah divaksin tak perlu menjalani karantina jika dia dinyatakan negatif Covid-19 menurut hasil tes. Pembukaan penerbangan internasional dapat dimulai dengan menerapkan travel bubble dengan sejumlah negara atau wilayah yang dianggap berhasil mengendalikan penyebaran virus corona. Pekerja asing seperti asisten rumah tangga dan buruh konstruksi diharapkan bisa masuk lagi ke Singapura. Pasalnya, saat ini sektor perekonomian yang bergantung kepada pekerja asing mengalami kekurangan tenaga kerja sehingga membuat mereka kewalahan.

Sejumlah acara yang melibatkan banyak orang seperti perayaan Hari Kemerdekaan, pesta tahun baru, pertandingan olahraga, dan konser musik juga akan kembali diselenggarakan. Warga yang sudah divaksin dapat kembali berkumpul dalam jumlah besar tanpa harus menjaga jarak. Selanjutnya,

penanganan kasus Covid-19 akan difokuskan ke penderita dengan gejala berat, terutama yang dirawat di ruang ICU. Kelak warga yang terinfeksi dapat menjalani pemulihan atau isolasi di rumah masing-masing tanpa harus dirawat inap di rumah sakit.

Pada fase endemik, kasus Covid-19 menjadi relatif konstan selama bertahun-tahun, dengan kambuh sesekali. Ini juga berarti wabah Covid-19 dapat terus terjadi dari waktu ke waktu. Gugus tugas Covid-19 Singapura menyatakan, Covid-19 akan ditangani seperti penyakit endemik lainnya, misalnya influenza dan cacar air. Saat ini, Singapura tengah gencar melakukan vaksinasi. Pada 9 Agustus, negara tersebut menargetkan dua pertiga warganya mendapat vaksin virus corona. Setiap hari, ada sekitar 80.000 warga Singapura divaksinasi. Vaksinasi disebut ampuh memangkas penyebaran Covid-19. Walaupun terinfeksi virus corona, mayoritas penerima vaksin ini tidak menunjukkan gejala atau hanya mengalami gejala ringan.

Saat ini Negeri Merlion sedang menjalani transisi menuju new normal setelah mencabut lockdown parsial yang sempat diterapkan sejak 16 Mei hingga 13 Juni. Warga Singapura kini bisa berkumpul maksimal lima orang dan bersantap bersama maksimal dua orang. Pada akhir April, Singapura sempat diguncang oleh virus corona varian Delta yang disebut dapat menular lebih cepat. Dalam 10 bulan sebelum April, kasus Covid-19 lokal konsisten mendekati angka nol. Menurut data terbaru, total kasus Covid-19 di Singapura adalah 62.530 kasus, di mana 143 pasien saat ini menjalani perawatan di rumah sakit. Sebanyak 170 orang sedang menjalani pemulihan di fasilitas isolasi.

Sementara itu, jumlah korban meninggal akibat Covid-19 di Singapura adalah 36 orang.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai Dinamika Kebijakan Dalam Penanganan Covid-19 Di Kota Pekanbaru, dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut ini :

5.1 Kesimpulan

1. Sesuai dengan data yang diperoleh peneliti, Dinamika Kebijakan Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru kesimpulannya adalah bahwa Kebijakan Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru telah sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Pusat.
2. Berdasarkan temuan penelitian indikator yang paling dominan dalam kebijakan penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru adalah : Aspek Ide, Aspek Kepentingan dan Aspek Individu yang memiliki peran penting dalam keberhasilan kebijakan penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru.
3. Beberapa faktor penghambat Pelaksanaan Kebijakan Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru adalah faktor masyarakat, faktor yang menjadi penghambat yang berasal dari masyarakat antara lain : Faktor tidak mengikuti protokol kesehatan seperti mengenakan masker dan menjaga jarak, melakukan perkumpulan, hingga tetap bepergian selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

4. Keterbatasan Anggaran pada saat Kebijakan Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru, dikarenakan anggaran yang tersedia hanya untuk sarana dan prasarana kesehatan. Dimana anggaran yang tersedia hanya bersumber dari APBD Kota Pekanbaru.
5. Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menjadi polemik pada saat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berlakukan di Kota Pekanbaru, berdasarkan hasil penelitian bahwa BLT tersebut telah tepat sasaran sebagaimana yang telah dijadikan kriteria oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Data-data tersebut berasal dari RT/RW, kelurahan dan Kecamatan dengan kriteria yakni; masyarakat miskin baru, dimana di masa pandemi masyarakat yang memiliki usaha maupun yang berkerja terkena dampak langsung akibat pandemi Covid-19. Awalnya dulu mereka bekerja dan punya usaha tetapi akibat pandemi Covid-19 mereka di PHK dan tempat usaha pun tutup, walaupun masih memiliki rumah dan kendaraan tapi untuk kehidupan sehari-hari mereka tidak bisa untuk memenuhi. Selain itu juga kurangnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah akibat kondisi yang tidak normal dan waktu yang cukup singkat sehingga sosialisasi dilakukan secara virtual dan tidak maksimal mengingat keterbatasan waktu serta pemahaman pendataan tentang masyarakat miskin kurang di mengerti.
6. Konsep transparansi pemerintah memainkan peran kunci dalam memberikan *decision making* yang efektif bagi output kebijakan publik dalam aksi cepat tanggap penanggulangan Covid-19.

7. Percepatan distribusi bantuan sosial bagi masyarakat miskin, rawan miskin yang terdampak Covid-19, karena dengan adanya jaminan kebutuhan dasar bagi kelompok masyarakat tersebut membuat masyarakat lebih tertib untuk mengikuti anjuran *stay at home*.
8. Keterbukaan informasi, ketepatan mobilisasi, koordinasi pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi masyarakat yang solid menjadi dukungan inti bagi terlaksananya kebijakan yang efektif. Kebijakan yang efektif akan mampu menjadi strategi nasional dan daerah yang dapat menekan kasus penularan Covid-19.
9. Peran aktif dari masyarakat terhadap keberhasilan kebijakan dalam penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru sangat di perlukan demi keberhasilan suatu kebijakan yang telah di tetapkan.
10. Bencana Covid-19 termasuk urusan Pemerintahan Umum sehingga menjadi tanggung jawab Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, kemudian di limpahkan kewenangannya kepada gubernur, bupati dan walikota sebagai Kepala Pemerintahan. Artinya kebijakan-kebijakan penanganan Covid-19 menjadi tanggung jawab walikota sebagai Kepala Pemerintahan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan dan keterbatasan-keterbatasan yang ada, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Menjalin komunikasi yang lebih baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dengan terjalinnya komunikasi yang baik dapat menjalankan kebijakan yang solid, fektif dan tidak terjadi miskomunikasi.
2. Pemantauan atau pengawasan langsung sebaiknya dilakukan secara rutin dan berkala. Ini dilakukan agar hasil dan pelaksanaan Kebijakan Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru dapat diukur secara baik, apakah sesuai dengan rencana yang ada atau tidak. Dengan adanya pemantauan langsung secara rutin dan berkala diharapkan masalah-masalah dan kesalahan-kesalahan yang ada dalam pelaksanaan Kebijakan Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru dapat segera diketahui dan teridentifikasi.
3. Evaluasi dilakukan secara lebih rutin dan mendetail. Dengan evaluasi yang baik dan rutin diharapkan dapat mempersiapkan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Kebijakan Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru.
4. Memperbaiki data masyarakat yang akan menerima bantuan sosial, karena data sebelumnya masih data lama dan data terkini sudah banyak perubahan.
5. Menyediakan tenaga kesehatan yang dilengkapi dengan alat Thermal Scanner untuk mengecek suhu orang di daerah perbatasan dan juga tenaga pencatatnya.

6. Sampai saat ini, kita masih berharap PSBB akan memunculkan efek untuk paling tidak mempertahankan angka pertumbuhan, untuk menurunkan grafik faktor kesadaran penduduk untuk tidak berkontak dan berjumpa akan sangat dominan. Pemerintah harus mulai aktif mencegahnya, tidak permisif dengan kerumunan yang berpotensi besar serta adanya usaha Pemerintah Daerah untuk menjamin penduduk tercukupi dari sisi pangan, ekonomi dan sosialnya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ackrill, Robert W. and A. Kay. 2006. *Measuring path dependency in the Cap*. unpublished manuscript.
- Adrian Kay. 2006. *The Dynamics Of Public Policy*. Brisbane, Australia: Griffith University.
- Arifin Tahir. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Bandung : Alfabeta CV.
- Abidah, A., & dkk. (2020). *The Impact of Covid 19 to Indonesian Education and Its Relation to the Philosophy of "Merdeka Belajar"*. *Studies in Philosophy of Science and Education* 1 (1), 38-49.
- Almuttaqi, A. I. (2020). *Kekacauan Respon terhadap Covid 19 di Indonesia*. Jakarta: The Insights The Habibie Center.
- Bottomore, T.B. 2006. *Elite dan Masyarakat*. Akbar Tanjung Institute.
- Bungin Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Buana, D. R. (2020). *Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid 19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa*. Salam: *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* 7 (3), 217-226.
- Budi, Arya & Irham Nur Anshari. 2020. *"Administration Distancing", Pemerintah Daerah Dalam Pandemi Covid-19*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM: UGM Press.
- Dwiyanto, Agus dkk. 2003b. *Teladan dan Pantangan 'Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah'*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gajah Mada.
- Djohan, Djoehermansyah. 2014. *Merajut Otonomi Daerah' pada era reformasi (kasus reformasi)'*. Jakarta: IKAPTK.
- Dwiyanto Indiahono. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Eddyono, Suzanna, et. al. 2020. *Pandemi dan Yang Tersingkir: Menakar Urgensi Kebijakan Inklusif Penanganan Covid-19*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM: UGM Press.
- Geoffrey Duddley and Jeremy Ricardhson. 2000. *Why Does Policy Change? Lesson from British Transport Policy 1945-99*. London : Routledge.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Kansil, dkk. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Leo Agustino. 2017. *Dasar – dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Marbun, B.N. 2005. *DPRD dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Muhadam Labolo. 2017. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mas'udi, Wawan & Poppy S. Winanti. 2020. *Covid 19 : Dari Krisis Kesehatan ke Krisis Tata Kelola*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM : UGM Press.

- Ndraha, T.2003. *Kybernology I*.Jakarta: Rineka Cipta.
- Olivia Fachrunnisa dan Diah Ayu Kusumawati.2020. *SUSTAINABILITAS BISNIS: Pendekatan Manajemen Sumber Daya Insani di Masa Pandemi Covid-19*. Semarang: Unissula Press.
- Rahyunir Rauf.2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah''dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan''*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Salim, Said.2004. *Meningkatkan Nilai-nilai Kebangsaan di Era Otonomi Daerah*.Jakarta.
- Subarsono, AG.2005.*Analisis Kebijakan Publik: Konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafruddin, Ateng.2006. *Mengarungi Dua Samudra*.Bandung: Sayagatama.
- Syafhendri.2017. *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Pemerintahan*.Pekanbaru.
- Sugiono.2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syaifudin. (2020, Maret 31). *Covid- 19 Kerentanan Sosial dan Gagalnya Pshysical Distancing*. Dipetik April 7, 2020, dari Tempo.co: <https://kolom.tempo.co/read/1326074/covid-19-kerentanan-sosial-dan-gagalnya-physical-distancing>.
- Tjokrowinoto, Meljarto.2010. *Birokrasi dalam Polemik*.Malang: Pustaka Pelajar Unismuh.
- Utang Rosidin.2010. *Otonomi daerah dan desentralisasi: Dilengkapi UU.Nomor 32 Tahun 2004 dengan perubahan-perubahannya*. Bandung : Pustaka Setia.
- Wasistio, Sadu dan Yonatan Wiyoso.2009. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD)*.Bandung: Fokusmedia.
- Widianingrum, Ambar & Wawan Mas'uid. 2020. *Dinamika Respon Pemerintah Nasional: Krisis Kebijakan Penanganan Covid-19*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM: UGM Press.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/250/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kota Pekanbaru Provinsi Riau Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Pekanbaru.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Pekanbaru.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Pekanbaru.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

C. JURNAL

Ega Kurnia Yazid.2020. *Menakar Keberhasilan PSBB dalam Penanganan Covid-19 : Data dan Peringatan bagi Pemerintah Daerah.*

Heri Kurniawansyah HS, Amrullah, M.Salahuddin, Muslim, Sri Nurhidayati.2020. *Konsep kebijakan strategis dalam menangani eksternalitas ekonomi dari covid - 19 pada masyarakat rentan di Indonesia.*

Muhyiddin.2020. *Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia.*

Ranggi Ade Febrian. 2015. *Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual Dan Teoritis).* Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, 1.1:41-49

Susilo, A., & dkk. (2020). Coronavirus Desease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7 (1), 45-63.

Wibowo hadiwardoyo.2020. *Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19.* Universitas Muhammadiyah Jakarta

Zulfa Harirah.2020. *Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia.*

D. Sumber Bacaan Lain

Berita Online :

CNN. (2020, April 10). Kasus Positif Corona di Indonesia Kini ada di 34 Provinsi. Dipetik April 19, 2020, dari CNN Indonesia.com: <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200410162438-20-492439/kasus-positif-coronadi-indonesia-kini-ada-di-34-provinsi>. Diakses 04 Maret 2021, 16.52 Wib

<https://news.detik.com/berita/d-5006967/ada-warga-bermobil-di-data-pemkot-forum-rt-di-pekanbaru-tolak-bagikan-bansos>. Diakses 08 Mei 2020, 14.13 Wib

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/113008565/timeline-wabah-virus-corona-terdeteksi-pada-desember-2019-hingga-jadi?page=all>. Diakses 12 Maret 2020, 12.05 Wib

<https://www.beritasatu.com/nasional/627233/psbb-di-pekanbaru-akan-diperpanjang-dan-dipertegas>. Diakses 04 Maret 2021, 10.50 Wib

<https://www.riaueditor.com/view/Peristiwa/68560/Giliran-BEM-Unri-Soroti-Kebijakan-Wako-Firdaus-MT-Terkait-Pemberian-Sembako-PSBB.html>. Diakses 04 Maret 2021, 10.53 Wib

- <https://news.detik.com/berita/d-4970470/pekanbaru-belum-siap-ajukan-psbb-karena-anggaran-daerah-terbatas>. Diakses 04 Maret 2021, 10.57 Wib
- <https://mediaindonesia.com/nusantara/305481/dprd-pekanbaru-heran-ke-mana-anggaran-jps-rp115-miliar>. Diakses 04 Maret 2021, 11.02 Wib
- <https://regional.kompas.com/read/2020/04/16/16470551/psbb-di-pekanbaru-resmi-berlaku-mulai-jumat-17-april-2020>. Diakses 04 Maret 2021, 11.33 Wib
- <https://www.medcom.id/nasional/daerah/PNgYE68k-900-karyawan-di-pekanbaru-dirumahkan-akibat-pandemi-covid-19>. Diakses 04 Maret 2021, 11.38 Wib
- Pasardana, 2020, Penjelasan Sri Mulyani Terkait Sumber Pendanaan Untuk Penanganan Covid--19 di Indonesia. <https://pasardana.id/news/2020/4/2/penjelasan-sri-mulyani-terkait-sumberpendanaan-untuk-penanganan-covid19-di-indonesia/> [Online]. Diakses 2 April 2020, 10.11 Wib

